KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat menyampaikan "**Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011**".

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan dan tugas di Sub Sektor Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai Desember 2011, yang menyajikan berbagai informasi mengenai moda transportasi darat, yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan dan keselamatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi darat pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan

Jakarta, Mei 2012

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. MAKSUD DAN TUJUAN I-2

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI I-2

C. VISI DAN MISI I-3

D. RUANG LINGKUP I-4

BAB II KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF II-1

A. BIDANG PERENCANAAN II-1

B. BIDANG KEUANGAN II-7

C. BIDANG HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI II-14

D. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM II-34

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 III-1

A. BIDANG PEMERINTAHAN III-1

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL III-1

2. DIREKTORAT LLAJ III-12

3. DIREKTORAT LLASDP III-38

4. DIREKTORAT BSTP III-49

5. DIREKTORAT KTD III-64

B. BIDANG PEMBANGUNAN III-69

C. BANTUAN LUAR NEGERI III-73

BAB IV OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT IV-1

A. LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN IV-1

1. Umum IV-1

2. Perkembangan Prasarana LLAJ IV-4

3. Perkembangan Sarana LLAJ IV-9

4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan PPNS Bidang LLAJ IV-11

5. Kegiatan-kegiatan Strategis IV-15

B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN IV-16
1. Umum IV-16
2. Perkembangan Prasarana LLASDP IV-17
3. Perkembangan Sarana LLASDP IV-25
4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan IV-27
5. Kegiatan-kegiatan Strategis IV-30
6. Permasalahan yang dihadapi IV-35
7. Upaya yang dilakukan IV-36
C. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN IV-37
1. Umum IV-37
2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan IV-43
3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan IV-48
4. Kinerja Angkutan Perkotaan IV-50
5. Program Gasifikasi Kendaraan Umum Perkotaan IV-50
6. Kegiatan-kegiatan Strategis IV-51
7. Permasalahan yang dihadapi IV-52
8. Upaya yang dilakukan IV-52
D. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT IV-53
1. Umum IV-53
2. Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan IV-54
3. Kegiatan Keselamatan Transportasi Jalan IV-57
4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan IV-91

BAB V KINERJA UPT DAN BUMN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT V-1
A. KINERJA UPT V-1
1. UPT BLJSKB BEKASI V-1
2. UPT PENYEBERANGAN V-8
B. KINERJA BUMN V-31
1. PERUM DAMRI V-31
2. KINERJA PERUM PPD V-36
3. PT.ASDP INDONESIA FERRY V-38

BAB VI PENUTUP **VI-1**

LAMPIRAN

A. LAPORAN SEMENTARA ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2011 (1432 H) PADA H-7 S.D H+6

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

C. LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2011	II-7
Tabel II-2	Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	II-18
Tabel II-3	Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait	II-22
Tabel II-4	Matriks Rekapitulasi Kegiatan KSLN Ditjen Hubdat Tahun 2011	II-29
Tabel II-5	Perjanjian, MoU, Arrangement, Delaration yang terkait dengan subsektor transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2011	II-32
Tabel II-6	Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	II-35
Tabel II-7	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-35
Tabel II-8	Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II-36
Tabel II-9	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-36
Tabel II-10	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-36
Tabel II-11	Pegawai Berdasarkan Eselonering	II-37
Tabel III-1	Penerbitan Sertifikasi Uji Tipe	III-21
Tabel III-2	Penerbitan Sertifikasi Uji Tipe	III-22
Tabel III-3	Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	III-22
Tabel III-4	Penerbitan Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	III-24
Tabel III-5	Bengkel BBG yang telah mendapat sertifikasi	III-25
Tabel III-6	Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011	III-70
Tabel III-7	Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011	III-70
Tabel III-8	Progres APBN TA. 2011 per 31 Desember 2011 Sub Sektor Perhubungan Darat	III-70
Tabel III-9	Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ	III-71
Tabel III-10	Program dan Realisasi Pembangunan Bidang Perkotaan	III-71
Tabel III-11	Trayek Perintis Angkutan Jalan Di Seluruh Indonesia	III-72
Tabel III-12	Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP	III-73
Tabel IV-1	Kepadatan Penduduk	IV-1

Tabel IV-2	Aset Jalan Jembatan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Jumlah Penduduk/ Luas Wilayah	IV-4
Tabel IV-3	Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2011	IV-6
Tabel IV-4	Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2011	IV-7
Tabel IV-5	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Kuching untuk melayani trayek Kuching - Pontianak	IV-8
Tabel IV-6	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	IV-8
Tabel IV-7	Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	IV-10
Tabel IV-8	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	IV-10
Tabel IV-9	Jumlah Pelanggaran di Jembatan Timbang	IV-11
Tabel IV-10	Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2011	IV-12
Tabel IV-11	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Operasional dan Persyaratan Teknis Laik Jalan	IV-13
Tabel IV-12	Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2007 - 2011	IV-14
Tabel IV-13	Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif Tahun 2006 - 2011	IV-15
Tabel IV-14	Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2011 Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP	IV-15
Tabel IV-15	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan	IV-17
Tabel IV-16	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan	IV-18
Tabel IV-17	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota	IV-18
Tabel IV-18	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	IV-19
Tabel IV-19	Lintas Penyeberangan Komersil	IV-20
Tabel IV-20	Lintas Penyeberangan Bersubsidi	IV-21
Tabel IV-21	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan	IV-24
Tabel IV-22	Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP	IV-24
Tabel IV-23	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau	IV-25
Tabel IV-24	Jumlah Kapal SDP yang beropersi	IV-25

Tabel IV-25	Jumlah Kapal Penyeberangan yang beropersi berdasarkan Kepemilikan	IV-26
Tabel IV-26	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005 - 2010	IV-26
Tabel IV-27	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	IV-26
Tabel IV-28	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	IV-27
Tabel IV-29	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005-2011	IV-27
Tabel IV-30	Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil seluruh Lintas Tahun 2011	IV-27
Tabel IV-31	Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis seluruh Lintas Tahun 2011	IV-28
Tabel IV-31	Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-39
Tabel IV-32	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-39
Tabel IV-33	Data Pelayanan Taksi di Kawasan Perkotaan	IV-40
Tabel IV-34	Rekapitulasi Data Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Jalan Dengan Angkutan Udara Per 31 Desember 2011	IV-41
Tabel IV-35	Data Prasarana Tahun 2011	IV-44
Tabel IV-36	Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL	IV-46
Tabel IV-37	Data Lalu Lintas Tahun 2011	IV-47
Tabel IV-38	Jumlah Angkutan Umum	IV-48
Tabel IV-39	Gasifikasi Pada Angkutan Umum	IV-50
Tabel IV-39	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor berdasarkan tingkat kecelakaan Tahun 2007-2011	IV-54
Tabel IV-40	Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Usia	IV-55
Tabel IV-41	Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2004-2010	IV-55
Tabel IV-42	Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2004-2010	IV-56
Tabel IV-43	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Komunitas Keselamatan	IV-71
Tabel IV-44	Peserta Workshop Komunitas Keselamatan	IV-71
Tabel IV-45	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan	IV-72
Tabel IV-46	Peserta Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan	IV-72

Tabel V-2	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	V-10
Tabel V-3	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010	V-12
Tabel V-3	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	V-17

B A B I
PENDAHULUAN

Pembangunan transportasi merupakan sebagian dari pembangunan transportasi secara keseluruhan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan transportasi dilaksanakan sebagai dukungan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek yang meliputi pembangunan ekonomi dan investasi, keadilan (equity) serta keamanan dan keselamatan. Ketiga aspek tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan kerangka kerja regulasi yang dalam operasionalnya diwujudkan dengan instrumen dan pendekatan. Sebagai masukan dalam penyusunan instrumen dan pendekatan tersebut adalah tingkat permintaan untuk mobilitas dan dampak lingkungan yang dihasilkan.

Transportasi sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air.

Hingga saat ini transportasi jalan masih mempunyai peran yang sangat dominan hampir 84% total perjalanan antar propinsi menggunakan transportasi jalan, sedangkan peran angkutan kereta api masih sangat kecil sekitar 7% karena jasa angkutan penumpang kerata api nasional hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara peran angkutan sungai danau dan penyeberangan juga masih relatif kecil yakni berkisar 5%.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian (*out-come*) selama satu tahun anggaran sejalan dengan Sistem Transportasi Nasional pada bidang Angkutan Jalan maupun bidang Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap tahun menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011 disusun dengan maksud sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Tujuan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

C. VISI DAN MISI

1. Visi

"Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan"

2. Misi

a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan, keselamatan transportasi darat yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
c. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.

d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. **Bidang Pemerintahan**

   Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup kegiatan non fisik yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan fisik, seperti : penyusunan juknis, kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

2. **Bidang Pembangunan**

   Kegiatan di bidang pembangunan mencakup kegiatan fisik, dimana pendanaannya baik rutin dan pembangunan dibiayai oleh APBN yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran.

3. **Bidang Operasional**

   Kegiatan di bidang operasional mencakup perencanaan teknis, fasilitas perlengkapan ataupun pendukung yang mana kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pada pembinaan teknis.

B A B II

KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF

A. BIDANG PERENCANAAN

Berdasarkan proses perencanaan yang tertuang dalam Pedoman Perencanaan KM. 31 Tahun 2006 di lingkungan Kementerian Perhubungan, di bidang Perencanaan telah dilakukan kegiatan tahun 2011, antara lain :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;

   Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :

   a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
   b. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana.
   c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
   d. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana.
   e. Program Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan.

2. Penyusunan Rencana Strategis 2010-2014;

   Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan darat, yaitu:

   a. Strategi Pembangunan Perhubungan Darat.
   b. Strategi Pemulihan dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan Darat.

3. Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2011;

   Dalam penetapan kinerja berdasarkan pada prioritas program transportasi darat tahun 2011 sebagai berikut :

   a. Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
   b. Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
   c. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
   d. Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan Perundangan.

e. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan di Bidang Transportasi Darat.

4. Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2012;

   Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2012.

5. Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2011;

   Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemaduan jaringan transportasi darat tahun 2011.

6. Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2011;

   Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2011 dengan total pagu sebesar Rp. 5.000.000.000,- tetapi, tidak dapat terserap dikarenakan terdapat permasalahan pada Proses Lelang.

7. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2011;

   LAKIP disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2011, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kinerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Menyusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2011;

   Sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

9. Penyusunan Data Statistik Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2011;

   a. Menyusun format struktur data dan informasi perhubungan darat.
   b. Melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.
   c. Melakukan updating data perhubungan darat.

d. Melakukan kompilasi data dan informasi.
e. Melakukan pemetaan data dan informasi kondisi dan perkembangan perhubungan darat.
f. Melakukan editing dan pengelompokan data terhadap data yang sifatnya tahunan (*time series*).

10. Pengembangan Sistem Informasi;
    a. Melakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN*)* Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap dan berkelanjutan.
    b. Melakukan pengembangan Sistem Informasi melalui penmbangunan aplikasi pentarifan dan manajemen LLAJ untuk angkutan bersubsidi/perintis.
    c. Melakukan bantuan teknis dengan membuat animasi video *Company Profile* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2011.
    d. Melakukan pengendalian operasional.
    e. Melakukan pengembangan data perhubungan darat pada profil dan kinerja Perhubungan Darat tahun 2011.
    f. Menyusun Konsep Peraturan Perundangan terkait Tata Kelola Sistem Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
11. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2011;

    Rakornis Ditjen Hubdat dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2011 dan diikuti oleh 508 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemenhub, Dishub Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan UPT dilingkungan Ditjen Hubdat.

    Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011 yang telah disepakati antara lain :

    a. Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menuntut adanya suatu paradigma baru yang harus disertai dengan perubahan pola pikir, penyamaan persepsi dan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
    b. Dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pula, isu global lain yang ditekankan saat ini yaitu perlunya penanganan keselamatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Umum Nasional

Keselamatan LLAJ (RUNK LLAJ) mengharapkan kita, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam penanganan keselamatan yang diwujudkan dalam aksi nasional.

c. Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan LLAJ harus segera kita respon dengan perumusan kebijakan yang konkrit. Terlebih lagi isu-isu yang sampai dengan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama seperti *over loading* perlu segera kita carikan solusi secara lebih efektif.
d. Perwujudan komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan LLAJ harus dilakukan dengan perbaikan – perbaikan dalam sistem perijinan yang sudah saatnya betul-betul harus dilakukan dengan baik.
e. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ke depan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dilakukan pengembangan sistem yang baru, buku uji yang akan digantikan oleh kartu uji (*smart card*) dan tanda samping serta plat uji yang akan digantikan oleh tanda uji (stiker) yang menggunakan teknologi RFiD (*radio frequency identification*). Dalam hal ini perlu kesiapan kita bersama untuk menuju pada penanganan pengujian kendaraan bermotor yang lebih profesional.
f. Untuk kondisi yang kita hadapi saat ini optimalisasi kebijakan dalam penanganan overloading agar terus dilakukan.
g. Perkembangan angkutan penyeberangan berkembang sangat pesat dalam 15 tahun terakhir yang dikaitkan dengan fungsi angkutan penyeberangan sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan dan berperan sebagai pendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya yang berfungsi *multiplier effect* dan sebagai pendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan.
h. Sebagaimana amanat Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang –Undang No. 17 tahun 2008 perlu dibentuk Balai Perhubungan Darat dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP). Pembentukan Balai Perhubungan Darat dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) pada dasarnya untuk perkuatan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, bukan merupakan bentuk pengambilalihan

fungsi kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan. Berdasarkan ketentuan dan peraturan dari Menteri Keuangan untuk tahun 2012, pengelolaan dana yang bersumber dari APBN harus sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (pengorganisasian anggaran). Pembentukan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) di 4 lokasi yaitu Merak/Bakauheni, Gilimanuk, Lembar dan Bajo'e – Kolaka.

i. Sebagai tindak lanjut amanah Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 saat ini telah tersusun Rencana Umum Nasional Keselamatan yang merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik ditingkat Pemerintah (Pusat) maupun daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program aksi dalam penanganan keselamatan secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.

j. Hal yang sangat penting sebagai tindak lanjut dari RUNK adalah pelaksanaan program-program aksi dan langkah nyata yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan keselamatan jalan secara nasional dengan melandaskan pada 5 pilar yaitu :
   1) Manajemen keselamatan jalan (*safer management*)
   2) Jalan yang berkeselamatan (*safer road*)
   3) Kendaraan yang berkeselamatan (*safer vehicle*)
   4) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (*safer people*)
   5) Penanganan korban pasca keselakaan (*post crash*)

k. Kondisi angkutan umum saat ini dengan kompleksitas permasalahan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi masyarakat, teknis operasional maupun manajerial harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan berkesinambungan.

l. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 bahwasanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Pembina sekaligus penyelenggara LLAJ harus melakukan perubahan-perubahan/reformasi transportasi melalui baik perbaikan dan pengembangan system maupun reformasi kebijakan secara lebih efektif dan konsisten.

m. Reformasi di bidang penyelenggaraan angkutan umum dilakukan dengan perkuatan (revitalisasi) angkutan umum disertai dengan implementasi

kebijakan terhadap manajemen kebutuhan dengan senantiasa bersinergi dengan kebijakan lingkungan.

n. Dengan telah terbitnya PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ, kita semua baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya mulai saat ini harus mempersiapkan diri dalam implementasinya yang mencakup beberapa hal antara lain :
   1) Perencanaan baik yang terkait dengan penganggaran, pengelolaan maupun teknis operasionalnya.
   2) Penyiapan infrastruktur dan sistemnya.
   3) Aspek regulasi melalui peraturan pelaksanaan secara teknis dalam bentuk berupa Peraturan Menteri maupun Perda.
   4) Penyiapan sumber daya manusia dengan kompetensi yang dibutuhkan.
o. Terkait dengan system transport cerdas (*Intelligent Transport System-ITS*) yang merupakan tuntutan akan kebutuhan dalam penyelenggaraan transportasi secara cerdas, efektif dan efisien, kita semua jajaran di semua wilayah perlu membangun dan terus mengembangkan ITS tersebut dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.
p. Terkait dengan penanganan *overloading* melalui pengoperasian jembatan timbang perlu segera diselesaikan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Transportasi Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan dengan menampung ketentuan-ketentuan yang secara teknis operasional dapat memberikan solusi permasalahan yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini.
q. Terkait dengan penegakan hukum dalam penyusunan RPP tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan perlu diatur ketentuan yang konkrit dan tegas tentang batas kewenangan PPNS, penyidik POLRI dan instansi penegak hukum lainnya (Pengadilan dan Kejaksaan).

B. BIDANG KEUANGAN

1. Pelaksanaan Anggaran

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Versi SAI

Dana Anggaran Belanja tahun 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar Rp. 2.095.941.061.000.- yang terdiri dari RM Rp. 2.089.140.491.000,- PNBP Rp. 1.800.570.000,- dan PHLN Rp. 5.000.000.000,- Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.012.865.982.668,- yang terdiri dari RM Rp. 2.012.495.450.152,- dan PNBP Rp. 370.532.516,-. Selanjutnya untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel II.1 :

Tabel II.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2011

Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi
DIPA Reguler			
1	Rincian Sumber Dana		
a	RM	Rp. 2.089.140.491.000,-	Rp. 2.012.495.450.152,-
b	PNBP	Rp. 1.800.570.000,-	Rp. 370.532.516,-
c	PLN	Rp. 5.000.000.000,-	Nihil
2	Rincian Belanja		
A	Belanja Pegawai	Rp. 37.513.267.000,-	Rp. 31.599.500.346,-
B	Belanja Barang	Rp. 349.176.880.000,-	Rp. 315.200.422.742,-
C	Belanja Modal	Rp. 1.704.250.914.000,-	Rp. 1.666.066.059.580,-
D	PHLN	Rp. 5.000.000.000,-	Nihil
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)			
DIPA PNBP TA. 2011			
1	UPT BPLJSKB	Rp. 4.500.000.000,-	Rp. 5.862.785.500,-
2	UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangu	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.152.973.855,-
3	UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	Rp. 70.000.000,-	Rp. 69.276.444,-
4	UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	Rp. 20.000.000,-	Rp. 21.304.231,-

Sumber : Bagian Keuangan Ditjen Hubdat, 2012.

b. Kegiatan yang tidak Terserap T.A 2011

Total Sisa Anggaran yang tidak terserap pada T.A 2011 yaitu Rp. 83.075..078.332,- yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.913.570.000,- yang terdiri dari :
   a) Transito Kantor Pusat Ditjen Hubdat Rp. 762.125.000,-
   b) Sisa uang makan dan lembur Ditjen Hubdat Rp. 3.990.503.564,-

c) Sisa uang makan dan lembur pada Kantor BPLJSKB Bekasi, UPT Gorontalo, UPT Kariangau UPT Kalabahi — Rp. 1.160.941.436,-

2) Belanja Barang sebesar Rp. 33.976.457.258,- yang terdiri dari :

a) Sisa Kontrak Subsidi Perintis SDP — Rp. 14.455.363.104,-

b) Sisa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Kantor Pusat Ditjen Hubdat — Rp. 6.594.898.362,-

c) Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Kantor Pusat Ditjen Hubdat — Rp. 180.988.400,-

d) Subsidi Operasi Bus Perintis — Rp. 635.441.000,-

e) Sisa Belanja Barang Operasional, Non Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan — Rp. 3.577.004.493,-

f) Sisa Belanja Barang Operasional dan Non Operasional pada Satker daerah — Rp. 9.448.348.000,-

3) Belanja Modal sebesar Rp. 38.184.854.420,- yang terdiri dari :

a) Pembebasan Tanah Pel. Penyeb. Hunimoa — Rp. 1.700.000.000,-

b) Kegiatan Pelatihan PPNS Bidang SDP — Rp. 600.000.000,-

c) Sisa Kegiatan Kontrak — Rp. 26.319.438.420,-

d) Pembangunan Kapal 5000 GT Lintas Merak-Bakauheni — Rp. 9.515.416.000,-

e) Dana Non Alokasi — Rp. 50.000.000,-

4) PHLN (IBRD Road Safety Awareness 4843/IND-f) SRIP) — Rp. 5.000.000.000,-

2. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan barang inventaris milik negara, telah dilaksanakan kegiatan Pencatatan Atas Laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Ringkasan Laporan Barang

1) Tanah

Saldo Tanah pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 495.331.713.669,-

2) Peralatan dan Mesin

Saldo BMN berupa Peralatan dan Mesin Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.215.717.952.573,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 989.736.596.850,- mutasi tambah Rp. 776.618.202.948,- dan mutasi kurang Rp. 550.636.847.225,-

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 352.508.302.183,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 219.960.577.049,- dan mutasi tambah Rp. 281.050.552.284,- dan mutasi kurang Rp. 148.502.827.150,-

4) Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 642.823.574.807,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 638.744.205.633,- mutasi tambah Rp. 322.368.222.828,- dan mutasi kurang Rp. 357.891.106.154,-

5) Irigasi

Saldo Irigasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 198.044.762.019,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 120.243.399.969,- mutasi tambah Rp. 208.654.228.500,- dan mutasi kurang Rp. 130.852.866.500,-

6) Jaringan

Saldo Jaringan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.053.702.713,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 1.119.202.713,- mutasi tambah Rp. 30.795.395.742,- dan mutasi kurang Rp. 647.500.000,-

7) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 30.743.321.849,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 34.092.386.443,- mutasi tambah Rp. 1.534.983.406,- dan mutasi kurang Rp. 4.884.048,-.

8) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Saldo aset tetap yang tidak digunakan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.730.429.420,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 1.730.429.420,-.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo aset tetap yang tidak digunakan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 335.630.365.645,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 295.153.579.507,- mutasi tambah Rp. 141.441.329.013,- dan mutasi kurang Rp. 111.828.855.095,-.

b. Informasi Tambahan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal 31 Desember 2011 pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 2.589.383.349.769,-.

2) Persediaan

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp. 1.646.160.935.781,-

3) Informasi Lainnya

a) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan atau dalam proses serah terima hasil pekerjaan, sehingga belum dikatakan sebgai aset definitif yang tercatat dalam SABMN.

Pengakuan aset konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset definitif apabila telah terjadi proses serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor kepada KPA setempat.

Pada pekerjaan T.A 2011 serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga pada laporan BMN T.A 2011 hasil pekerjaan tersebut belum termasuk dalam aset definitif. Baru pada tahun 2011. (setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan), hasil pekerjaan tersebut akan tercatat sebagai aset definitif pada mutasi tambah berupa penyelesaian pembangunan.

b) Persediaan

Persediaan yang dimaksud disini adalah berupa perlengkapan habis pakai yang digunakan dalam rangka menunjang pekerjaan administratif Ditjen Perhubungan Darat. Kebanyakan persediaan akan habis (saldo 0) pada akhir periode pelaporan. Persediaan yang tercatat pada laporan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 1.646.160.935.781,-

c. Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2011 untuk pekerjaan T.A 2010, adalah sebagai berikut :

1) Program LLAJ terdapat 21 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :

a) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Utara
b) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Barat
c) Satker Pengembangan LLAJ Riau
d) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Selatan
e) Satker Pengembangan LLAJ Bengkulu
f) Satker Pengembangan LLAJ Banten
g) Satker Pengawasan Operasional dan Keperintisan Angkutan LLAJ
h) Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
i) Satker Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat
j) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat
k) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah
l) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur
m) Satker Pengembangan LLAJ Bali
n) Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Barat
o) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah
p) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan
q) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah
r) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara
s) Satker Pengembangan LLAJ Papua
t) Satker Pengembangan LLAJ Papua Barat
u) Satkler Pengembangan LLAJ Maluku Utara

2) Program LLASDP terdapat 19 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :
   a) Satker Pengembangan LLASDP Nanggroe Aceh Darussalam
   b) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara
   c) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat
   d) Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu
   e) Satker Pengembangan LLASDP Lampung
   f) Satker Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi SDP
   g) Satker Perencanaan Teknik dan Pengawasan Transportasi SDP
   h) Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP
   i) Satker Pengembangan Transportasi SDP
   j) Satker Penunjang Keperintisan
   k) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Barat
   l) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Tengah
   m) Satker Pengembangan LLASDP Daerah Istimewa Yogyakarta
   n) Satker Pengembangan LLASDP Bali
   o) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Barat
   p) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan
   q) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur
   r) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan
   s) Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau

3. Verifikasi dan Akuntansi

a. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, Usulan calon pengelola anggaran dan proses tindak lanjut LHA yang dilakukan oleh instansi/ Badan dPemeriksa/ Pengawas Keuangan Negara, secara rinci meliputi kegiatan:
   1) Menyiapkan Rencana Jaringan Kerja (*Network Planning*), Bagan Balok (*Barchart*) dan Kurva S, Sub. Sektor Transportasi Darat;
   2) Meneliti dan mengevaluasi Usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Sub. Sektor Transportasi Darat meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran;

3) Meneliti dan memverifikasi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit Badan/Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi Kerugian Negara (TGR);
4) Meneliti/memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggahan Banding maupun Surat Pengaduan dari Peserta Lelang/LSM.

b. Pembahasan Usulan Calon Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2013
   1) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (SATKER) meliputi:
      a) Program LLAJ 35 Satuan Kerja;
      b) Program LLASDP 34 Satuan Kerja.
   2) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima/pengeluaran UPT meliputi:
      a) Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
      b) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
         i. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
         ii. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
         iii. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo;
         iv. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;

c. Laporan Hasil Pemeriksaan
   1) ITJEN :

      Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 106 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 131.012.993,91

      Dari 106 temuan tersebut, telah tuntas sebanyak 17 temuan dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 65.330.368,91 sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 14 temuan dengan rincian sebagai berikut :
      a) Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat yaitu kebijakan akuntansi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
      b) Satker Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan yaitu terdapat potensi penggunaan Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor di Surabaya kurang optimal

Laporan Hasil Audit (LHA) yang belum ditindaklanjuti sebanyak 75 temuan dan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 65.682.625,-, hal ini disebabkan belum adanya tanggapan dari satker yang bersangkutan.

2) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI

Terdapat sisa LHA BPK-RI pada Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Transportasi Jalan sebanyak 3 (tiga) temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 203.240.085,11

3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan tahun 2011 terdapat 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan BPKP pada Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan nilai Rp. 731.351.466,53.

d. Surat Sanggahan Banding dari Peserta Lelang/LSM Tahun Anggaran 2011, sebanyak 2 (dua) surat, meliputi :
   1) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah;
   2) Satker Pengembangan LLAJ Maluku.

C. BIDANG HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

1. Bidang Peraturan Perundang-undangan

Pada Tahun 2011 untuk Peraturan Perundang-Undangan di Sub Sektor Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, meliputi :

a. Peraturan Pemerintah :
   1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
   2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Peraturan Menteri Perhubungan:
   1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :
      a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.218 Tahun 2011Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H);

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota DKI Jakarta;

d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011;

2) Bidang LLASDP :

1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi;

2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;

3) Organisasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai danau dan Penyeberangan.

c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :

1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :

a) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 926 / AJ. 409 / DRJD / 2011 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Petunjuk dan Peringatan Pada *Flyover* Lippo Karawaci Pada Jalan Tol Jakarta – Tangerang;

b) Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SE.02/KP.108/DRJD/2011 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

c) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 1298 / 101 / DRJD / 2011 tentang Penetapan Lokasi Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Terantang Manuk Di Kabupaten Pelawan Propinsi Riau;

d) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor. SK.1350 / UM.004 / DRJD / 2011 tentang Penggunaan Logo ISOQAR Pada Surat Untuk Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

e) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor. SK. 2105 / KP.801 / DRJD / 2011 Forum Internasionalisasi Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (FISKI).

2) Bidang LLASDP :

a) Peraturan Dirjen No. AP.005 / 6 / 14 / DRJD / 2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Penyeberangan.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan (berkelanjutan) :

a. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- RPP tentang Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
- RPP tentang Kendaraan;
- RPP tentang Jaringan LLAJ;
- RPP tentang Dampak Lingkungan LLAJ;
- RPP tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ;
- RPP tentang Angkutan;
- RPP tentang Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
- RPP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- RPP tentang Diklat Pengemudi;
- RPP tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ.

2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

- RPM tentang Penyelenggaran Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- RPM tentang Terminal;
- RPM tentang Standar Pelayanan Minimal;

- RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
- RPM tentang Angkutan Massal;
- RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- RPM tentang Tarif Penumpang.

3) Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

- RPD tentang Angkatan Taxi Bandara;
- RPD tentang Angkutan Barang Berbahaya;
- RPD tentang Kendaraan Listrik di Jalan;
- RPD tentang Wahana Tata Nugraha.

b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sedangkan untuk penyusunan Peraturan pemerintah sudah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri dan peraturan Dirjen antara lain :

➢ Rancangan Peraturan Menteri :

- RPM Tentang Alur Pelayaran dan Lalu lintas Sungai dan Danau;
- RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- RPM tentang Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan;
- RPM tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Untuk Angkutan Penyeberangan.
- RPM tentang Tarif Angkutan Penyeberangan

Dengan telah selesainya Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Revisi UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,maka saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang LLAJ direncanakan akan disusun 12 Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas untuk posisi masing-masing RPP antara lain :

Tabel II.2. Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

No.	JUDUL RPP	POSISI SAAT INI	KETERANGAN
1.	RPP Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Telah disahkan PP No.37 Tahun 2011	Pada Tanggal 25 Juli 2011
2.	RPP Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Telah disahkan PP 32/2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa,Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Pada Tanggal 21 Juni 2011
3.	RPP Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor dijalan	Pembahasan final harmonisasi di Kementerian Hukum & HAM.	Finalisasi
4.	RPP Kendaraan	Pembahasan harmonisasi	Kementerian Hukum & HAM
5.	RPP Jaringan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ) Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan Perindustrian.	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. **Dana preservasi jalan ditampung dalam RPP Jaringan LLAJ, menunggu masukan final dari Kementerian PU.**
6.	RPP Dampak Lingkungan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ) Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan Perindustrian.	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian Perhubungan.
7.	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ	idem	idem
8.	RPP Angkutan	idem	idem
9.	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ	idem	idem

No.	JUDUL RPP	POSISI SAAT INI	KETERANGAN
10.	RPP Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ)	Dipending, tentang perlu tidaknya RPP ini menunggu pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekneg.
11.	RPP Diklat Pengemudi	Kepolisian.	Menunggu Draft dari Kepolisian sebagai penanggung jawab materi RPP.
12.	RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ	Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi.	Menunggu Draft dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi sebagai penanggung jawab materi RPP

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2012.

Pembahasan RPP LLAJ antar Kementerian

Pembahasan RPP LLAJ antar 5 Instansi Pembina LLAJ

Untuk penelaahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi Darat, Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan verifikasi PERDA dan Raperda yang berkaitan dengan Ditjen Perhubungan Darat dari seluruh Indonesia dimana kegiatannya berkelanjutan.

2. Pelaksanaan dokumentasi dan bantuan hukum.

Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pertimbangan hukum, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut :

a. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain :

1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang LLAJ dan LLASDP dilaksanakan di 3 (tiga) kota yaitu Kota Banjarmasin, Bogor dan Denpasar, yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait lainnya. Adapun penyuluhan peraturan perundang-udangan yang dilakukan antara lain :

- Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayarandan;
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim.

2) Pemberian bantuan hukum dalam perkara :

a) Perkara Perdata No.1675/Pid.B/2006/PN. Sby (Kasus Tanah di Jalan Basuki Ramat No. 78 Surabaya);

b) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak;

c) Perkara Perdata No. 26/Pdt.6/2001/PN.AB (kasus pelabuhan penyeberangan Hunimua Ambon);

d) Perkara Perdata No. 11/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara perdata dalam kasus Tabung Gas BBG Steve Sugita);

e) Perkara Perdata No. 27/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara Airbag Suzuki Grand Vitara);

3) Pemberian pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum diberikan dalam rangka permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas surat-surat sanggahan, pengaduan masyarakat, ataupun permasalahan teknis lainnya yang memerlukan tanggapan dan jawaban yang memerlukan dukungan pertimbangan dan kajian dari sisi legal atau peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan (berkelanjutan)

Pemberian bantuan hukum :

1) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak, Pemerintah menunggu proses penyelesaiannya antara PT. ASDP dengan PT. Infiniti;
2) Perkara Perdata No. 11/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara perdata dalam kasus Steve Sugita), kelanjutan proses Kasasi di Makamah Agung masih berjalan dan menunggu putusan Kasasi.

Kegiatan pemberian pertimbangan hukum yang telah dilakukan selama tahun 2011 antara lain dalam pembahasan :

1) Pendampingan saksi dalam tindak Pidana Korupsi APBD Kab Talaud T.A. 2006 s/d 2010.
2) Pendampingan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor TA 2010 pada Dinas Perhubungan kota Batam.
3) Pendampingan panggilan Kejaksaan Tinggi DKI terkait dengan perencanaan pembangunan Shelter Feeder Lebak Bulus – Muncul T.A. 2010.
4) Pendampingan dalam pemanggilan Polda Banten terkait dengan terbakarnya KMP Laut Teduh II di Perairan Selat Sunda.
5) Penanganan terhadap proyek pengadaan 100 unit bus tempel BBG dengan PT. Insan Gaya Perwira.
6) Penanganan terhadap kasus permohonan ganti rugi tanah oleh Sdr. John Numberi di Klademak Sorong – Papua Barat

Hambatan yang dialami oleh bagian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum maupun penyusunan peraturan masih perlu dukungan peningkatan kualitas SDM yang dapat melakukan penanganan kasus-kasus yang ada dilingkungan Ditjen Hubdat, serta dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan peraturan perundangan di mana memerlukan kecermatan, ketelitian serta kemampuan dalam penguasaan penerapan peraturan perundangan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu perlunya peningkatan potensi SDM melalui Diklat/kursus di bidang bantuan hukum, bidang penyusunan maupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang Hukum secara berkelanjutan.

c. Data kesepakatan bersama di bidang transportasi darat :

Data Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011:

Tabel II.3. Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
1	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bogor	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bogor	Bogor, 3 Oktober 2005	5 Tahun
2	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Malang Raya	Dephub dan Pemkab Malang, Pemkot Malang dan Pemkot Batu	Jakarta, 24 Maret 2006	5 Tahun
3	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bandung	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bandung	Bandung, 7 Juli2005	5 Tahun
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Yogyakarta	Ditjen Hubdat dan Pemkot Yogyakarta	Yogyakarta, 13 Desember 2005	36 Bulan
5	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Pekanbaru	Dephub dan Pemkot Pekanbaru	Pekanbaru, 9 Maret 2007	5 Tahun

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
6	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pendanaan Transportasi Perkotaan di Kota Batam, Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan	Ditjen Hubdat dan Pemkot Batam	Jakarta, 27 Agustus 2004	5 Tahun
7	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surakarta	Dephub dan Pemkot Surakarta	Surakarta, 11 Desember 2006	48 Bulan
8	Pengembangan Transportasi Perkotaan di Propinsi DI Yogyakarta	Dephub, Pemprop DIY dan Universitas Gajah Mada	Yogyakarta, 21 Agustus 2007	5 Tahun
9	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Makasar	Dephub dan Pemkot Makasar	Makasar, 14 Agustus 2007	5 Tahun
10	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Pontianak	Dephub dan Pemkot Pontianak	Jakarta, 12 Februari 2008	5 Tahun
11	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surabaya	Dephub dan Pemkot Surabaya	Surabaya, 7 Juli 2006	5 Tahun
12	Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus	Ditjen Hubdat dan Kepolisian Negara RI	Jakarta, 26 Juli 2007	-
13	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Semarang	Dephub dan Pemkot Semarang	Jakarta, 31 Juli 2008	5 tahun
14	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Gorontalo	Dephub dan Pemkot Gorontalo	Jakarta, 23 Juni 2009	5 tahun
15	Perencanaan, Pembangunan dan	Dephub dan	Jakarta, 23 Juni	5 tahun

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
	Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Padang	Pemkot Padang	2009	
16	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Manado	Dephub dan Pemkot Manado	Jakarta, 1 Juli 2009	5 tahun
17	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Palembang	Dephub dan Pemkot Palembang	Jakarta, 4 Desember 2009	5 tahun
18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di Kawasan Transmigrasi	Kemeterian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jakarta, 22 September 2010	
19	Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Bdung, Gianyar dan Tabanan (Serbagita) Propinsi Bali	Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali	Denpasar 6 Desember 2010	5 Tahun
20	Penyusunan Kebijakan dan Standar Interkoneksi dan Interoperabilitas Uang Elektronik di Sektor Transportasi	BI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta 14 Nopember 2011	3 Tahun
21	Pelaksanaan Pengoperasian Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah (Bandung) – Bandara Soekarno Hatta (Tanggerang)	Direktorat Jenderal Perhungan Darat dengan PT. Primajasa Perdanaraya Utama	Jakarta 15 Juni 2011	
22	Pertukaran Data Secara Online dalam sistem analisis penumpang pada sarana Transportasi	Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Perhubungan	Jakarta 20 Desember 2011	5 Tahun

3. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri merupakan bidang tugas Sub Bagian Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang telah dilaksanakan tahun 2011 yang berhubungan dengan kegiatan Peliputan dan Dokumentasi antara lain kegiatan Dokmentasi, jumpa pers/siaran pers, pameran/visualisasi, langganan koran untuk keperluan kliping dan penerbitan news letter infoHUBDAT.

Beberapa kegiatan kehumasan yang telah dilakukan selama tahun 2011 yaitu antara lain:

Gambar 2.1. Peresmian integrasi Tiket BRT dan KA di Solo

Gambar 2.2. Sidak Dirjen Perhubungan Darat ke Pelabuhan Merak

Gambar 2.3. Jumpa Pers Menteri Perhubungan tentang Isu Aktual pada Maret 2011

Gambar 2.4. Penyerahan ISO 9001 2008

Gambar 2.5. Press Background Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020

Gambar 2.6. Pencanangan Dekade Aksi Keselamatan oleh Wakil Presiden

Sesuai dengan Tupoksi, kegiatan Kerjasama Luar Negeri antara lain mengikuti rapat koordinasi penyiapan materi dalam rangka pertemuan kerjasama luar negeri, memberikan saran dan usulan delegasi yang akan menghadiri pertemuan, menghimpun dan menelaah hasil kegiatan kerjasama luar negeri untuk keperluan tindaklanjut hasil pertemuan, melakukan koordinasi dengan unit kerja maupun instansi terkait dalam rangka menyusun materi pertemuan atau tanggapan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat termasuk perjanjian-perjanjian bilateral, regional maupun multilateral, serta kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan kerjasama luar negeri.

Program pertemuan dalam rangka kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan sub sektor transportasi darat selama tahun 2011 meliputi pertemuan bilateral, sub regional, regional dan multilateral. Kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut ada yang dihadiri oleh wakil Ditjen Perhubungan Darat dan ada pula yang tidak dihadiri. Kehadiran wakil sub sektor perhubungan darat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta urgensinya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang berlanjut dan terprogram setiap tahunnya dan juga kegiatan yang sifatnya insidentil seperti workshop/ seminar/pelatihan yang merupakan hasil dari proyek kerjasama regional ataupun multilateral dan partnership lainnya.

Beberapa kegiatan bidang KSLN telah dilaksanakan/dihadiri oleh wakil Ditjen Hubdat pada tahun 2011, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu :

Tabel II.4. Matriks Rekapitulasi Kegiatan KSLN Ditjen Hubdat Tahun 2011

NO	KEGIATAN	TEMPAT/WAKTU	WAKIL HUBDAT
1	Pertemuan BIMP EAGA 2011 Strategic Planning Meeting	Kota Kinabalu, Malaysia. 12-14 Januari 2011	Dit. LLAJ
2	*15th JASIC Asia Government/Industry Meeting*	Tokyo, Jepang. 19-20 Januari 2011	1. Dit. LLAJ 2. BPLJSKB
3	Pertemuan *IMT-GT Post Summit Planning Meeting*	Koh Samui Surat Thani, Thailand. 20-21 Januari 2011	Dit. LLAJ
4	Workshop on "Catalyzing Sustainable Urban Transport and Development in Asia"	Manila, Filipina. 14-15 Februari 2011	Dit. BSTP
5	92nd Meeting of the REAA Governing Council and Associated Programmes	Taipe, Taiwan 5-7 April 2011	Dit. KTD
6	13th Meeting of ACCSQ Automotive Product Working Group (APWG)	Ha Noi, Viet Nam 17-19 Februari 2011	BPLJSKB
7	*Global Conference on Urban Transport*	Kuala Lumpur, Malaysia 11-12 april 2011	Dit. BSTP
8	*Nationally Appropriate Mitigations Actions* (NAMAs) Transportasi	Seoul,Korea Selatan 12-13 April 2011	Dit. BSTP
9	*The 19th ASEAN Land Transport Working Group* Meeting dan The 2nd MSRSSWG Meeting	Phnom Penh, Kamboja. 3-6 Mei 2011	1. Dit. KTD 2. Dit. LLAJ 3. Setditjen
10	*Pertemuan The Nineteenth Session of* The Commission on Sustainable Development (CSD-19)	New York, USA 2-13 Mei 2011	1. Setditjen 2. Dit. BSTP
11	Meninjau Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan	Shenzhen, RRC 21-23 April 2011	Dit. LLAJ
12	The 21st ASEAN Transport Facilitation Working Group	Bohol, Filipina 25-29 April 2011	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen 3. Setditjen

13	*The 4th IMT-GT Working Group Meeting on* Infrastructure and Transportation	di Bangkok, Thailand 9-10 Mei 2011	1. Dit. LLASDP 2. Setditjen 3. Dit. LLAJ
14	Sidang Komisi ke-67 UNESCAP di Bangkok, Thailand	Bangkok, Thailand 23-25 Mei 2011.	Setditjen
15	31st ASEAN Senior Transport Officials Meeting	Siem Reap, Cambodia. 24-26 Mei 2011	Dit. LLAJ
16	ITS Asia-Pacific Board of Director Meeting	Kaohsiung, Taiwan 6-11 Juni 2011	1. Dit. BSTP 2. Dit. BSTP 3. Dit. BSTP
17	34th APEC Transportation Working Group Meeting	Brisbane, Australia 12-16 Juni 2011	1. Dit. BSTP 2. Setditjen 3. Dit. KTD 4. Dit. LLAJ 5. Setditjen
18	Pertemuan Teknis Bilateral mengenai Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas (PLB) RI-Timor Leste	Dili, Timor Leste 14-15 juli 2011	Dit. LLAJ
19	The 9th ASEAN-Japan STOM Leader Conference	Takamatsu City, Jepang. 13-19 September 2011	Dit. BSTP
20	The 8th BIMP-EAGA TIICTD Cluster Meeting	Puerto Princesa City, Palawan, Philippina 21-23 Juni 2011	1. Dit. LLASDP 2. Dit. LLAJ 3. Setditjen
21	ITSAP PRG Meeting ke-9	Mebourne, Australia 11-14 Juni 2011	1. Dirjen 2. Dir. KTD 3. Dit. LLAJ 4. Dit. KTD 5. Setditjen
22	Kunjungan Wakil Menteri Perhubungan RI ke Forum Asia Pasifik Bayern	Numberg, Jerman, 20-21 Juli 2011	Dit. LLAJ
23	*The 7th APEC Trasportation Ministerial Meeting* dan Joint Transport and Energy Ministerial Meeting	San Fransisco, Amerika Serikat 12-17 September 2011	1. Dir. KTD 2. Dit. KTD 3. Dit. BSTP
24	*APEC Workshop on Low Emissions Development* Strategies	San Fransisco, Amerika Serikat 11-12 September 2011	Dir. BSTP

25	2nd Asia –Europe Meeting (ASEM) Transport Ministers Meeting (TMM)	Chengdu, China 24-26 Oktober 2011	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen
26	ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)	Singapura, 26-29 September 2011	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen
27	the Working Group on the Asian Highway dan Expert Group on Progress on Road safety Improvement	Bangkok, Thailand 27-29 September 2011	1. Dit. LLAJ 2. Dit. KTD 3. Dit. KTD 4. Setditjen
28	ASEAN MTWG Meeting ke-22	Penang Malaysia 5-7 Oktober 2011	Dit. LLASDP
29	*2011 Australasian Road Safety Conference*	Australia 6-9 November 2011	Dit. KTD
30	*Pertemuan ASEAN Eropa Meeting (ASEM) Conference on the Harmonization of Biofuels Standards and Application to Vehicle Technologies*	Manila Philippines 10-11 November 2011	1. Dit.LLAJ 2. BPLJSKB 3. Setditjen
31	*Human Resources Development Workshop for Road* Traffic Safety in ASEAN Countries	Seoul Korea Selatan 21-25 November 2011	1.Setditjen 2. Dit. KTD 3. Dit.KTD 4. Setditjen
32	Pertemuan *The 6th Regional Environmentally* Sustainable Transport (EST) Forum in Asia	New Delhi, India 4-6 Desember 2011	1. Dit. BSTP 2. Dit.LLAJ 3. Dit.BSTP 4. Setditjen
33	*Global Road Safety Partnership (GRSP)* Asia Road Safety Seminar	Bangkok, Thailand 6-8 Desember 2011	1. Dit. KTD 2. Dit.KTD 3. Dit.KTD
34	*32nd ASEAN STOM / 17th ATM*	Phnom Penh, Kamboja. 12-16 Desember 2011	Dit. LLAJ

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2012.

Kegiatan KSLN tahun 2011 yang tidak dapat dihadiri oleh wakil Ditjen Hubdat :

1. Pertemuan LTWG ke 20 di Kamboja 2-4 Agutus 2011;
2. Pertemuan COMCEC di Istambul 17-20 Oktober 2011;
3. Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke 17 di Durban Afrika Selatan 28 Nopember 9 Desember 2011;

4. Forum Harmonisasi Standar dan Regulasi Otomotif Dunia (UN WP-29) di Geneva bulan Maret, Juni dan Oktober 2011;
5. Asia Expert Meeting on Otomotif di Malaysia, Philipina;
6. The 2nd ASEAN Republic Of Korea (ROK) Transport Cooperation Forum tanggal 11 – 12 Agustus 2011 di Seoul, Korea;
7. The Expert Meeting on Steering (R12 & R79) organized by Thailand's Department of Land Transport (DLT) held in Bangkok, Thailand, 2 March 2011;
8. The Expert Meeting on Electromagnetic Compatibility (UN/ECE R10) organized by China Automotive Technology & Research Center (CATARC) in Beijing, China, 28 June 2011;
9. The expert Meeting on Audible Warning Devices (UN/ECE R28) and Pneumatic Tyres (Moped, Motorcycle) (UN/ ECE R75) organized by Department of Transport & Communications (DOTC) and Land Transportation (LTO) held on 22 July 2011 in Manila, Philippina;
10. The Expert Meeting on Headlamps (with an Asymmetrical Passing Beam (UN/ ECE 112)) organized by the Vietnam Register (VR) held on 25 August 2011 in Hanoi, Vietnam;
11. Asia Expert Meeting (UN/ ECE R94 on Protection of the Occupants in the Event of frontal Collision) and Protection of the Occupants in the Event of a Lateral Collision (UN ECE R 95) organized by Road Transport Department (JPT) held in Malacca, Malaysia 6&7 October 2011.

Data Perjanjian, MoU, Arrangement, Delaration yang terkait dengan sub sektor transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2011:

Tabel II.5. Perjanjian, MoU, Arrangement, Delaration yang terkait dengan subsektor transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2011.

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Keterangan
1	Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN Countries	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur, Malaysia 9 Juli 1985	-	Ratifikasi
2	Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for	Negara Anggota ASEAN	Singapura, 10 September 1998	-	Ratifikasi

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Keterangan
	Goods Vehicles and Public Service Vehicle Issued by ASEAN Member Countries				
3	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 16 Desember 1998	-	Ratifikasi
4	Protocol 3 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
5	Protocol 4 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
6	Protocol 9 AFAFGIT, Dangerous Goods	Negara Anggota ASEAN	Jakarta, Indonesia 20 September 2002	-	Ratifikasi
7	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 7 November 2005	-	Proses Ratifikasi
8	ASEAN Tourism Agreement	Negara Anggota ASEAN	Phnompenh, Cambodia 4 November 2002	-	Ratifikasi
9	MoU Between The Government of The Member of Association of South –East Asian Nations and The Government of China on Transport Cooperation	Negara Anggota ASEAN dan China	Vientien, Lao PDR, 27 November 2004	-	-
10	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 26 Juli 2005	-	Ratifikasi
11	Intergovernmental Agreement on Asian Highway Network (UN-ESCAP)	Negara Anggota ESCAP	Shanghai, China 4 Juli 2005	-	Ratifikasi
12	Busan Declaration on Transport Development in Asia and the Pacific	Negara Anggota ESCAP	Busan,Korea, 11 November 2006	-	-
13	Protocol 1 AFAFGIT, Designation of Transit Transport Roads and Facilities	Negara Anggota ASEAN	Bangkok, Thailand 8 February 2007	-	Ratifikasi
14	Memorandum of Understanding Between the Governments of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philippines on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches	Negara Anggota BIMP-EAGA	Singapore, 2 November 2007	-	-
15	ASEAN Framework Agreement on Interstate Transit Transport	Negara Anggota ASEAN	2008	-	-
16	Memorandum of Understanding Between The Government of Brunei	Negara Anggota BIMP-EAGA	Manado, Indonesia, 25 Juni 2009	-	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Keterangan
	Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philipines on Transit and Inter-state Transport of Goods				
17	Arrangement Between The Minister of Finance of The Government of Indonesia and The Minister of Economy, Industry and Employment of The Government of France Relating To The Bandung Integrated Transport Nerwork Planning Study	Indonesia-Perancis	Jakarta, 15 Juli 2009	31 -12 -2011	
18	Implementation Arrangement (on Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area)	Ditjen Perhubungan Darat dan SNCF Perancis	Jakarta, Nopember 2009	-	-
19	Moscow Delaration (on Global Road Safety)	UN	Moscow, Rep. Federasi Rusia 20 November 2009	-	-
20	Bangkok Declaration on Transport Development in Asia	Negara Anggota ESCAP	Bangkok, Thailand 18 Desember 2009	-	-
21	Memorandum Of Cooperation Between The Ministrry of Transportasi of The Ministry of Land, Infrastructure and Tourism of Japan in The Transport Sector	Indonesia - Jepang	Bali, 3 Desember 2010		
22	Arrangement Between The Ministry Of Transportation of The Republic Of Indonesia and The Departement of Infratructure and Transport Of Australia on The Indonesia Transport Safety Assistance Package	Indonesia – Australia	Jakarta, 15 Desember 2010		

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2012.

D. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam pelaksanaan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum telah dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui keikutsertaan pegawai pada diklat-diklat teknis.

Pengembangan SDM melalui diklat-diklat teknis guna meningkatkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan unit kerja dimana pegawai ditempatkan tersebut diatas, tidak hanya yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi juga yang dilaksanakan oleh institusi

lainnya baik lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan substansi perhubungan darat.

1. Data Pegawai Ditjen Perhubungan Darat

Pegawai Ditjen Perhubungan Darat posisi tahun 2011 diklasifikasikan menurut unit kerja, golongan, pendidikan umum, jenis kelamin masing-masing sebanyak 669 pegawai, dimana yang sudah mengikuti diklat penjenjangan structural sebanyak 126 pegawai dan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 94 pegawai. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.6. Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Setditjen	153	140	137	140	140	139
2.	Direktorat LLAJ	105	99	98	105	129	141
3.	Direktorat LLASDP	94	85	78	78	95	95
4.	Direktorat BSTP	64	62	63	66	83	89
5.	Direktorat KTD	55	56	57	59	57	64
6.	UPT. BPLJSKB Bekasi	53	49	43	44	56	63
7.	UPT. PelabuhanPenyeberangan	63	64	57	63	56	53
8.	DAMRI	30	18	15	14	11	9
9.	Dishub/Tugas Perbantuan Daerah (D-III ALL/LLASDP)	81	62	29	6	1	0
Jumlah		**987**	**698**	**635**	**577**	**575**	**669**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Tabel II.7. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Golongan IV	52	48	53	49	50	50
2.	Golongan III	488	454	404	399	419	441
3.	Golongan II	157	132	119	126	158	177
4.	Golongan I	1	1	1	1	1	1
Jumlah		**698**	**634**	**577**	**575**	**628**	**669**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Tabel II.8. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Doktoral/S3	-	1	1	1	1	1
2.	PascaSarjana/S2	62	74	83	85	95	112
3.	Spesialis	3	3	3	4	4	3
4.	Sarjana/S1	171	176	154	175	197	215
5.	Diploma IV	25	44	33	21	28	37
6.	Diploma III/SarjanaMuda	146	73	66	70	105	121
7.	Diploma I/II	12	11	8	8	17	21
8.	SMU	258	237	214	196	175	152
9.	SLTP	14	9	9	9	4	5
10.	SD	7	7	6	6	2	2
Jumlah		**698**	**635**	**577**	**575**	**628**	**669**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Tabel II.9. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Perempuan	153	131	125	122	156	177
2.	Pria	545	504	452	453	472	492
Jumlah		**698**	**635**	**577**	**575**	**628**	**669**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Tabel II.10. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Diklat Penjenjangan Struktural	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Lemhanas	2	2	1	1	-	0
2.	Sepati/Dikpim I	3	1	2	2	1	1
3.	Sespa/Spamen/Dikpim II	12	15	17	19	16	14
4.	Sepadya/Spama/Dikpim III	82	49	48	52	49	44
5.	Sepala/Adum/Dikpim IV	81	47	62	65	60	63
Jumlah		**180**	**144**	**130**	**139**	**126**	**122**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Tabel II.11. Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Eselonering	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Eselon I	1	1	1	1	1	1
2.	Eselon II	5	5	5	5	5	5
3.	Eselon III	24	24	24	24	24	24
4.	Eselon IV	60	60	60	60	60	60
5.	Eselon V	4	4	4	4	4	4
Jumlah		**94**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2012

Dari data diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perubahan komposisi formasi pegawai relatif tidak banyak perubahan, terutama dari segi jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan mulai berimbangnya jumlah mutasi pegawai (pensiun, pindah unit kerja, termasuk tugas perbantuan daerah) dengan pengadaan pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Posisi Pelaksanaan Tugas

a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi

1) Realisasi Kepangkatan PNS

Dalam periode April sampai dengan Oktober 2011 terdapat formasi kenaikan pangkat (KP) sebanyak 59 pegawai, dengan rincian :

a). Kenaikan Pangkat Reguler : 22 pegawai

b). Kenaikan Pangkat Pilihan : 27 pegawai

c). Kenaikan Pangkat PenyesuaianIjazah : 10 pegawai

2) Pensiun Pegawai

Dalam tahun anggaran 2011, jumlah pension pegawai sebanyak 20 orang, dengan rincian :

a). Golongan IV : 1 pegawai

b). Golongan III : 16 pegawai

c). Golongan II : 3 pegawai

Sedangkan pegawai yang meninggal dunia ada 4 orang pegawai pada tahun anggaran 2011.

3) Pemberian Tanda Penghargaan

Dalam upaya pemberian penghargaan kepad pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun anggaran 2011, telah diberikan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada 28 pegawai dengan rincian :

a). Satyalancana Wira Karya : - pegawai
b). Satyalancana Karya Satya 30 tahun : 18 pegawai
c). Satyalancana Karya Satya 20 tahun : 9 pegawai
d). Satyalancana Karya Satya 10 tahun : 1 pegawai

Tanda penghargaan dimaksud merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas pengabdian PNS dalam melaksanakan tugasnya.

4) Diklat Teknis Fungsional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2010 dilakukan penyiapan daftar pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 158 pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik di lingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

a). Diklat Kepemimpinan : 10 pegawai
b). Diklat Luar Negeri : 3 pegawai
c). Diklat Dalam Negeri : 145 pegawai

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2011 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam pembinaan kepegawaian dan tata kelola organisasi yang baik, yang meliputi :

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.
2) Penyelenggaraan pengadaan CPNS Formasi Tahun 2011.
3) Penyertaan Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional dan *Short Courses* baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun diluar Kementerian Perhubungan.
4) Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
5) Peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

6) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian.
7) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Bidang Perhubungan Darat.
8) Penataan Nomenklatur Jabatan Teknis dan Penyempurnaan Uraian Jabatan /Pekerjaan Direktorat Jenderal.
9) Penyusunan Kajian Penyiapan Sarana dan Prasarana UPT Perhubungan Darat di Daerah.

b. Bidang Ketatausahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2010 di bidang ketatausahaan meliputi :

1) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
2) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai;
3) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai;
4) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai;
5) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai;
6) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
7) Penataan dan pemeliharaan arsip;
8) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung
9) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA);
10) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
11) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
12) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;
13) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Gambar 2.7. Sosialisasi Ketatausahaan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

14) Sosialisasi ketatausahaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.

c. Bidang Rumah Tangga

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2011 di bidang kerumah tanggaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, meliputi :

1) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi ; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;
2) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
3) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
4) Pengadaan pakaian kerja satpam;
5) Pengadaan obat-obatan dan honororium dokter dan perawat pada poliklinik;
6) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, meja rapat, LCD projektor, AC split, alat penghancur kertas, komputer, mesi fax, telepon, mesin ketik elektronik, mesin ketik manual, printer, exsternal hardisk, lemari brankas, locker, area parkir sepeda, lemari penyimpanan arsip, dan Mobiler;

7) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system;
8) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4;
9) Perbaikan barang inventaris kantor;
10) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat;
11) Pemeliharaan Gedung Kantor Ditjen Hubdat;
12) Pemeliharaan Kamar Mandi;
13) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6;
14) Penyediaan jasa outsourcing tenaga keamanan;
15) Pelayanan urusan dalam lainnya;

B A B III
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2011

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan berorientasi pada tugas-tugas pokok dibidang pemerintahan yang meliputi pekerjaan non fisik (baik pekerjaan rutin maupun yang bersifat peraturan perundang-undangan/kebijakan), baik yang didanai oleh DIPA. Program kerja pada bidang pemerintahan disusun sesuai dengan bagian dan sub direktorat masing-masing yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

a. Bagian Perencanaan

Bagian perencanaan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan Laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2) penyiapan bahan pemaduan jaringan transportasi darat;
3) penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat;
4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

5) penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Program kegiatan pada Bagian Perencanaan dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Rencana dan Program

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen Hubdat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat, antara lain :

a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
b) Pembinaan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
c) Penyusunan standar, petunjuk/kebijakan teknis, pedoman dan kajian teknis di bidang Perhubungan Darat.
d) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.
e) Penyusunan Revisi RPJM dan RPJP.
f) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).
g) Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
h) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011.

2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja, meliputi :

a) Integritas perencanaan, pelaksanaan rencana dan evaluasi.
b) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja.
c) Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri.
d) Penyusunan LAKIP Ditjen Perhubungan Darat.

3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan

Pada Sub bagian ini dijadwalkan kegiatan yang bertitik tolak pada penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan Ditjen Hubdat, meliputi :

a) Pengembangan dan konsolidasi Sistem Informasi melalui pengembangan dan pembangunan sistem.
b) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat.
c) Penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka.
d) Penyusunan Pengembangan Profil Perhubungan Darat.
e) Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan LAN dan Website.
f) Penyiapan bahan Draft RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
g) Pemutakhiran data dan informasi Transportasi Darat.

Disamping kegiatan yang telah dijadwalkan pada masing-masing sub bagian, terdapat juga kegiatan yang melibatkan ketiga sub bagian tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011.

b. Bagian Keuangan

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010, Bagian Keuangan memiliki tugas pokok yaitu Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2) pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3) pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011, bagian keuangan telah menjadwalkan beberapa substansi kegiatan yang sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran

Pada Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Sub Sektor Perhubungan Darat, yang dimulai dari penyiapan bahan penyusunan anggaran bersama Bagian Perencanaan, penyiapan bahan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan/ Indeks Harga (HSPK) bersama Biro Keuangan, monitoring dan pembinaan Laporan Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1), yang secara rinci meliputi :

a) Monitoring dan melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Anggaran pada Satker/UPT serta PNBP di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat;
b) Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan melaksanakan Rekonsiliasi/ Konsolidasi Laporan Keuangan dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perhubungan setiap triwulan, semester dan tahunan;
c) Melaksanakan Proses Revisi DIPA dan POK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.

2) Sub Bagian Perbendaharaan dan BMN

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Urusan Tata Keuangan Ditjen Hubdat dan Administrasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi :

a) Melakukan pencatatan pembukuan meliputi semua penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin serta menyusun laporan bulanan Keuangan Rutin Ditjen Hubdat.
b) Melaksanakan administrasi pengelolaan barang BMN dilingkungan Ditjen Hubdat.
c) Memproses penghapusan barang-barang Inventaris dilingkungan kantor pusat Ditjen Hubdat.
d) Menyiapkan administarsi Serah Terima Hasil Pekerjaan.

e) Memproses penyertaan modal Negara ke BUMN di lingkungan Ditjen Hubdat.

3) Sub Bagian Verifikasi Anggaran

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Realisasi pelaksanaan Anggaran; Usulan calon pengelola Anggaran (KPA dan Bendahara); dan juga Monitoring tindak lanjut LHP, TP/TGR yang dilakukan oleh Instansi Pengawas Keuangan Negara, yang secara rinci meliputi :

a) Memonitor,mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta kesiapan pekerjaan. Menyusun Laporan Berkala dan teguran terhadap keterlambatan pelaporan pelaksanaan anggaran.
b) Meneliti usulan Calon pengelola anggaran (KPA dan bendahara).
c) Penyusunan usulan beserta kelengkapan ke tingkat Kementerian.
d) Memonitor tindak lanjut LHP Tim pemeriksa, Memonitor dan evaluasi LHP,TP dan TGR dilingkungan Ditjen Hubdat dan membuat teguran terhadap keterlambatan tindak lanjut LHP,TP dan TGR.

c. Bagian Hukum

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang transportasi darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
2) pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
3) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

Pada Bagian Hukum dan Kerjasama, pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 tidak terlepas dari program kerja tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, belum terlaksana maupun sedang dalam proses penyelesaian serta kegiatan yang berkelanjutan dan terjadwal setiap tahun. Program kerja pada Bagian Hukum dan Kerjasama dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain yaitu :

1) Sub Bag. Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan 2011 telah dijadwalkan 15 kegiatan dalam rangka *Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran* dan Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang antara lain banyak menitik beratkan pada perlunya suatu pengaturan baru ataupun perlunya pembaharuan pengaturan, yang meliputi :

a) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Revisi Peraturan Pemerintah bidang LLAJ sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
c) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Dirjen bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
d) Penyusunan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
e) Penyusunan dan Penelaahan Perjanjian;
f) Verifikasi Raperda di Bidang Perhubungan Darat;
g) Pembuatan buku peraturan pelaksanaannya.

2) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan penyiapan dan pengandaan dokumentasi hukum untuk keperluan informasi dan referensi antara lain :

a) Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum atas perkara-perkara yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat termasuk mengikuti persidangan di Peradilan (11 Perkara yang ditangani Tahun 2011);
b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi terhadap system Dokumentasi Hukum;
c) Penyebarluasan produk hukum Ditjen Hubdat kepada masyarakat dan instansi Pemerintah baik melalui distribusi secara langsung maupun melalui penyuluhan;
d) Melakukan penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang transportasi darat;
e) Melakanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang transportasi darat;

3) Sub Bag. Humas dan Kerjasama

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada hubungan dengan masyarakat secara langsung (internal dan eksternal), hubungan dengan masyarakat melalui media, hubungan antar lembaga dan kerjasama luar negeri antara lain:

a) Penyiapan bahan, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dan evaluasi dalam bentuk pertemuan (formal/informal), Penerangan, Penyuluhan, Konferensi Pers, Jumpa Pers, Liputan Pers, Analisis maupun pelurusan berita/tulisan dan pembinaan hubungan baik dengan wartawan/media, serta melaksanakan kliping / guntingan berita sebagai bahan informasi dan pertimbangan pimpinan Eselon I dan Eselon II;

b) Menyiapkan bahan, mengkoordinir dan mengikuti pameran yang berkaitan dengan bidang transportasi telah diikuti pameran sebanyak 3 kegiatan;

c) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga / Institusi baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan antar lembaga, termasuk mengikuti rapat dengar pendapat di DPR;

d) Melaksanakan dokumentasi audio dan visual tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilingkungan Ditjen Perhubungan Darat maupun yang terkait;

e) Memberikan informasi kebijakan dan informasi lain dilingkungan Ditjen Hubdat dengan menerbitkan info Hubdat setiap 3 bulan sekali yang disebarkan kepada *Stakeholder* baik dilingkungan Departemen Perhubungan maupun di luar Dephub serta Dinas Perhubungan propinsi dan Dinas perhubungan Kab/Kota;

f) Penyiapan dan analisis bahan untuk rapat konsultasi, rapat koordinasi, serta rapat persiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan pertemuan KSLN baik di dalam maupun di luar negeri;

g) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan delegasi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan KSLN, termasuk proses administrasinya baik di dalam maupun di luar negeri;

h) Mengkordinasikan tindak lanjut hasil petemuan dan kegiata-kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri, termasuk *agreements* / perjanjian-perjanjian dan *MOU* yang bersifat regional, bilateral atau internasional.

d. Bagian Kepegawaian Dan Umum

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
2) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3) Pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada Bagian Kepegawaian dan Umum, untuk tahun 2011 telah dijadwalkan beberapa kegiatan yang secara garis besar meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pelayanan administrative kepegawaian, sarana dan prasarana kerja serta sumberdaya manusia. Kegiatan tersebut dapat dirinci sesuai dengan pembagian sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Selain menyiapkan tenaga-tenaga sesuai dengan kebutuhan, penyempurnaan organisasi, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, juga kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dengan rincian :

a) Melakukan monitoring mengenai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
b) Melakukan monitoring UPT dan Eks UPT Ditjen Hubdat;
c) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Struktural, Fungsional maupun Diklat Teknis Dalam dan Luar Negeri serta program beasiswa S2 transportasi;
d) Memproses Pengangkatan Jabatan fungsional, Mutasi, Promosi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai;
e) Melakukan Penataan nomenklatur jabatan teknis dan penyempurnaan uraian jabatan/pekerjaan Ditjen Hubdat;
f) Penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur perhubungan bidang lalu lintas;

g) Memproses penerbitan Surat Keputusan Kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
h) Menyusun formasi Tahun Anggaran 2012 dan menyempurnakan daftar susunan kebutuhan pegawai (DSP);
i) Menyiapkan proses pengadaan CPNS Ditjen Perhubungan Darat formasi tahun 2012;
j) Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
k) Melakukan kegiatan peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
l) Menyiapkan bahan usulan, fasilitasi dan koordinasi rencana pembentukan UPT Ditjen Perhubungan Darat di daerah, termasuk yang belum sanggup untuk dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah;
m) Memfasiltasi pengurusan Kartu Taspen, Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
n) Melakukan pembekalan kepada para pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
o) Melakukan pembekalan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi bagi para pegawai;

2) Sub Bagian Tata Usaha

Untuk Sub Bagian Tata Usaha dengan harapan terwujudnya pelayanan dan akurasi data kepegawaian yang optimal maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain :

a) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
b) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai;
c) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai;
d) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai
e) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai

f) Penyempurnaan dan *updating* data kepegawaian;
g) Penataan dan pemeliharaan arsip;
h) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung
i) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA);
j) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
k) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
l) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;
m) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
n) Sosialisasi ketatausahaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.

3) Sub Bagian Rumah Tangga

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, demikian pula dengan optimalisasi penyediaan kebutuhan medis bagi pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, antara lain:

a) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi ; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester.
b) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga.
c) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai.
d) Pengadaan pakaian kerja satpam
e) Pengadaan obat-obatan dan honororium dokter dan perawat pada poliklinik.
f) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, meja rapat, LCD projektor, AC split, alat penghancur kertas, komputer, mesi fax,

telepon, mesin ketik elektronik, mesin ketik manual, printer, exsternal hardisk, lemari brankas, locker, area parkir sepeda, lemari penyimpanan arsip, dan Mobiler.

g) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system.
h) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4.
i) Perbaikan barang inventaris kantor.
j) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat.
k) Pemeliharaan Gedung Kantor Ditjen Hubdat.
l) Pemeliharaan Kamar Mandi
m) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6.
n) Penyediaan jasa outsourcing tenaga keamanan.
o) Pelayanan urusan dalam lainnya.

2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
f. Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
g. Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
h. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan

Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan

lokasi terminal penumpang tipe B dan tipe C, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;

3) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
4) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan

Gambar 3.1. Peta jaringan Trayek AKAP dan ALBN

6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

1) Seksi Jaringan Prasarana Dan Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Studi Perencanaan Teknis Dan Revitalisasi Simpul Transportasi Jalan Di Kota Tegal
b) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Penyusunan Kompetensi Petugas Terminal
c) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Interkoneksi Manajemen Operasional Terminal Tipe A
d) Perencanaan Teknis Penyusunan Pedoman Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal
e) Perencanaan Teknis dan Penyusunan Pedoman Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang yang Melibatkan Pihak Swasta, P3
f) Perencanaan Umum Jaringan Trayek, Rencana Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum dan Jaringan Pelayanan
g) Rehabilitasi Terminal Penumpang Bawen Tahap I (beserta supervisinya).
h) Rehabilitasi Terminal Purabaya Tahap III (beserta supervisinya).
i) Rehabilitasi Pembangunan Terminal Solo Jateng Tahap III (beserta supervisinya).
j) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Di Kab. Barru Provinsi Sulsel Tahap II (beserta supervisinya).
k) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Wonogiri Tahap II (beserta Supervisi)

Gambar 3.2. Pembangunan Terminal Wonogiri

l) Pembangunan Gedung Arsip Tahap I (beserta Supervisi)

m) Pembangunan Terminal Penumpang di Kabupaten Pacitan Tahap II (beserta Supervisi)

Gambar 3.3. Pembangunan terminal Pacitan

n) Pembangunan Terminal Penumpang di Kabupaten Tana Toraja Tahap IV (beserta Supervisi)

o) Penyelenggaraan Workshop Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

p) Penyusunan Konsep RPP Jaringan LLAJ

q) Pembekalan Teknis Kepala Terminal (peserta 55 orang).

Gambar 3.4. Pembekalan Kepala Terminal di Bali

r) Penyelenggaraan Workshop RPP Jaringan LLAJ

Gambar 3.5. Penyelenggaraan Workshop Di Hotel Inna Garuda Yogyakarta

s) Survei Inventarisasi Jaringan dan Prasarana Provinsi Banten.

Gambar 3.6. Prasarana LLAJ Di Provinsi Banten

2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) SIM Database Terminal Terminal Tipe A Tahap III.
b) Sewa Jaringan CCTV Di 22 Lokasi(Terminal Merak, Pintu Tol Merak, ASDP Merak, Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Patrol, Losarang, Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Losari JT Tanjung (Brebes), Padalarang, Cileunyi, Nagrek, JT Gentong, Sadang, Kadipten, Sumpiuh, Ciamis, Comal, Karanganyar, JT. Kulwaru).
c) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi (VMS,CCTV,SMART CARD Terminal).
d) Pemeliharaan Jembatan Timbang Percontohan.
e) Sewa *Backhaul Internet* Operasional RTTMC, VMS, CCTV, SMART CART.
f) Pengadaan dan Pengembangan RTTMC.

g) Pengadaan *Electronic Card Terminal*.

h) Penyusunan Penentuan kinerja (PK) Tahun 2011.

i) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011.

j) Penyusun Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2011.

k) Penyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2011.

l) Monitoring CCTV Angkutan Lebaran Tahun 2011, Angkutan Natal Tahun 2011 dan Angkutan Tahun Baru 2011.

Gambar 3.7. Pelaksanaan Monitoring Angkutan Lebaran

b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan

Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi

peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;

b) Penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;

c) Penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;

e) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan

f) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2011.

Dilaksanakan di Ruang Mataram, Gedung Karya, Kementerian Perhubungan pada tanggal 5 Oktober 2011. Kegiatan dihadiri penguji kendaraan bermotor dari seluruh Indonesia dengan jumlah 215 orang.

Gambar 3.8. Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia

b) Pembahasan RPD tentang Pengujian Kebisingan Kendaraan Bermotor;

c) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional Tahun 2011.

Dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 hingga 14 September 2011 dan diikuti 32 peserta.

Gambar 3.9. Pembukaan PPKBT 2011

Gambar 3.10. Pelaksanaan Uji Praktek

Gambar 3.11. Pelaksanaan Ujian Lisan dan Peninjauan Lapangan

d) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dilaksanakan di Balikpapan pada bulan Juni 2011 dihadiri 85 peserta dari Dinas Perhubungan se-Pulau Kalimantan. Tema yang diambil adalah sistem informasi pengujian berkala dan paparan penerapan kartu elektronik di Kota Bogor.

e) Pembangunan *multipurpose test track* untuk pengujian rem dan pengujian kebisingan kendaraan bermotor sesuai *UN ECE R41 & UN ECE R51* di Balai Pengujian laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Hingga akhir tahun 2011, telah terbangun test track sepanjang 1 km.

f) Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) kendaraan bermotor.
Selama tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak 683 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Penerbitan Sertifikasi Uji Tipe

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Sepeda motor	147
2.	Kendaraan bermotor roda 3	4
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	460
4.	Landasan kendaraan bermotor	72
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	238
TOTAL		**921**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Sementara itu untuk penerbitan Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor diterbitkan sebanyak 665 buah.

g) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT)

Untuk tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak 242.775 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut:

Tabel 3.2. Penerbitan Sertifikasi Uji Tipe

No	Bulan	Stok	Total Pengeluaran SRUT subdit SAJ		
			SRUT Keluar	Rusak	Total
1.	Januari	48.752	12.058	208	12.266
2.	Februari	36.486	16.219	255	16.474
3.	Maret	20.012	20.913	143	21.056
4.	April	23.956	20.527	297	20.824
5.	Mei	78.132	35.917	99	36.016
6.	Juni	42.116	15.567	121	15.688
7.	Juli	26.428	15.487	96	15.556
8.	Agustus	35.872	26.083	26	26.109
9.	September	59.763	27.909	52	27.961
10.	Oktober	31.802	5.689	96	5.785
11.	November	26.017	29.167	63	29.230
12.	Desember	11.787	15.705	105	15.810
Total Keseluruhan		441.123	241.241	1.561	242.775

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

h) Penerbitan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor.

i) Selama tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak 2490 sertifikat dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

NO	JENJANG KOMPETENSI	JUMLAH
1.	Pelaksana Pemula	507
2.	Pelaksana	649
3.	Pelaksana Lanjutan	907
4.	Penyelia	427
JUMLAH		**2490**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

j) Partisipasi dalam pertemuan ACCSQ-APWG (*Asean Consultative Commite Standard and Quality Automotive Product Working Group*) ke-14 di Brunei Darussalam.

k) Menyusun SK Dirjen Nomor : 2105/KP.801/DRJD/2011 tentang pembentukan tim *Indonesian Automotive Standard Internationalization Forum (IASIF)*. Forum ini merupakan wahana bagi stake holders bidang otomotif di Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah

(Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan BPPT), industri (ATPM, importir, karoseri, dan bengkel rekondisi), serta akademisi untuk membahas masalah regulasi otomotif, harmosisasi peraturan sektor otomotif Indonesia dan dunia (regional maupun internasional).

l) Menyusun Peraturan Dirjen Nomor : 402/42/12/DRJD/2011 tentang Bantuan Teknis Pengadaan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
m) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetakan buku uji;
n) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang rekomendasi distribusi buku uji;
o) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetak stiker uji;
p) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang perubahan wilayah distribusi buku uji;
q) Penyusunan draft peraturan Dirjen tentang petunjuk pelaksanaan kartu uji dan stiker uji;
r) Melakukan *witness* uji emisi kendaraan bermotor di Swedia, Thailand, India, Jepang, dan Jerman.

2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Pembahasan/finalisasi RPP Kendaraan;
b) Finalisasi konsep RPD (Rancangan Peraturan Dirjen) tentang Spesifikasi Teknis Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
c) Pembinaan dan penyuluhan rancang bangun serta penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

   Kegiatan ini ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi terkait SRUT yang diterbitkan atas kendaraan bermotor hasil rancang bangun dan rekayasa. Pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan kunjungan dan memantau secara langsung prosedur penerbitan SRUT di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

d) Pembinaan dan penyuluhan produksi kendaraan bermotor serta penerbitan SRUT.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke beberapa industri karoseri, ATPM, importir, dan pemodifikasi kendaraan bermotor. Tujuannya ialah memonitor apakah produk kendaraan bermotor yang ada di perusahaan-perusahaan yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk tahun 2011, kunjungan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan dilakukan terhadap beberapa perusahaan karoseri di Jawa Timur.

Gambar 3.12. Pelaksanaan Kunjungan ke Industri Karoseri

e) Pelaksanaan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;

Total kegiatan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama tahun 2011 berjumlah 48 tempat dengan rincian sebagai berikut:

f) Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;

Selama tahun 2011 telah dihasilkan sebanyak 665 Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Penerbitan Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Rancang bangun kereta tempelan	31
2.	Rancang bangun kereta gandengan	1
3.	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	633
TOTAL		**665**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

g) Pengajuan usulan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk sarana impor kendaraan atau komponen kendaraan bermotor yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mendorong dan membantu industri kendaraan bermotor dalam negeri mengembangkan produk yang ramah lingkungan, melaksanakan alih teknologi, meningkatkan kandungan lokal, dan menyerap tenaga kerja. Usulan ditujukan kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

h) Sertifikasi bengkel instalasi BBG pada kendaraan bermotor.

Terkait fungsi pemerintah dalam menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, salah satunya berupa sertifikasi bengkel instalasi bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Tujuan sertifikasi bengkel BBG ini adalah untuk memastikan terpenuhinya semua persyaratan menyangkut fasilitas peralatan yang dimiliki dan teknisi pelaksana instalasi sistem BBG. Hingga tahun 2011 tercatat sebanyak 12 bengkel instalasi BBG yang telah mendapat sertifikasi.

Tabel 3.5. Bengkel BBG yang telah mendapat sertifikasi

NO	NAMA BENGKEL BBG
1.	PT. BINA TERA JASINDO
2.	PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
3.	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
4.	PT. PETROSS GAS
5.	PT. APTO GAS
6.	PT. CNG GLOBAL
7.	PT. MERINDO INDAH LESTARI
8.	PT. ABDI RAHARJA, BAJAJ
9.	PT. ITOCHU
10.	PT. IKEMADA BERKAT ABADI
11.	PT. TUNAS RIDEAN
12.	PT. PUTRA DAMAI SEJAHTERA

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

i) Pelaksanaan Uji Tipe CBU Bukan Baru ke 5 kota tujuan impor (Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Jakarta). Total sebanyak 238 tipe kendaraan bermotor impor *completety built up* (CBU) bukan baru telah diuji tipe selama tahun 2011.

j) Penilaian fisik kendaraan dalam rangka penghapusan kendaraan dinas milik instansi pemerintah.

Selama tahun 2011 terdapat 68 unit kendaraan dinas milik kementerian dan BUMN telah dinilai kondisi teknisnya dalam rangka penghapusan dari daftar inventaris negara. Penilaian kondisi teknis merupakan salah satu syarat penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah.

c. Sub Direktorat Lalu Lintas Jalan

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
c) Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
e) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
f) Penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
g) Penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
h) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bukittinggi (Sumatera Barat) dan Cilegon (Banten);
b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
c) Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2011/1432 H;
d) Penetapan Petunjuk Peringatan, Perintah atau Larangan Pada Jalan Nasional Tahap I (Bekasi – Cikampek);

Gambar 3.13. Penetapan Petunjuk Peringatan, Perintah atau Larangan pada Jalan Nasional

e) Penetapan Petunjuk Peringatan, Perintah atau Larangan Pada Jalan Tol Tahap II (Semarang);

Gambar 3.14. Penetapan Petunjuk Peringatan, Perintah atau Larangan pada Jalan Tol Semarang Tahap II

f) Rekayasa Ruas Segmen Bekasi – Cikampek Tahap II;

g) Rekayasa Ruas Segmen Tasikmalaya – Purwokerto Tahap II;

h) Rekayasa Ruas Segmen Cileunyi – Tasikmalaya Tahap IV;

Gambar 3.15. Rekayasan Segmen Cileunyi – Tasikmalaya Tahap IV

i) DED Manajemen Lalu Lintas Jalan Nasional Pantura di Pulau Jawa Segmen Cikampek – Cirebon Tahap II;

j) DED Manajemen Lalu Lintas Jalan Nasional Pansela di Pulau Jawa Segmen Tasikmalaya – Purwokerto Tahap II;

k) DED Manajemen Lalu Lintas di Jalur Trans di Pulau Kalimantan Tahap II;

l) DED Manajemen Lalu Lintas di Jalur Trans di Pulau Sulawesi Tahap II;

m) Pembangunan Sistem Informasi Lalin di Jalan Nasional Tahap IV.

2) Seksi Perlengkapan Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Perlengkapan Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Semiloka Perlengkapan Jalan di Semarang;

Gambar 3.16. Semiloka Perlengkapan Jalan di Semarang

b) Sosialisasi Penetapan Operasional Jembatan Timbang di Pulau Jawa;

Gambar 3.17. Pelaksanaan Sosialisasi JT di Jawa Timur

c) Pembinaan dan Sosialisasi Jembatan Timbang di Bandung;

Gambar 3.18. Pelaksanaan Sosialisasi JT di Jawa Timur

d) Pembangunan laboratorium fasilitas perlengkapan jalan tahap II;

Gambar 3.19. Pelaksanaan Pembangunan Laboratorium Fas. Perlengkapan Jalan

e) Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan No. Rute Jalan Di Jalan Nasional Tahap (Tiang F) Di Sumbagut - Tahap VI;

Gambar 3.20. Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

f) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Pantura;
g) Pengadaan dan Pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Pansela;
h) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera;
i) Pembangunan Sistem Informasi E Enforcement Penanganan Angkutan Barang di PKB dan JT di P. Jawa Tahap I;
j) Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang Tahap IV di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;

Gambar 3.21. Pelaksanaan Rehabilitasi Operasional JT Tahap IV

k) Rehabilitasi APILL dijalan Nasional di Pulau Jawa Berbasis *solar cell* - Tahap III;
l) Rehabilitasi APILL di Jalan Nasional Berbasis Solar Cell Tahap III;
m) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell di Jalur Pantura Tahap II;
n) Pemeliharaan APILL Solar Cell di Pulau Jawa;
o) Pemeliharaan Database Perlengkapan Jalan, Database Jembatan Timbang dan Sistem Informasi Lalu Lintas di Jalan Nasional Tahap II;
p) Penetapan Nomor Rute di Jalan Nasional di Pulau Kalimantan;
q) Monitoring Pembangunan Fasilitas LLAJ;

r) Inventarisasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan untuk Asia dan ASEAN Highway;

s) Survey TC Angkutan Lebaran Tahun 2011;

Gambar 3.22. Pelaksanaan Rehabilitasi Operasional JT Tahap IV

t) Survey Sarana dan Prasarana kegiatan Angkutan Lebaran 2011.

d. Sub Direktorat Angkutan Jalan

Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, pemberian izin angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta perhitungan tarif angkutan umum di jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;

c) Penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu;

d) Penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
e) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
f) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

1) Seksi Angkutan Penumpang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Angkutan Penumpang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Tahun 2011 di Pulau Sumatera;
b) Herregistrasi Perusahaan Angkutan AKAP di Pulau Jawa;
c) Monitoring Tarif Angkutan AKAP Kelas Ekonomi;
d) Pelaksanaan Pemilihan Perusahaan Angkutan dengan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2011 (1432 H);
e) Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2011 di Jogjakarta;
f) Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan di Solo;
g) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2011 di Surabaya dan Makassar;
h) Survey Load Faktor Angkutan Penumpang Umum di P. Jawa;
i) Monitoring dan Evaluasi Keperintisan Angkutan Jalan;
j) Pelaksanaan Rakernis Angkutan perintis di Balikpapan;
k) Kajian Teknis Mekanisme lelang dan Seleksi Perizinan Angkutan Umum;
l) Pengadaan Bus Perintis;
m) Penyusunan Standar Operasi Pelayanan Angkutan Lintas Batas Negara;
n) Aplikasi Percontohan Izin Trayek Dalam Bentuk Kartu Elektronik;
o) Pemeliharaan dan Pengoperasian Tracking System Anagkutan AKAP;
p) Pengadaan System Informasi Angkutan Jalan Perintis.

2) Seksi Angkutan Barang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Angkutan Barang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Evaluasi kinerja perusahaan angkutan B3;
b) Pelatihan dan Audit Perijinan Angkutan Pariwisata Standard ISO;
c) Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata Standar ISO;
d) Monitoring Tarif Angkutan Barang;
e) Semiloka Angkutan Barang Berbahaya;
f) Tata Cara Pelayanan Teknis Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat Standard ISO.

e. Sub Direktorat Pengendalian Operasional

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b) Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e) Penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/ pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

g) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1) Seksi Monitoring Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Monitoring Operasional melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Pengawasan Operasional Angkutan Orang dan barang.

Gambar 3.23. Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang

b) Pengawasan Pelaksanaan Produksi Karoseri.

Gambar 3.24. Pelaksanaan Pemeriksaan Karoseri

c) Pengembangan jaringan alat komunikasi.

Gambar 3.25. Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Komunikasi

d) Pemeliharaan dan Pengoperasian alat Komunikasi.

Gambar 3.26. Pengembangan Jaringan Komunikasi

e) Monitoring pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.

Gambar 3.27. Pelaksanaan Monitoring Jembatan Timbang

f) Penegakan hukum perijinan angkutan secara nasional.

Gambar 3.28. Penegakan Hukum Perizinan Angkutan

g) Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

Gambar 3.29. Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

h) Pengawasan Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

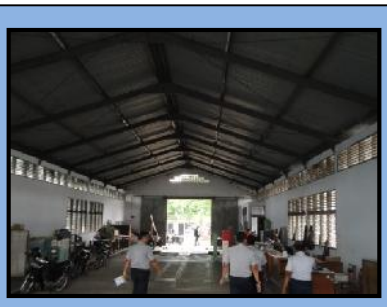

Gambar 3.30. Pengawasan Pengujian Berkala

i) Pengawasaan dan Pengendalion Operasional Angkutan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

Gambar 3.31. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Bandara Soekarno Hatta

j) Posko Koordinasi Lapangan Angkutan Barang dan Penumpang.

2) Seksi Bimbingan Teknis PPNS

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Bimbingan Teknis PPNS melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Rakernis PPNS bidang LLAJ di Lombok Barat, Prov Nusa Tenggara Barat

Gambar 3.32. Pelaksanaan Rakernis LLAJ

b) Kegiatan Dalops (Penyuluhan Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Ambon Prov Maluku dan Medan Prov

Gambar 3.33. Penyuluhan Penegakan Hukum bidang LLAJ

c) Pengadaan Buku Pedoman PPNS.

d) Pelaksanaan Penyidikan bidang LLAJ.

e) Pemeliharaan dan Pengoperasian Kendaraan Operasional.

f) Penyusunan RPP Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor dan penyidikan di Jalan.

g) Monitoring Komprehensif Pimpinan Ditjen Hubdat

h) Pengadaan Kendaraan Khusus Penanganan Gangguan LLAJ akibat bencana Alam.

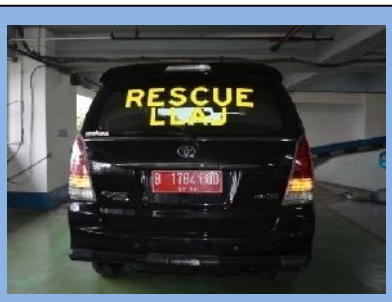

Gambar 3.34. Pengadaan Kendaraan Penanganan Gangguan LLAJ akibat Bencana Alam

i) Peningkatan Kualitas PPNS Pola 400 Jam.

j) Peningkatan Ketrampilan (refreshing) PPNS LLAJ.

3. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
e. pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota;
3) penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

4) penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Anev Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Anev Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyusunan Evaluasi Kinerja Lintas Penyeberangan.
b) Penyusunan data jaringan transportasi sungai danau.
c) Mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
d) Mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
e) Mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
f) Menyusun informasi jaringan transportasi SDP untuk bahan pembinaan.
g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP Provinsi.
h) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP.
i) Menyusunan Penetapan Kinerja 2011 dan LAKIP 2011.

2) Seksi Pengembangan Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pengembangan Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Pengawasan pengembangan terhadap penetapan lintas penyeberangan antar propinsi maupun antar negara;
b) Mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
c) Memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota;
d) Mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
e) Mengelola kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
f) Melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP di beberapa provinsi;
h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i) Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
b) pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
c) penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
d) pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau;
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

1) Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Evaluasi Kinerja Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2011;
b) Pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan sarana sungai danau dan penyeberangan;
c) Peningkatan kemampuan SDM di bidang pembangunan kapal baru dan manajemen keselamatan sarana penyeberangan.

2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Monitoring Registrasi Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
b) Monitoring Pelaksanaan Docking Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2011;

c) Peningkatan kemampuan SDM di bidang perawatan dan mempertahankan klas kapal penyeberangan.

c. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan**;**
b) pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
c) penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
d) pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
b) Menyusun bahan laporan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
c) Memberikan bimbingan teknis terkait dengan desain dermaga kepada satker daerah;
d) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan yang didanai oleh APBN;
e) Melakukan inventarisasi data pelabuhan SDP di Indonesia yang sudah terbangun;
f) Melakukan pemantauan terhadap progres-progres kegiatan pembangunan dermaga di daerah yang didanai dari APBN;
g) Memberikan bimbingan teknis di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
h) Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tahun 2011

2) Seksi Pengelolaan Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pengelolaan Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan rencana pembentukan OPLAP/OPP;
b) Memantau kinerja pelabuhan SDP di Indonesia;
c) Pemantauan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan yang diusahakan;
d) Sosialisasi pedoman teknis yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri maupun Dirjen Perhubungan Darat;
e) Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sistem informasi berbasis spasial (GIS).

d. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
b) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Manajemen Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaikan ASD;
b) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur ASD;

c) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Pengerukan Alur Pelayaran SDP dan Kolam Pelabuhan serta Reklamasi;

d) Penyusunan Data Base Rambu SDP;

e) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Keberangkatan ASD.

f) Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di adakan di Provinsi Jawa Tengah (Wonogiri), Provinsi Riau (Siak), Kota Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan (Barito Kuala), Provinsi Kalimantan Tengah (Muara Teweh), Provinsi Kalimantan Timur (Kutai kartanegara).

g) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau

h) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

2) Seksi Alur dan Perambuan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Alur dan Perambuan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Sosialisasi Pedoman Teknis Bidang LLASDP

b) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

c) Pemantauan dan Evaluasi Alur Pelayaran Penyeberangan (SBNP)

d) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau

e) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

f) Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT dan instansi di daerah mengenai studi desain pengerukan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.

Gambar 3.35. Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di adakan di Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.36. Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di adakan di Kota Jambi

e. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

c) penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Pemeriksaan kesiapan perangkat operasi sarana dan prasarana, pemantauan dan pengawasan angkutan penyeberangan pada angkutan lebaran tahun 2011.
b) Penyusunan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas komersil.
c) Pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah melakukan docking tahunan.
d) Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal.

2) Seksi Tarif dan Keperintisan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Tarif dan Keperintisan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Monitoring penyelengaraan angkutan penyeberangan perintis.
b) Monitoring pelaksanaan docking kapal penyeberangan perintis.
c) Pamantauan Tarif Angkutan Penyeberangan.
d) Penyelengaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) tahun 2011.
e) Pembahasan formulasi perhitungan tarif jasa pelabuahn (PP No. 6 tahun 2009).

4. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Bina Sistem Tranportasi Perkotaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
b) Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
c) Penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan pemaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) perovinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan;
d) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan trasnportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
e) Penyampaian perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transprotasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
f) Penyampaian pelaksanaan kebijakan di bidang transprotasi perktoaan menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
g) Penyampaian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transprotasi perkotaan; dan

h) Penyampaian pelaksanaan uruasan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportgasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainya, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan trasnportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintregrasi dengan moda lainnya;
b) Penyiapan bahan pelaksana bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yuang terintegrasi dengan moda lainnya;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintergrasi dengan moda lainnya;
d) Penyiapan bahan penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transporasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan;
e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
f) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintergrasi dengan moda lainnya, penyusunan system

informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportsi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan trasnportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintregrasi dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
b) pelaksana bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yuang terintegrasi dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
c) penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transporasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
d) pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintergrasi dengan moda lainnya, penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportsi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
f) Evaluasi Kinerja Jaringan Transportasi Jalan di Wilayah Perkotaan.

g) Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2011;
h) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan Tahun 2011;
i) Pengelola Operasional Urban Transport Information Center (UTIC) Tahun Anggaran 2011.

2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Bimbingan Teknis penyuluhan dan sosialisasi transportasi perkotaan.
b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II
c) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II.
d) Penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan wilayah II
e) Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II
f) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II.
g) Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2011;
h) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan Tahun 2011;

i) Pengelola Operasional Urban Transport Information Center (UTIC) Tahun Anggaran 2011.

b. Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan perumusan serta pelaksnaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, penyelenggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan lalu lintas perktoaan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
c) Penyiapan bahan pelakanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;
d) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penangan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; dan
e) Penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak

bermotor penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, bimbingan teknis dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis pelasanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Survai persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432H)
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, penerapan ATCS dan Pedesterian diwilayah I
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah I
d) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.di wilayah I
e) Rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I.
f) Pelaksanaan Kegiatan Survey Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Di Wilayah Perkotaan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2011;
g) Pelaksana Kegiatan Analisis Kinerja Lalu Lintas Di Kawasan Perkotaan Tahun 2011;
h) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan tahun 2011;
i) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2011;
j) Bimbingan Teknis Transportasi Perkotaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2011.

2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II;
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, Penerapan ATCS dan Pesepeda di wilayah II;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II.
d) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II;
e) Merumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II;
f) Pelaksanaan Kegiatan Survey Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Di Wilayah Perkotaan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2011;
g) Pelaksana Kegiatan Analisis Kinerja Lalu Lintas Di Kawasan Perkotaan Tahun 2011;
h) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan tahun 2011;
i) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2011;
j) Bimbingan Teknis Transportasi Perkotaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2011.

c. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan Teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam

trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
c) Penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanananya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;
d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa saran angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;
e) Penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
f) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
c) Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

d) Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah admistrasi propinsi.
e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
f) Konsolidasi Penangan Masalah Transportasi di Wilayah Perkotaan Tahun 2011.
g) Penilaian Kinerja Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2011
h) Evalusasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan Angkutan Kota/Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2011.
i) Monitoring Pelayanan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Tahun 2011.

2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
c) Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
d) Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah admistrasi propinsi
e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

f) Konsolidasi Penangan Masalah Transportasi di Wilayah Perkotaan Tahun 2011
g) Penilaian Kinerja Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2011
h) Evalusasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan Angkutan Kota/Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2011
i) Monitoring Pelayanan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Tahun 2011;

d. Sub Direktorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perktoaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
c) Penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
d) Penyiapan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penmpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
f) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek angkutan penumpang umum dan barang;
g) Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau bersekala nasional; dan
h) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis penyusunan rncana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antara simpul transportasi, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perktoaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda, serta penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional.

1) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)
b) Penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi Wilayah I
c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi

kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi Wilayah I

d) Bimbingan Teknis Pengoperasian Angkutan Pemadu Moda Di Wilayah Perkotaan
e) Identifikasi Pelayanan Angkutan Barang dan Fasilitas Bongkar Muat Di Wilayah Perkotaan;
f) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan;
g) Pemantauan Kinerja Dan Identifikasi Pelayanan Angkutan Lingkungan Di Wilayah Perkotaan;
h) Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan (Wilayah Sumatera);
i) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Pemadu Moda.

2) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan :

a) Pelaksanaan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)
b) Konsolidasi Penanganan Transportasi Perkotaan;
c) Penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi Wilayah I;
d) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi Wilayah I.
e) Bimbingan Teknis Pengoperasian Angkutan Pemadu Moda Di Wilayah Perkotaan
f) Identifikasi Pelayanan Angkutan Barang dan Fasilitas Bongkar Muat Di Wilayah Perkotaan;
g) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan;

h) Pemantauan Kinerja Dan Identifikasi Pelayanan Angkutan Lingkungan Di Wilayah Perkotaan;
i) Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan (Wilayah Sumatera);
j) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Pemadu Moda.

e. Sub Direktorat Dampak Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma , pedoman, riteria dan pelaporan di bidang penyelenggaran transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transporasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis damapak lalu lintas di jalan nasional di kawasan perkotaan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkunagan dan penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis penangan dampak transportasi berupa peralatan pendukung penggunaan bahan bakar alternatif, pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid serta peralatan pemantau emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor;
d) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen dibidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan;

e) Penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
f) Penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
g) Penyiapan bahan pelaknsaaan sertifikasi kompetensi penilaian analissi dampak lalu lintas; dan
h) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan penylenggaraan teknis pelaksnaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I meliputi daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
b) Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan Dampak transportasi perkotaan;
c) Penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
f) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;

g) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan *Smart Driving* serta Implementasinya;
h) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan *Converter Kit* Pada Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2011;
i) Sosialisasi Penangan Dampak Transportasi Di Kota Mataram dan Kota Jambi Tahun 2011;
j) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Pekanbaru Tahun 2011;
k) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Manado Tahun 2011.

2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II meliputi daerah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
b) Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan Dampak transportasi perkotaan;
c) Penyusunan Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
f) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
g) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan *Smart Driving* serta Implementasinya

h) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Converter Kit Pada Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2011;
i) Sosialisasi Penangan Dampak Transportasi Di Kota Mataram dan Kota Jambi Tahun 2011;
j) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Pekanbaru Tahun 2011;
k) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Manado Tahun 2011.

5. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat.
b) Pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;
c) Penyusunan kualifikasi dan pemberian teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat;
e) Pelaksanaan urusan tata usaha , kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, norma, standar,

pedoman, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, penetapan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan, penyusunan rencana, program, monitoring dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem informasi manajemen keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem informasi manajemen keselamatan;
b) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan Propinsi, Kota dan Kabupaten, dan system informasi manajemen keselamatan;
c) penyiapan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan nasional dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
d) penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan system informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
e) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi anggota Unit Pengkajian Keselamatan; dan
f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan.

1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keselamatan

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan system informasi manajemen

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

2) Seksi Pengembangan Keselamatan

Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

b. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
b) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
c) penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
d) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.

1) Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

2) Seksi Kemitraan

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

c. Sub Direktorat Bina Keselamatan Angkutan Umum

Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaankebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan pengusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan pengusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
b) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem manajemen keselamatan pengusahaan angkutan umum dan pengembangan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
c) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum; dan

d) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan pengusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

1) Seksi Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

Seksi Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan pengusahaan angkutan umum.

2) Seksi Sertifikasi Pengemudi

Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

d. Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan.

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, alur sungai dan danau;

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, investigasi/ identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Audit Keselamatan

Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

2) Seksi Inspeksi Keselamatan

Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan adalah program kerja yang berorientasi pada pembangunan fisik, yang didanai oleh DIPA. Jumlah satker yang didanai dengan APBN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 satker dengan pagu dana sebesar Rp 2.095.941.061.000,- dengan rincian masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 3.6. Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011

No.	Program	Jumlah Proyek	Pagu DIPA (Rp.)
1.	Pengembangan LLAJ	40	736.116.576.000
2.	Pengembangan LLASDP	37	1.205.513.183.000
3.	Kantor Pusat dan UPT	5	151.513.011.000
Jumlah		**82**	2.093.144.770.000

Sumber : Setditjen Perhubungan Darat, 2011

Pagu setelah penghematan:

Tabel 3.7. Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011

No.	Program	Pagu DIPA (Rp.)
1.	Pengembangan LLAJ	679.649.100.000
2.	Pengembangan LLASDP	1.275.276.165.000
3.	Kantor Pusat dan UPT	141.015.796.000
Jumlah		2.095.941.061.000

Sumber : Setditjen Perhubungan Darat, 2011

Progres pelaksanaan APBN T.A 2011 untuk Sub Sektor Perhubungan Darat per 31 Desember 2011 adalah Realisasi Fisik sebesar 99.66 % dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.012.865.982.668,- (96.04 % dari total pagu anggaran). Rincian masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Progres APBN TA. 2011 per 31 Desember 2011
Sub Sektor Perhubungan Darat

No.	Program	Realisasi Keuangan Jumlah (Rp)	(%)	Realisasi Fisik Tertimbang(%)
1.	LLAJ	657.562.492.847	96.75	96.03
2.	LLASDP	1.234.235.421.548	96.78	99.28
3.	Kantor Pusat dan UPT	121.068.068.237	85.85	99.37
Total		**2.012.865.982.668**	**96.04**	**98.14**

Sumber : Setditjen Perhubungan Darat versi 2011.

1. Pembangunan Bidang LLAJ dan Perkotaan

Program pembangunan di Bidang LLAJ, Perkotaan dan Keselamatan terdapat 10 kegiatan yang telah dilaksanakan. Program bidang LLAJ meliputi : Pengadaan Fasilitas Keselamatan LLAJ (Marka Jalan, *Guardrail*, Rambu Lalu Lintas *Delineator*, Paku Marka, Lampu Penerang Jalan Umum Tenaga Surya, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tenaga Surya, APILL *High Flux*, *LED High*

Flux, Warning Light Tenaga Surya, Rambu Pendahulu dan Penunjuk Jalan (RPPJ) Tiang F, RPPJ Portal dan Cermin Tikungan), Pembangunan Terminal Penumpang, Rehabilitasi Terminal Penumpang, Pengadaan dan Peremajaan Alat Uji Tipe Kendaraan Bermotor di BLJSKB Bekasi, dll. Program bidang Perkotaan meliputi : Pengadaan Bus Perintis (Bus Besar AC BRT, Bus Sedang AC BRT, Bus Sedang Non AC), dan pemberian bantuan Converter Kit untuk angkutan umum.

Tabel 3.9. Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM	REALISASI	UNIT
1.	Pembangunan Fasilitas dan Keselamatan LLAJ			
	a. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	1.179.750	1.179.750	m^1
	b. Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	86.683	84.843	m^1
	c. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	16.601	17.251	Buah
	d. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	762	753	Buah
	e. Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	103	98	Buah
	f. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	17.241	17.241	Buah
	g. Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka	33.908	33.908	Buah
	h. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Hight-FLUX	114	114	Buah
	i. Pengadaan dan Pemasangan Traffic T. Surya	42	42	Buah
	j. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light T. Surya	88	87	Buah
2.	Pembangunan Jembatan Timbang	6	4	Lokasi
3.	Pengadaan Alat PKB	1	1	Paket
4.	Pembangunan Terminal Penumpang	9	9	Lokasi
5.	Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas	26	31	Paket
6.	Fasilitas Keselamatan LLAJ	32	31	Paket
7.	Subsidi Operasi Bus Perintis	157	157	Lintas
8.	Pengadaan Bus Perintis	48	48	Unit

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 3.10. Program dan Realisasi Pembangunan Bidang Perkotaan

No	Program/Kegiatan	Program	Realisasi
1	Pengadaan Bus Sedang Non AC	38	38
2	Pengadaan Bus Sedang AC BRT	10	10
3	Pengadaan Bus Besar AC BRT (2 Pintu)	25	25
4	Pengadaan Bus Besar AC BRT (1 Pintu)	18	18
5	Pengadaan Peralatan Gasifikasi (Converter Kit,Braket, Tabung, dll)	400	400
6	Pedestrian	2	1
7	Alat Monitoring Penggunaan BBG	1	1

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat, 2010

Secara keseluruhan program LLAJ dan Perkotaan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan serta ada kegiatan yang mengalami perubahan.

(1) Pengadaan dan pemasangan marka jalan dan RPPJ tidak sesuai target yang direncanakan.

(2) Sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK. 3757/AJ.204/DRJD/2010 Tanggal 26 Nopember 2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2011, maka telah dilaksanakan keperintisan bidang Angkutan Jalan pada 157 trayek di 25 Propinsi, yaitu:

Tabel 3.11. Trayek Perintis Angkutan Jalan Di Seluruh Indonesia

No	Propinsi	Jumlah Trayek
1	Aceh	8
2	Sumatera Utara	1
3	Sumatera Barat	1
4	Kepulauan Riau	1
5	Jambi	5
6	Bengkulu	5
7	Bangka Belitung	7
8	Sumatera Selatan	2
9	Lampung	3
10	Banten	4
11	Nusa Tenggara Barat	6
12	Nusa Tenggara Timur	31
13	Kalimantan Barat	1
14	Kalimantan Tengah	3
15	Kalimantan Selatan	3
16	Kalimantan Timur	3
17	Sulawesi Utara	7
18	Sulawesi Tengah	4
19	Gorontalo	6
20	Sulawesi Tenggara	6
21	Sulawesi Barat	2
22	Maluku	5
23	Maluku Utara	3
24	Papua Barat	10
25	Papua	30

2. Pengembangan Bidang LLASDP

Program pengembangan Bidang LLASDP terdiri dari 7 kegiatan yang meliputi : Pembangunan Dermaga Sungai, Dermaga Danau, Pelabuhan Penyeberangan,

Kapal Penyeberangan, Rambu Laut/Suar, Pembangunan Bus Air, dan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

Tabel 3.12. Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP

NO	PROGRAM	RENCANA	REALISASI
1	Pembangunan Dermaga Sungai		
	a. Baru	12	12
	b. Lanjutan	2	2
	c. Rehabilitasi	10	10
2	Pembangunan Dermaga Danau		
	a. Baru	2	2
	b. Lanjutan	1	1
	c. Rehabilitasi	7	7
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Baru	17	15
	b. Lanjutan	38	38
	c. Rehabilitasi	14	14
4	Pembangunan Kapal Penyeberangan		
	a. Baru	18	18
	b. Lanjutan	9	9
	c. Rehabilitasi	-	-
5	Pembangunan Bus Air	4	4
6	Rambu SBNP	19	19
7	Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis	99	99
	a. Dalam Provinsi	88	88
	b. Antar Provinsi	11	11
8	Pembangunan Breakwater	8	8

Sumber : Dit. LLASDP Ditjen Hubdat,2011

Secara keseluruhan program pembangunan LLASDP dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

C. BANTUAN LUAR NEGERI

Proyek Bantuan Luar Negeri (BLN) yang sedang berjalan (*On – Going*) pada tahun 2011. Kegiatan tersebut dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 5.000.000.000, dimana pada tahun 2011 kegiatan tersebut adalah :

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

Kegiatan TA. IBRD Road Safety Development, alokasi dana sebesar *Rp.* 4.045.072.000,-

B A B IV
OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT

A. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan mencapai 9,8 juta km2 (termasuk perairan) dan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 237,64 juta jiwa (tahun 2010).

Tabel 4.1 Kepadatan Penduduk

Wilayah	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase	Kepadatan (jiwa/km2)
Sumatera	49.615,4	21,4	103,2
Jawa-Bali	137.711,1	59,5	1.018,4
Kalimantan	13.065,8	5,6	24,0
Sulawesi	16.767,7	7,2	88,9
Nusa Tenggara	9.053,7	3,9	134,5
Maluku	2.314,5	1,0	29,3
Papua	2.841,4	1,2	6,8
Nasional	**231.369,6**	**100,0**	**121,1**

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi 2005-2015, BPS

Dengan jumlah penduduk demikian besarnya, maka sangat wajar apabila perjalanan penumpang dan barang yang dibangkitkan sangat besar jumlahnya yang sangat bepengaruh pada pembangunan masing – masing daerah.

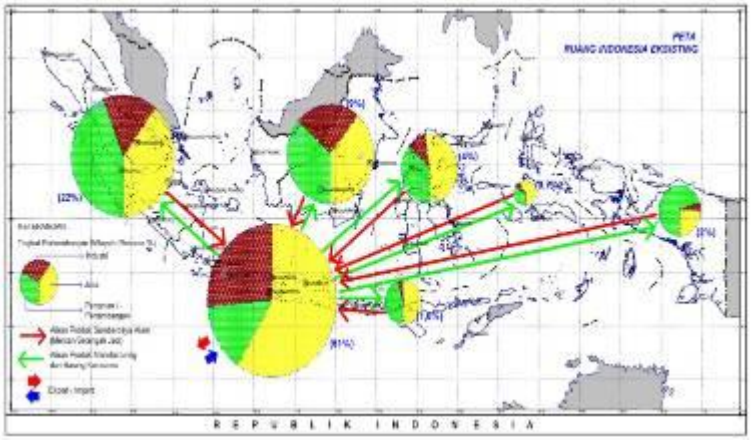

Gambar 4.1. Tingkat Pembangunan Nasional

Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil Survei O-D Nasional (Kementrian Perhubungan), yang menunjukkan angka 3,8 milyar perjalanan penumpang per tahun untuk perjalanan antar kabupaten, yang meliputi matra darat, laut dan udara. Hal yang sama juga terjadi pada perjalanan barang yang menunjukkan angka 2,4 milyar ton per tahun untuk ketiga matra dan pada tataran antar kabupaten (belum termasuk perjalanan internal kabupaten/kota). Jumlah yang luar biasa besarnya tersebut untuk saat ini masih didominasi oleh transportasi darat dengan prosentase sebesar 99% untuk penumpang dan 97% untuk barang. Dominasi volume perjalanan juga masih terjadi di Pulau Jawa dengan angka sebesar 2,8 milyar perjalanan atau 74% dari total perjalanan yang terjadi. Perjalanan barang antar kabupaten/kota 2,4 milyar ton/tahun. Jawa mendominasi sebesar 1,8 milyard atau 75%. Khusus untuk perjalanan penumpang di Pulau Jawa sebesar 1,2 milyar perjalanan per tahun (di luar perjalanan internal Propinsi). Apabila dilihat pada perjalanan antar gugus pulau secara total berjumlah 118 juta perjalanan/tahun diluar perjalanan internal pulau, atau hanya sebesar 3,14% dari keseluruhan total perjalanan penumpang transportasi darat (3,8 milyar perjalanan/tahun).

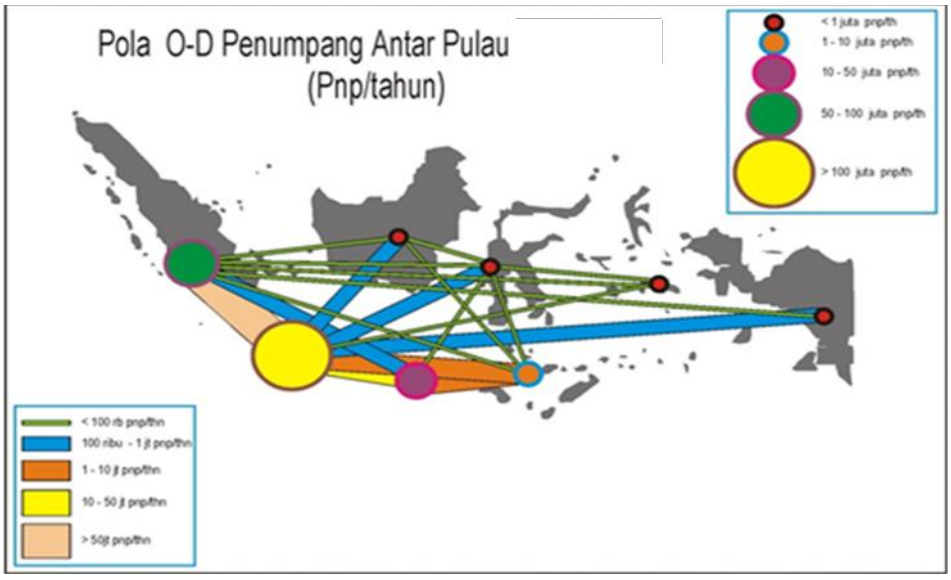

Gambar 4.2. Pola Perjalan Penumpang Antar Pulau

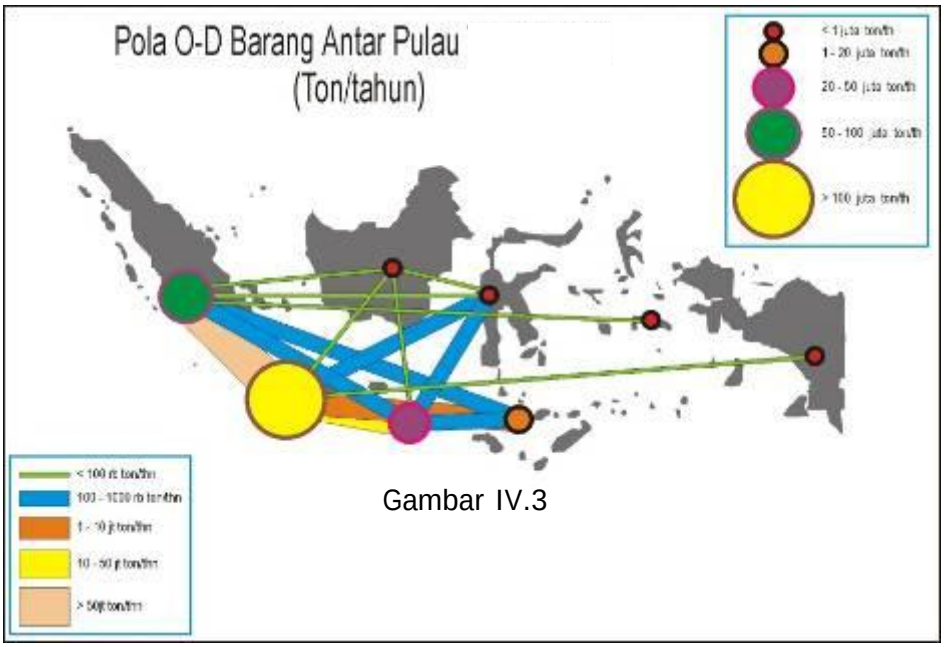

Gambar IV.3

Gambar 4.3. Pola Perjalanan Barang Antar Pulau

Dengan melihat kondisi pergerakan lalu lintas jalan yang sangat dominan, fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, permasalahan dan tantangan yang ada serta kondisi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diharapkan secara prospektif dapat mewujudkan suatu arah, visi, misi strategi kebijaksanaan yang lebih baik dan konsisten sehingga eksistensi Direktorat LLAJ benar-benar nyata mampu mendorong tercapainya sasaran pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi jalan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Telah banyak upaya dan peranan yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAJ dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Namun dengan merespon setiap perubahan, perkembangan dan tantangan yang ada perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan di berbagai aspek dengan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur Direktorat LLAJ pada semua lini yang lebih profesional dan berwibawa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan di berbagai segi seperti sosial ekonomi masyarakat, politik/pemerintahan, teknologi, globalisasi otonomi daerah akan membawa konsekwensi logis perlunya penyesuaian, perubahan,

perbaikan dan penyempurnaan 'warna' organisasi Direktorat LLAJ agar dapat secara nyata lebih responsif/proaktif melaksanakan peranannya baik di dalam pembinaan, pengaturan pengawasan dan advisory di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dengan demikian secara institusional Direktorat LLAJ dari waktu ke waktu dapat terus meningkatkan kinerjanya.

2. Perkembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Jaringan Jalan

1). Peranan Jalan

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Tabel 4.2

ASET JALAN & JBT NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
DAN JUMLAH PENDUDUK/LUAS WILAYAH

Pulau	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	PDRB per Tahun 2004	Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km) (Total)	ASPEK AKSESIBILITAS	ASPEK MOBILITAS
				Tol	Nasional	Propinsi	Kabupaten		Indeks Aksesibilitas (Km/Km^2)	Indeks Mobilitas (Km/1000 penduduk)
SUMATERA	48,468,345	446,732	48,894,967.60	43	10,589	16,398	99,739	126,769	0.28	2.62
JAWA	130,401,500	129,306.48	219,012,889.67	628	5,119	9,072	70,838	85,647	0.66	0.66
BALI	3,466,800	5,449.37	28,986,596.00	0	502	883	5,576	6,960	1.28	2.01
NUSA TENGGARA	8,736,700	65,847	35,532,285.00	0	1,875	4,703	18,031	24,609	0.37	2.82
KALIMANTAN	13,107,100	507,412	205,265,513.00	0	5,706	5,545	31,376	42,627	0.08	3.25
SULAWESI	16,662,032	193,847	92,010,735.00	18	7,092	7,428	41,404	55,941	0.29	3.36
MALUKU PAPUA	5,012,079	503,371	41,972,016.00	0	3,747	4,652	21,221	29,620	0.06	5.91
TOTAL	225,854,556	1,851,964	2,082,000,000	688	34,629	48,681	288,185	372,173	0.20	1.65

Sumber : Kem. Pekerjaan Umum

2). Kelas Jalan

Ruas-ruas jalan di Pulau Jawa ditetapkan sebagai jalan kelas II, IIIA, IIIB, dan IIIC dengan muatan sumbu terberat jalan masing-masing adalah 10,0 ton untuk jalan kelas II dan 8 ton untuk jalan kelas IIIA, IIIB dan IIIC. Penetapan kelas jalan tersebut didasarkan atas pertimbangan ketentuan kelas jalan dan kemampuan jaringan prasarana jalan yang ada. Selain di

Pulau Jawa, Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Propinsi Bali, NTB, Maluku Utara, Papua.

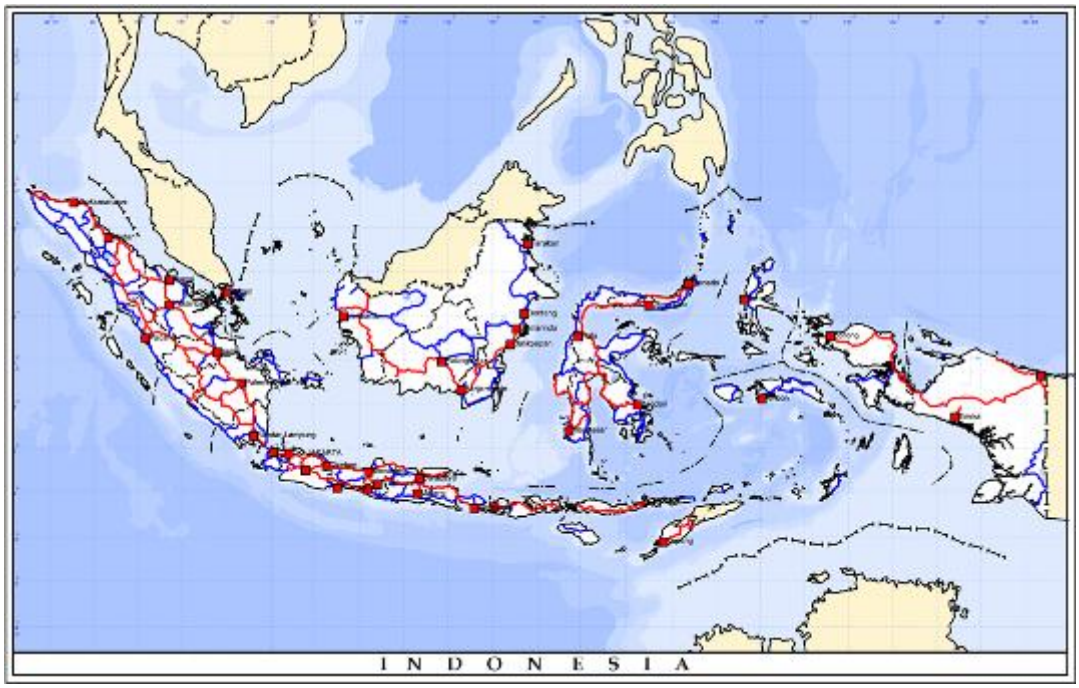

Gambar 4.4. Sistem Jaringan Jalan Nasional

3). Simpul Jaringan Transportasi Jalan Terminal Penumpang Tipe A

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubdat No. SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 telah ditetapkan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal penumpang Type A diseluruh Indonesia sebanyak 203 simpul.

b. Jaringan Trayek

1) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Pariwisata

Sebagai titik tolak pelayanan angkutan umum antar kota antar Propinsi, Ditjen Hubdat dengan SK. No. 1200/AJ.205/DRJD/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia. Posisi bus AKAP pada tahun 2010 sebanyak 20.802 unit bus dengan 866 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 21.157 unit bus dengan 883 perusahaan otobus. Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2010 sebanyak 11.933 unit bus dengan 959 perusahaan otobus, mengalami

peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 14.897 unit bus dengan 1.082 perusahaan otobus.

Tabel 4.3. Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2011

No.	Propinsi	AKAP		Pariwisata	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	18	621	1	20
2	Sumatera Utara	41	1.185	22	165
3	Sumatera Barat	61	841	13	89
4	Riau	22	376	14	105
5	Jambi	35	501	4	26
6	Sumatera Selatan	31	559	8	52
7	Bengkulu	19	301	5	49
8	Lampung	26	565	19	163
9	Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	8	119
11	DKI Jakarta	68	3.670	106	4.339
12	Jawa Barat	116	3.789	159	1.653
13	Jawa Tengah	141	3.823	198	1.709
14	DI. Yogyakarta	28	509	42	509
15	Jawa Timur	64	1.863	167	1.035
16	Banten	47	1.013	40	670
17	Bali	12	165	131	1.083
18	NTB	10	119	4	46
19	NTT	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	3	28	13	29
21	Kalimantan Tengah	24	158	-	-
22	Kalimantan Selatan	22	155	-	-
23	Kalimantan Timur	5	74	1	2
24	Sulawesi Utara	8	50	1	2
25	Sulawesi Tengah	22	120	3	68
26	Sulawesi Selatan	32	267	-	-
27	Sulawesi Tenggara	1	8	-	-
28	Gorontalo	9	42	-	-
29	Sulawesi Barat	1	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-
Jumlah		**866**	**20.802**	**959**	**11.933**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Jumlah Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan, yang disebabkan diantarannya karena usaha pemerintah dalam melakukan pengalihan-pengalihan izin trayek dari perusahaan yang sudah tidak operasional kepada perusahaan lain, hal tersebut dalam rangka banyaknya perusahaan autobus yang mengembangkan usaha angkutannya.

Sedangkan untuk angkutan pariwisata sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan permintaan yang terus meningkat dan jumlah pengajuan permohonan perizinan angkutan pariwisata juga bertambah.

2) Trayek Pengangkutan Alat Berat dan B3

Pada tahun 2011 jumlah perusahaan Pengangkutan Alat Berat yang telah disetujui sebanyak 244 perusahaan dengan jumlah kendaraan 1.180 unit kendaraan. Sedangkan untuk jumlah perusahaan angkutan B3 sebanyak 1.004 perusahaan dengan jumlah kendaraan sebanyak 5.414 unit kendaraan.

Tabel 4.4. Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2011

No.	Bulan	Alat Berat		B3	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Januari	12	124	48	197
2	Februari	5	10	44	153
3	Maret	17	78	71	416
4	April	33	150	100	480
5	Mei	31	117	124	819
6	Juni	23	117	68	395
7	Juli	19	129	95	498
8	Agustus	16	68	66	289
9	September	13	76	42	302
10	Oktober	22	93	134	844
11	Nopember	14	53	87	409
12	Desember	39	165	125	612
Jumlah		**244**	**1.180**	**1.004**	**5.414**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

3) Trayek Angkutan Jalan Perintis

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Sk.3757/AJ.204/DRJD/2010 Tanggal 26 Nopember 2010 tentang Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2011.

Sedangkan untuk pengadaan jumlah bus perintis pada tahun 2009 sebanyak 78 unit bus, mengalami penurunan pada tahun 2010 sebanyak 37 unit bus atau mengalami penurunan sebesar 52,56%

4) Trayek Lintas Batas Negara

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya beberapa telah ditetapkan dan dilayani dengan moda

transportasi jalan dan beberapa masih dalam proses perundingan kesepakatan.

Lintas Batas Negara yang telah dilayani :

a). Pontianak-Kuching

Berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), sejak tanggal 2 Januari 1993 dioperasikan perusahaan dan jumlah kendaraan umum untuk trayek Pontianak-Kuching sebagai berikut:

Tabel 4.5. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili Kuching untuk melayani trayek Kuching- Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Sri Tebekang	3 eksekutif	3	36
2	Kirata	3 eksekutif	3	36
3	Saphire Pacific	3 eksekutif	3	36
4	Eva Transport	5 eksekutif	5	36
5	Sri Merah	3 eksekutif	3	36
6	Bintang Jaya Ekspres	3 eksekutif	3	40
Jumlah		**20 eksekutif**	**20**	**220**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.6. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Perum DAMRI Pontianak	7 eksekutif	7	30
2	PT. Andau Kapuas	2 eksekutif	3	36
3	PO Setia Jiwana Sakti	10 eksekutif	10	36
Jumlah		**19 eksekutif**	**20**	**102**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

b). Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching

Uji coba Angkutan Lintas Batas Negara Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching dilakukan sejak tanggal 16 November 2008 dan Launcing pada tanggal 15 Januari 2009. Trayek tersebut dilayani sebanyak 16 (enam belas) unit bus ditambah 2 (dua) unit bus cadangan dengan data sebagai berikut :

(1) Perusahaan ALBN dari Indonesia, terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu Perum DAMRI (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan dan PO. Setia Jiwana Sakti (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan.

(2) Perusahaan ALBN dari Bandar Seri Begawan, dengan perusahaan ADBH Sdn.Bdn (4 unit bus) dan Syakirah Murni Hajisaban TS (1 unit bus)

(3) Perusahaan ALBN dari Kuching (Malaysia), terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu Syarikah Eva Ekspress (1 unit bus), Syarikah Bintang Jaya Ekspress (1 unit bus) dan Syarikah Biaramas Ekspress (1 unit bus).

c). Indonesia - Papua New Guinea (Jayapura-Vanimo) masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

Indonesia – Timor Leste masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

5) Angkutan Tidak Dalam Trayek

Sesuai KM 84 Tahun 1999, disamping adanya angkutan dalam trayek terdapat pula angkutan tidak dalam trayek, meliputi: taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

6) Untuk angkutan taksi dan angkutan khusus pengaturan izin operasinya oleh Walikota untuk dalam kota dan oleh Gubernur untuk angkutan lebih dari satu kota. Disamping mempunyai kewenangan untuk memberikan izin trayek bis AKAP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Direktur LLAJ mempunyai kewenangan pula kewenangan untuk memberikan izin angkutan tidak dalam trayek meliputi: taxi bandara, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

3. Perkembangan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Direktorat LLAJ. Dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011, dari 504 kabupaten/kota terdapat 269 Kabupaten/Kota yang belum mempunyai peralatan uji kendaraan bermotor. Sedangkan 235 Kabupaten/Kota telah memiliki peralatan uji baik berupa peralatan uji statis, keliling, atau keduanya dengan rincian sebagai berikut :

1) **301** unit uji statis
2) **46** unit uji keliling
3) **269** unit uji non mekanik

b. Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.

Selama tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak 683 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7. Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Sepeda motor	147
2.	Kendaraan bermotor roda 3	4
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	460
4.	Landasan kendaraan bermotor	72
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	238
	TOTAL	**921**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Sementara itu untuk penerbitan Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor diterbitkan sebanyak 665 buah.

Untuk tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak 242.775 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut :

Tabel 4.8. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching

No	Bulan	Stok	Total Pengeluaran SRUT subdit SAJ		
			SRUT Keluar	Rusak	Total
1.	Januari	48.752	12.058	208	12.266
2.	Februari	36.486	16.219	255	16.474
3.	Maret	20.012	20.913	143	21.056
4.	April	23.956	20.527	297	20.824
5.	Mei	78.132	35.917	99	36.016
6.	Juni	42.116	15.567	121	15.688
7.	Juli	26.428	15.487	96	15.556
8.	Agustus	35.872	26.083	26	26.109
9.	September	59.763	27.909	52	27.961
10.	Oktober	31.802	5.689	96	5.785
11.	November	26.017	29.167	63	29.230
12.	Desember	11.787	15.705	105	15.810
Total Keseluruhan		441.123	241.241	1.561	242.775

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

a. Jembatan Timbang

Pada tahun anggaran 2009 telah dilakukan rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang di 4 (empat) lokasi yaitu Lampung, Sumedang, Cilacap, dan Lamongan dan juga dibangun sistem informasi/konektivitas jaringan di 3 (tiga) lokasi jembatan timbang yaitu JT.Jabar, Jateng dan Jatim. Dan untuk tahun anggaran 2010 juga telah dilakukan rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang di 2 (dua) lokasi yaitu diPropinsi Sulawesi selatan (Macoppa) dan Sulawesi Tenggara (Kolaka). Selain itu juga pada tahun 2010 dilakukan monitoring dan penilaian terhadap kinerja jembatan timbang dan inventarisasi jembatan timbang yang berada diseluruh pulau jawa yang hasilnya dapat dilihat pada website www. jembatantimbang.web.id.

Tabel. 4.9. Jumlah Pelanggaran di Jembatan Timbang

Propinsi	Jumlah Ditimbang	Pelanggaran Terhadap JBI (KEND)				Tindakan		
		5 - 25 %	25 - 50 %	50 - 60 %	> 60 %	Pengembalian Kendaraan	Penurunan Muatan	Surat Tilang
BANTEN	-	46.259	46.515	1177	-	874	-	305
JATENG	3.003.008	295.007	342.606	-	-	27.571	5.805	33.242
DIY	33.751	3711	1508	81	340	484	-	572
TOTAL	**3.036.759**	**344.977**	**390.629**	**1.258**	**340**	**28.929**	**5.805**	**34.119**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan Penyidik Negeri Sipil Bidang LaLu Lintas dan Angkutan (PPNS LLAJ)

a. Pelanggaran Operasional

Jumlah pelanggaran operasional pada tahun 2011 sebanyak 13432 kendaraan dengan jumlah kendaraan yang melanggar sebanyak 3.242 Kendaraan sehingga prosentase tingkat pelanggaran sebesar 24,14 %. Untuk selengkapnya jumlah pelanggaran operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat pada table 4.10 dan 4.11

Tabel 4.10. Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2011

NO	PROVINSI	JUMLAH KEND. DIPERIKSA	JUMLAH KEND. MELANGGAR	PROSENTASE PELANGGARAN
1	Nangroe Aceh Darussalam	446	71	15,92%
2	Sumatera Utara	2.113	853	40,37%
3	Kepulauan Riau	75	42	56%
4	Riau	122	44	36,7%
5	Jambi	Tidak ada data	13	-
6	Bengkulu	223	64	28,7%
7	Bangka Belitung	75	8	10,67
8	Sumatera Barat	664	188	28,31%
9	Sumatera Selatan	696	145	20,83%
10	Lampung	564	96	17,01%
11	Banten	615	114	18,54%
12	DKI Jakarta	Tidak ada data	177	-
13	Jawa Barat	2.340	491	20,98%
14	Jawa Tengah	625	106	16,96
15	D.I Yogyakarta	457	57	12,47%
16	Jawa Timur	229	64	27,95%
17	Kalimantan Timur	20	0	0
18	Kalimantan Tengah	90	49	54,44%
19	Kalimantan Selatan	326	32	9,82%
20	Kalimantan Barat	314	61	19,43%
21	Sulawesi Selatan	778	57	7,33%
22	Sulawesi Utara	375	116	30,93%
23	Sulawesi Tengah	Tidak ada data	Tidak ada data	-
24	Sulawesi Barat	811	263	32,43%
25	Sulawesi Tenggara	424	63	14,86%
26	Gorontalo	173	34	19,65%
27	Bali	Tidak ada data	55	-
28	NTB	35	7	20%
29	NTT	161	78	48,45%
30	Maluku	176	84	47,73%
31	Maluku Utara	505	55	10,89%
32	Papua Barat	Tidak ada data	Tidak ada data	-
33	Papua	Tidak ada data	Tidak ada data	-
	Jumlah total	13.432	3.242	24,14%

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.11 Jumlah Pelanggaran Perijinan, Operasional dan Persyaratan Teknis Laik Jalan

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
A.	**Pelanggaran Perizinan dan Operasional**						
1	Dokumen perizinan palsu	-	-	-	10	6	54
2	Tidak ada dokumen perizinan/Masa berlaku dokumen perizinan habis	35	63	75	509	497	1033
3	Nama PO tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	-	-	36	1	30
4	Nomor kendaraan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	-	-	3	0	10
5	Trayek yang dilayani tidak sesuai dengan dokumen perizinan	422	80	98	105	98	284
6	Waktu pelayanan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	-	-	76	13	6
7	Belum melunasi asuransi kecelakaan Jasa Raharja	-	-	-	163	143	491
8	Menggunan izin insidentil	-	-	-	56	48	10
9	Pelanggaran perizinan dan operasional lainnya	4	-	41	50	41	91
B.	**Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan**						
1	Buku Uji Palsu	-	-	-	2	0	8
2	Tidak ada buku uji/masa berlaku uji habis	2	60	56	190	176	408
3	Jumlah tempat duduk tidak sesuai dengan buku uji	-	-	-	2	0	118
4	Tidak ada sabuk keselamatan	-	-	-	20	20	380
5	Ttidak ada alat pemadam kebakaran	-	-	-	9	51	196
6	Tidak ada pintu keluar darurat	-	-	-	7	47	970
7	Tidak ada Petunjuk keluar darurat	-	-	-	18	53	958
8	Tidak ada pemecah kaca	-	-	-	68	41	969
9	Tida ada petunjuk pemecah kaca	-	-	-	54	49	951
10	Pelanggaran persyaratan Teknis dan Laik Jalan lainnya	4	-	41	-	13	598
C.	**Pelanggaran Pemeriksaan Muatan Lebih**						
1	Pelanggaran Teknis Kendaraan	0	0	0	0	0	797
2	Pelanggaran Operasi/Muatan	0	0	0	0	0	267
	Total	467	203	311	1378	1297	**8629**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2011 adalah 2.391 orang. Yang terdiri dari 57 orang PPNS yang ada di Ditjen Perhubungan Darat (pusat) dan 2.334 PPNS yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota (daerah). Untuk data PPNS daerah dapat dihimpun dari 33 Propinsi.

Tabel 4.12. Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2007 - 2011

No	Provinsi	Jumlah PPNS LLAJ				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pusat (Kementerian Perhubungan)	49	54	57	**57**	**57**
2	Nangroe Aceh Darussalam	63	28	43	**43**	**52**
3	Sumatera Utara	143	146	152	**152**	**167**
4	Kepulauan Riau	3	5	6	**6**	**8**
5	Riau	21	54	69	**69**	**79**
6	Jambi	21	21	27	**27**	**36**
7	Bengkulu	6	11	15	**17**	**17**
8	Bangka Belitung	15	14	18	**18**	**19**
9	Sumatera Barat	119	123	128	**128**	**131**
10	Sumatera Selatan	95	108	124	**124**	**132**
11	Lampung	73	68	68	**68**	**70**
12	Banten	57	70	72	**72**	**84**
13	Dki Jakarta	101	128	117	**117**	**117**
14	Jawa Barat	77	165	183	**183**	**196**
15	Jawa Tengah	219	220	243	**243**	**255**
16	DI Yogyakarta	102	108	109	**109**	**110**
17	Jawa Timur	361	417	432	**432**	**435**
18	Kalimantan Timur	4	9	12	**12**	**16**
19	Kalimantan Tengah	34	38	42	**42**	**47**
20	Kalimantan Selatan	7	10	15	**15**	**19**
21	Kalimantan Barat	-	-	12	**12**	**18**
22	Sulawesi Selatan	27	37	43	**43**	**54**
23	Sulawesi Utara	24	19	22	**22**	**33**
24	Sulawesi Tengah	22	33	37	**37**	**42**
25	Sulawesi Barat	9	8	13	**13**	**16**
26	Sulawesi Tenggara	6	4	10	**10**	**11**
27	Gorontalo	9	16	17	**17**	**19**
28	Bali	7	10	11	**11**	**12**
29	NTB	10	17	19	**19**	**20**
30	NTT	47	51	54	**54**	**57**
31	Maluku	7	10	11	**11**	**11**
32	Maluku Utara	1	37	3	**3**	**4**
33	Papua Barat	4	1	5	**5**	**6**
34	Papua	31	4	40	**40**	**41**
Total		**1774**	**2044**	**2229**	**2229**	**2391**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

c. Penjatuhan Sanksi Administratif

Adapun untuk Jumlah Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif pada tahun 2011 (1431 H) sebanyak 58 unit bus dengan 22 perusahaan otobus. Untuk perincian dapat dilihat pada tabel IV.13

Tabel 4.13. Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif Tahun 2006-2011

No.	Tahun	Jumlah Sanksi	
		PO	BUS
1	2006 (1427 H)	26	39
2	2007 (1428 H)	16	19
3	2008 (1429 H)	25	40
4	2009 (1430 H)	22	32
5	2010 (1431 H)	22	32
6	2011 (1432 H)	22	58

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.14. Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2011
Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP

No.	Propinsi	Jumlah PO Penerima Sanksi
1	DKI Jakarta	2
2	Jawa Barat	10
3	Jawa Tengah	7
4	Jawa Timur	2
5	Jambi	1
Total		**22**

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2011

5. Kegiatan-kegiatan Strategis

a. Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident, terdiri dari kegiatan :
   1) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ;
   2) Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
   3) Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi /Tipe;
   4) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
   5) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   6) Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan.

b. Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan, terdiri dari kegiatan :
   1) Pembangunan Terminal Transportasi Jalan;
   2) Pembangunan Jembatan Timbang;

c. Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :
   1) Rehabilitasi Simpul LLAJ;
   2) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ;
   3) Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ;
   4) Kontingensi Bencana Alam;

5) Alat Kinerja Angkutan Jalan.

d. Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :

1) Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani;

2) Pengadaan Bus Perintis;

3) Paket Penunjang Operasional Keperintisan.

B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Umum

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelago) terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh selat – selat serta juga memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari, tentunya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakatnya.

Angkutan SDP memungkinkan terjadinya kegiatan interaksi sosial budaya antar daerah dan wilayah, mendukung kegiatan ekonomi (industri, perdagangan, pemasaran, pertanian, dsb), serta secara politis dapat mendukung sistem keamanan dan ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya kesatuan ekonomi dan politik wilayah nasional Indonsia.

ASDP sebagai penyelenggara jasa angkutan umum mempunyai fungsi dan peran menyediakan jasa angkutan kendaraan (barang) dan penumpang, baik secara inter moda maupun intra moda transportasi. Khusus jasa angkutan penyeberangan, pada awalnya mempunyai fungsi menghubungkan jalur transportasi jalan raya ataupun kereta api yang terputus oleh adanya perairan danau, sungai, dan selat, sehingga dulu sering disebut jembatan penyeberangan. Tetapi di era sekarang fungsi penyeberangan telah berubah menjadi moda transportasi perairan dengan jarak tidak terbatas, tetapi pada umumnya masih bersifat *point to point services*.

Angkutan Sungai dan Danau diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh moda angkutan lainnya. Disamping itu angkutan sungai dan danau juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang relatif besar.

Peranan angkutan sungai dan danau telah nyata dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Namun potensi angkutan sungai dan danau yang sesungguhnya jauh lebih besar, belum termanfaatkan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan umum bidang angkutan sungai dan danau diarahkan untuk mengembangkan potensi angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi darat yang dapat menghubungkan pelosok daratan, dengan mewujudkan keselamatan, dan menciptakan penyelengaraan angkutan sungai dan danau yang tertib lalu lintas dan administrasi.

2. Perkembangan Prasarana LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Lintas Penyeberangan

Sejak pertama kali ditetapkannya lintas penyeberangan pada tahun 1989, melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sebanyak 44 lintas penyeberangan, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 193 lintas penyeberangan, ditambah dengan 50 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 243 lintas penyeberangan. Sedangkan lintasan yang beroperasi pada tahun 2011 sebanyak 165 lintasan dan yang belum/tidak beroperasi sebanyak 75 lintasan. Dari sisi pengoperasiannya, sebanyak 45 lintas adalah berupa lintas penyeberangan dengan angkutan komersil dan sisanya sebanyak 120 lintasan berupa lintas penyeberangan angkutan perintis.

Tabel 4.15. Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan

No.	Status Operasional Lintas	Jumlah
1.	**Jumlah lintas yang ditetapkan**	
	a. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan	193
	b. Melalui Keputusan Pemerintah Daerah	50
2.	**Status pengoperasian**	
	a. Lintasan yang beroperasi	165
	b. Lintasan yang belum dan tidak beroperasi	75
3.	**Jenis Pengoperasian angkutan**	
	a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil	45
	b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis	120

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.16. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan

No.	No. KM	Tahun	Jumlah Lintas
1	KM No. 64	1989	44
2	KM No. 25	1991	21
3	KM No. 49	1994	23
4	KM No. 33	1995	10
5	KM No. 1	1997	8
6	KM No. 13	1997	26
7	KM No. 30	1998	18
8	KM No. 43	1998	1
9	KM No. 82	1998	12
10	KM No. 66	2000	5
11	KM No. 1	2001	4
12	KM No. 58	2002	1
13	KM No. 16	2003	1
14	KM No. 71	2004	3
15	KM No. 76	2004	1
16	KM No. 38	2005	4
17	KM No. 48	2005	1
18	KM No. 69	2005	1
19	KM No. 44	2009	1
20	KP. No. 325	2009	1
21	KP. No. 436	2009	1
22	KM No. 160	2010	1
23	KM No. 213	2010	2
24	KP. No. 265	2010	1
25	KM No. 370	2010	1
26	KP N0. 232	2011	1
Jumlah			**193**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.17. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota

No.	Nama Lintas	Propinsi
1.	Singkil - P. Banyak	NAD
2.	Singkil – Sinabang	NAD
3.	Balohan – Ulheu Lheu	NAD
4.	Tebas Kuala - Tebas Seberang	Kalimantan Barat
5.	Parit Sarem – S. Nipah	Kalimantan Barat
6.	Pamatat – Patumbukan – Labuhan Bajo	Sulsel – NTT
7.	Bira – Sikeli	Sulawesi Selatan
8.	Sikeli – Tondasi	Sulawesi Selatan
9.	Wakai – Ampana	Sulawesi Tengah
10.	Bitung-Siau	Sulawesi Utara
11.	Dongkala – Bau Bau	Sulawesi Tenggara
12.	Bau Bau – Mawasangka	Sulawesi Tenggara
13.	Aimere – Waingapu	NTT
14.	Waingapu – Sabu	NTT
15.	Kalabahi – Lewoleba	NTT
16.	Saumlaki – Tepa	Maluku
17.	Dobo – Benjina	Maluku
18.	Tulehu – Pelauw	Maluku
19.	Umiputih – Waley	Maluku
20.	Tulehu – Saparua	Maluku

No.	Nama Lintas	Propinsi
21.	Saparua - Nalahia	Maluku
22.	Nalahia - Amahai	Maluku
23.	Hunimua – Masohi	Maluku
24.	Namlea - Ambalau	Maluku
25.	Ambalau - Wamsisi	Maluku
26.	Wamsisi – Namrole	Maluku
27.	Namrole - Leksula	Maluku
28.	Ternate – Bacan	Maluku Utara
29.	Ternate - Batang Dua	Maluku Utara
30.	Sorong – Seget	Irian Jaya Barat
31.	Seget – Seremuk	Irian Jaya Barat
32.	Seremuk – Konda	Irian Jaya Barat
33.	Konda – Teminabuan	Irian Jaya Barat
34.	Mogim – Kais	Irian Jaya Barat
35.	Kais – Inawatan	Irian Jaya Barat
36.	Inawatan – Kokoda	Irian Jaya Barat
37.	Bade - Mur – Kepi	Irian Jaya Barat
38.	Waren – Nabire	Papua
39.	Merauke – Atsy	Papua
40.	Atsy – Asgon	Papua
41.	Atsy – Senggo	Papua
42.	Atsy – Agat	Papua
43.	Biak – Numfor	Papua
44.	Pananaru – Siau	Sulawesi Utara
45.	Bitung – Lirung	Sulawesi Utara
46.	Bitung – Tahuna	Sulawesi Utara
47.	Bitung – Pananaru	Sulawesi Utara
48.	Bitung – Melonguane	Sulawesi Utara
49.	Bitung – Tagulandang	Sulawesi Utara
50.	Pananaru – Melonguane	Sulawesi Utara

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Berdasarkan jenis pengoperasian, lintas penyeberangan yang sudah beroperasi dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintasan komersil dan perintis yang disubsidi pemerintah. Untuk jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi sebanyak 165 lintasan yang terdiri dari lintasan komersil sebanyak 45 lintas dan lintasan perintis sebanyak 120 lintas. Lintas penyeberangan perintis yang tidak disubsidi pemerintah pusat berada di Danau Toba Provinsi Sumut yaitu, Tigaras – Simanindo, Muara – Nainggolan, dan di Provinsi Riau, Dumai – Tanjung Kapal (P. Rupat)

Tabel 4.18. Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

No.	Jenis Pengoperasian	Jumlah
a.	Lintasan komersil	45
b.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	117
c.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	3
Jumlah yang beroperasi		**165**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

1). Lintasan Komersil

Pada tahun 2011, lintas komersil sebanyak 45 lintas penyeberangan dengan rincian status yaitu : Antar Propinsi (AP) sebanyak 12 lintas dan Dalam Propinsi (DP) sebanyak 33 lintas.

Tabel 4.19. Lintas Penyeberangan Komersil

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
1	Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	17	DP	-
2	Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	80	DP	KM 82 Thn 1998
3	Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1	DP	KM 64 Thn 1989
4	Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86	DP	KM 64 Thn 1989
5	Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8	DP	KM 25 Thn 1991
6	T. Pungkur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10	DP	KM 64 Thn 1989
7	Palembang (Sumsel) – Muntok (P. Bangka, Babel)	90	AP	KM 43 Thn 1998
8	Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15	AP	KM 64 Thn 1989
9	Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2.5	DP	KM 64 Thn 1989
10	Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6	DP	KM 64 Thn 1989
11	Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80	DP	KM 64 Thn 1989
12	Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0.8	DP	KM 49 Thn 1994
13	Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6	DP	KM 49 Thn 1994
14	Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6	DP	KM 64 Thn 1989
15	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184	AP	KM 49 Thn 1994
16	Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	148	AP	KM 25 Thn 1991
17	Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95	AP	KM 25 Thn 1991
18	Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	16	DP	KM 64 Thn 1989
19	Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85	AP	KM 64 Thn 1989
20	Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52	AP	KM 13 Thn 1997
21	Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	-	AP	KM 71 Thn 2004
22	Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	16	DP	KM 64 Thn 1989
23	Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2	DP	KM 64 Thn 1989
24	Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38	AP	KM 64 Thn 1989
25	Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12	DP	KM 64 Thn 1989
26	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75	AP	KM 64 Thn 1989
27	Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40	DP	KM 64 Thn 1989
28	Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	-	DP	KM 64 Thn 1989
29	Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120	DP	KM 64 Thn 1989
30	Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137	DP	KM 64 Thn 1989
31	Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150	DP	KM 82 Thn 1998
32	Bastiong (Malut) - Sidangole (Malut)	12	DP	KM 64 Thn 1989
33	Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	16	DP	KM 82 Thn 1998
34	Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0.5	DP	KM 64 Thn 1989
35	Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13	DP	KM 64 Thn 1989
36	Tual (P. Kei Kecil, Maluku) – Elat (P. Kei Besar, Maluku)	26	DP	KM 25 Thn 1991
37	Sape (NTB) – Waikelo (P. Sumba, NTT)	70	AP	KM 30 Thn 1998
38	Padang – Tua Pejat	84	DP	KM 1 Thn 1997
39	Tayan – Terayu	1,6	DP	KM 49 Thn 194
40	Kuala Tebas – Seberang Kuala Tebas	1	DP	-
41	Bastiong – Sofifi	14	DP	-

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
42	Galala – Namlea	85	DP	KM 49 Thn 194
43	Sibolga – Teluk Dalam	99	DP	-
44	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Taipa (Sulteng)	208	AP	KM 82 Thn 1998
45	Kupang - Waingapu	232	DP	-

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

2). Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah

Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2011 sejumlah 117 lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan yang disubsidi pada tahun 2011 ini lebih banyak dibandingkan tahun 2010 sebanyak 99 lintas. Lintas penyeberangan perintis ini merupakan lintas Antar Propinsi (AP) dan Dalam Propinsi (DP). Pada tahun 2011 terdapat 15 lintas penyeberangan perintis antar Propinsi dan 115 lintas perintis dalam Propinsi.

Tabel 4.20. Lintas Penyeberangan Bersubsidi

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
1	Singkil - P. Banyak	DP	Subsidi Pemerintah
2	Singkil - Sinabang	DP	Subsidi Pemerintah
3	Singkil - G. Sitoli	AP	Subsidi Pemerintah
4	Padang - Sikakap	DP	Subsidi Pemerintah
5	Padang - Siberut	DP	Subsidi Pemerintah
6	Bengkulu - Enggano	DP	Subsidi Pemerintah
7	Karimun - Mengkapan	AP	Subsidi Pemerintah
8	Sadai - Tanjung Ru	DP	Subsidi Pemerintah
9	Manggar - Ketapang	AP	Subsidi Pemerintah
10	Jepara - Karimun Jawa	DP	Subsidi Pemerintah
11	Jangkar - Kalianget	DP	Subsidi Pemerintah
12	Jangkar - P. Sapudi	DP	Subsidi Pemerintah
13	Tanjung Harapan - Teluk Kalong	DP	Subsidi Pemerintah
14	Parit Sarem - Sungai Nipah	DP	Subsidi Pemerintah
15	Balikpapan - Taipa	AP	Subsidi Pemerintah
16	Toli Toli - Tarakan	AP	Subsidi Pemerintah
17	Tarakan - Nunukan	DP	Subsidi Pemerintah
18	Batulicin - Garongkong	AP	Subsidi Pemerintah
19	Bitung - Melonguane	DP	Subsidi Pemerintah
20	Melonguane - Lirung	DP	Subsidi Pemerintah
21	Lirung - Bitung	DP	Subsidi Pemerintah
22	Bitung - Tahuna	DP	Subsidi Pemerintah
23	Bitung - Pananaru	DP	Subsidi Pemerintah
24	Pananaru - Marore	DP	Subsidi Pemerintah
25	Bitung - Tagulandang	DP	Subsidi Pemerintah
26	Tagulandang - Siau	DP	Subsidi Pemerintah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
27	Bitung - Lembeh	DP	Subsidi Pemerintah
28	Melonguane - Mangaran	DP	Subsidi Pemerintah
29	Luwuk - Salakan	DP	Subsidi Pemerintah
30	Gorontalo - Wakai	AP	Subsidi Pemerintah
31	Wakai - Ampana	DP	Subsidi Pemerintah
32	Marissa - Dolong	AP	Subsidi Pemerintah
33	Dolong - Ampana	DP	Subsidi Pemerintah
34	Marissa - Parigi	AP	Subsidi Pemerintah
35	Luwuk - Banggai	DP	Subsidi Pemerintah
36	Banggai - Taliabu	AP	Subsidi Pemerintah
37	Taliabu - Sanana	DP	Subsidi Pemerintah
38	Banggai - Boniton	DP	Subsidi Pemerintah
39	Bira - Pattumbukan	DP	Subsidi Pemerintah
40	Pattumbukkan - Jampea	DP	Subsidi Pemerintah
41	Jampea - Labuhan Bajo	AP	Subsidi Pemerintah
42	Kendari - Lenggara	DP	Subsidi Pemerintah
43	Bau Bau - Dongkala	DP	Subsidi Pemerintah
44	Dongkala - Mawasangka	DP	Subsidi Pemerintah
45	Kamaru - Wanci	DP	Subsidi Pemerintah
46	Waingapu - Sabu	DP	Subsidi Pemerintah
47	Waingapu - Aimere	DP	Subsidi Pemerintah
48	Larantuka - Waiwerang	DP	Subsidi Pemerintah
49	Waiwerang - Lewoleba	DP	Subsidi Pemerintah
50	Lewoleba - Baranusa	DP	Subsidi Pemerintah
51	Baranusa - Kalabahi	DP	Subsidi Pemerintah
52	Kalabahi - Teluk Gurita	DP	Subsidi Pemerintah
53	Kupang - Ende	DP	Subsidi Pemerintah
54	Ende - Waingapu	DP	Subsidi Pemerintah
55	Kupang - Lewoleba	DP	Subsidi Pemerintah
56	Tolehu - Kailolo	DP	Subsidi Pemerintah
57	Kailolo - Umiputih	DP	Subsidi Pemerintah
58	Umiputih - Wailey	DP	Subsidi Pemerintah
59	Tulehu - Umiputih	DP	Subsidi Pemerintah
60	Umiputih - Nalahia	DP	Subsidi Pemerintah
61	Nalahia - Amahai	DP	Subsidi Pemerintah
62	Namlea - Sanana	AP	Subsidi Pemerintah
63	Sanana - Mangole	DP	Subsidi Pemerintah
64	Galala - Ambalau	DP	Subsidi Pemerintah
65	Ambalau - Wamsisi	DP	Subsidi Pemerintah
66	Wamsisi - Namrole	DP	Subsidi Pemerintah
67	Namrole - Leksula	DP	Subsidi Pemerintah
68	Tual - Larat	DP	Subsidi Pemerintah
69	Tual - Tayandu	DP	Subsidi Pemerintah
70	Tayandu - Kur	DP	Subsidi Pemerintah
71	Tual - Dobo	DP	Subsidi Pemerintah
72	Dobo - Benjina	DP	Subsidi Pemerintah
73	Dobo - Tabarfane	DP	Subsidi Pemerintah
74	Tual - Tam	DP	Subsidi Pemerintah
75	Tam - Tayando	DP	Subsidi Pemerintah
76	Saumlaki - Adaut	DP	Subsidi Pemerintah
77	Adaut - Letuwurung	DP	Subsidi Pemerintah
78	Saumlaki - Seira	DP	Subsidi Pemerintah
79	Seira - Wunlah	DP	Subsidi Pemerintah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
80	Wunlah - Larat	DP	Subsidi Pemerintah
81	Larat - Yaru	DP	Subsidi Pemerintah
82	Yaru - Momar	DP	Subsidi Pemerintah
83	Tobelo - Daruba	DP	Subsidi Pemerintah
84	Tobelo - Subaim	DP	Subsidi Pemerintah
85	Bastiong - Batang 2	DP	Subsidi Pemerintah
86	Bastiong - Babang	DP	Subsidi Pemerintah
87	Goto - Sofifi	DP	Subsidi Pemerintah
88	Sorong - Saonek	DP	Subsidi Pemerintah
89	Saonek - Waisai	DP	Subsidi Pemerintah
90	Waisai - Kabarai	DP	Subsidi Pemerintah
91	Sorong - Linmalas	DP	Subsidi Pemerintah
92	Linmalas - Waigama	DP	Subsidi Pemerintah
93	Sorong - Folley	DP	Subsidi Pemerintah
94	Folley - Harapan Jaya	DP	Subsidi Pemerintah
95	Sorong - Teminabuan	DP	Subsidi Pemerintah
96	Teminabuan - Mugim	DP	Subsidi Pemerintah
97	Mugim - Kais	DP	Subsidi Pemerintah
98	Kais - Inanwatan	DP	Subsidi Pemerintah
99	Inanwatan - Kokoda	DP	Subsidi Pemerintah
100	Patani - Sorong	AP	Subsidi Pemerintah
101	Biak - Serui	DP	Subsidi Pemerintah
102	Serui - Waren	DP	Subsidi Pemerintah
103	Waren - Nabire	DP	Subsidi Pemerintah
104	Biak - Manokwari	AP	Subsidi Pemerintah
105	Manokwari - Numfor	AP	Subsidi Pemerintah
106	Merauke - Kimam	DP	Subsidi Pemerintah
107	Kimam - Bade	DP	Subsidi Pemerintah
108	Bade - Gatentiri	DP	Subsidi Pemerintah
109	Gatentiri - Tanah Merah	DP	Subsidi Pemerintah
110	Bade - Moor	DP	Subsidi Pemerintah
111	Moor - Kepi	DP	Subsidi Pemerintah
112	Merauke - Agats	DP	Subsidi Pemerintah
113	Agats - Pomako	DP	Subsidi Pemerintah
114	Agats - Sawaerma	DP	Subsidi Pemerintah
115	Langgur - Elat	DP	Subsidi Pemerintah
116	Langgur - Hollat	DP	Subsidi Pemerintah
117	Langgur - Weduar	DP	Subsidi Pemerintah
118	Tigaras - Simanindo	DP	Subsidi Pemda
119	Muara – Nainggolan	DP	Subsidi Pemda
120	Dumai – Tanjung Kapal	DP	Subsidi Pemda

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi, DK : Dalam Kab/Kota

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

b. Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2011, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 150 pelabuhan. Pelabuhan tersebut diselenggarakan oleh PT. ASDP

Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 34 pelabuhan, Dinas Perhubungan sebanyak 113 pelabuhan, UPT Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 3 pelabuhan. Dan sisanya sebanyak 33 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Tabel 4.21. Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan

No.	Penyelenggara	Jumlah
1.	PT. ASDP Persero	34
2.	Dinas Perhubungan	113
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	3
4.	Dalam Proses Pembangunan	33
Jumlah		**183**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.22. Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP

No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani
1.	Bakauheni	Merak-Bakauheni
2.	Merak	Idem
3.	Ujung	Ujung-Kamal
4.	Kamal	Idem
5.	Ketapang	Ketapang-Gilimanuk
6.	Gilimanuk	Idem
7.	Padangbai	Padangbai-Lembar
8.	Lembar	Idem
9.	Khayangan	Kahayangan-Pototano
10.	Pototano	Idem
11.	Sape	Sape – Labuhan Bajo
12.	Labuhan Bajo	Idem
13.	Larantuka	Larantuka-Kalabahi
14.	Rote	Kupang-Rote
15.	Bolok	Kupang-Rote Dsn
16.	Telaga Pungkur	Telaga Pungkur–Tj. Uban
17.	Tj. Uban	Idem

No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani
18.	Batu Licin	Batulicin-Tj. Serdang
19.	Tj. Serdang	Idem
20.	Penajam	Penajam-Kariangau
21.	Bitung	Bitung-Ternate
		Bitung – Melonguane
		Bitung – Siau
		Bitung – P. Lembeh
		Bitung – Pananaru
		Bitung – Batang Dua
22.	Pagimana	Pagimana-Gorontalo
23.	Mamuju	Mamuju-Balikpapan
24.	Bajoe	BajoE-Kolaka
25.	Kolaka	Idem
26.	Bastiong	Bastiong-Sidangole
27.	Sidangole	Idem
28.	Bastiong	Bastiong-Rum
29.	Pokka	Pokka-Galala
30.	Galala	Idem
31.	Hunimua	Hunimua-Waipirit
32.	Waipirit	Idem
33.	Namlea	Namlea-Galala
34.	Muntok	Palembang-Muntok

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

c. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Kedua jaringan tersebut dapat dilakukan dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan tidak dalam trayek.

Tabel 4.23. Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau

No.	Propinsi	Sungai			Danau	
		Jml	Pjg (km)	Navigable	Jml	Luas (km2)
1	NAD	10	1.749	660	1	490
2	Sumatera Utara	20	1.796	1.269	1	1.250
3	Sumatera Barat	-	-	-	4	391
4	Riau	21	2.747	2.082	-	-
5	Jambi	19	3.858	2.578	1	50
6	Sumatera Selatan	35	4.856	3.771	1	122
7	Lampung	8	695	530	-	-
8	Jawa Barat	1	122	22	3	205
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	600
10	Jawa Timur	1	500	39	-	-
11	Bali	-	-	-	2	190
12	Kalimantan Barat	11	1.227	760	-	-
13	Kalimantan Selatan	15	1.737	1.223	1	40
14	Kalimantan Timur	17	4.089	2.786	3	390
15	Kalimantan Tengah	21	3.108	2.285	-	-
16	Sulawesi Selatan	9	548	222	4	120
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	34
18	Sulawesi Tenggara	2	175	87	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	2	33
20	Irian Jaya	24	734	4.940	3	372
Jumlah		**214**	**34.342**	**23.255**	**27**	**3.737**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

d. Dermaga Sungai dan Danau.

Jumlah dermaga sungai dan danau lebih kurang 99 buah, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah.

3. Perkembangan Sarana LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Kapal Penyeberangan

Sampai dengan tahun 2011 terdapat 242 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro, LCT, dan kapal cepat penumpang.

Tabel 4.24. Jumlah Kapal SDP yang beroperasi

No.	Jenis Kapal	Jumlah
1.	Kapal Ro-Ro	228
2.	Kapal LCT	12
3.	Kapal cepat penumpang	2
4.	Kapal penumpang/bus air	-
Jumlah		**242**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 242 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), swasta dan Pemda.

Tabel 4.25. Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan Kepemilikan

No.	Pemilik/operator	Jumlah
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	115
2.	Kerja Sama Operasi (KSO)	-
3.	Swasta	121
4.	Pemda	6
Jumlah		**242**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Subsidi kapal perintis pada tahun 2010 sebesar Rp. 101.550.000.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 100 lintas dan total frekuensi penyeberangan 19.523 trip.

Tabel 4.26. Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis	Total Frekuensi Penyeberangan	Nilai Subsidi (Juta Rupiah)
2005	64	23.022	46.334
2006	62	14.160	73.208
2007	72	26.491	85.799
2008	72	24.869	85.303
2009	82	28.779	139.874
2010	100	19.523	101.550

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.27. Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai

No.	Jenis	Isi Kotor (m^3)	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
			Brg(ton)	Penump.			
1	Speed Boat	1-5	-	<14	0.35-0,60	<200	<40
2	Long Boat	5-10	-	<60	0,40-0,60	<85	20-30
3	Bis Air	<200	<10	<200	0,80-1,50	75-100	12-15
4	Klotok	<15	<5	-	0,50-0,65	5-15	7-12
5	Truk Air	15-200	20-70	-	1,00-1,60	22-33	7-8
6	Barge Steel Hull	50-190	50-150	-	1,00-1,60	-	-
7	Barge (tiung)	20-50	15-35	-	1,00-1,60	-	-
8	Tug Boat	20-50	-	-	0,80-1,40	<100	30-60

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.28. Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan

No.	Kapal RO-RO	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (knot)
		Kndrn	Penump.			
1	75 GT	4	50	1,9	350	10
2	200 GT	5	50	1,9	700	10
3	300 GT	15	80	2,0	1200	7
4	500 GT	19	202	2,15	1600	11
5	600 GT	21	214	2,15	1650	10
6	1500 GT	32	390	2,8	3200	15

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan

a. Produksi Angkutan Penyeberangan

Tabel 4.29. Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005 – 2011

Tahun	Penumpang (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	Barang (ton)
2005	26.501.889	6.272.819	4.719.152	25.187.160
2006	27.829.666	5.738.196	5.037.859	25.422.005
2007	40.557.832	5.720.396	6.154.104	31.936.937
2008	46.926.166	6.850.114	7.374.333	41.079.174
2009	54.585.603	6.224.249	6.799.229	41.802.355
2010	54.858.531	6.255.370	6.833.225	211.453
2011	53.853.016	7.261.611	5.677.922	96.997

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

b. Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas

Tabel 4.30. Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas Tahun 2011

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
1	**Merak - Bakauheni**	54,339	16,384,345	519,417	2,912,205	0
	Merak - Bakauheni (Kapal Cepat)	1,636	116,292	0	0	0
2	Ujung - Kamal	37,089	3,916,748	1,634,344	1,898,419	2,282
3	Ketapang - Gilimanuk	126,019	11,188,940	1,007,940	1,710,023	0
4	Padangbai - Lembar	14,064	1,432,606	209,027	221,811	0
5	Kayangan - Pototano	21,231	48,660	190,467	378,297	0
6	Balikpapan - Penajam	28,426	121,324	229,616	421,355	0
7	Balikpapan - Mamuju	0	0	0	0	0
8	Bajo'e - Kolaka	2,544	473,101	27,093	44,671	0
9	Palembang - Muntok	2,065	86,474	11,850	26,294	0
10	Jangkar - Kalianget	0	0	0	0	0
11	Bira - Pamatata	1,312	24,551	29,834	20,046	0
12	Siwa - Lasusua	433	18,249	2,203	4,521	0
13	Poka - Galala	6,249	85,536	57,745	10,339	0
14	Hunimua - Waipirit	5,778	236,430	128,794	29,736	0

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
15	Galala - Namlea	311	17,518	2,798	687	0
16	Kupang - Larantuka	109	19,292	1,955	917	0
17	Kupang - Rote	362	42,038	15,261	3,355	0
18	Kupang - Sabu	158	33,283	4,631	367	0
19	Kupang - Aimere	85	19,211	1,986	425	0
20	Kupang - Kalabahi	190	59,291	4,684	465	0
21	Kupang - Waingapu	189	8,509	793	279	0
22	Sibolga - Gunung Sitoli (P. Nias)	653	169,647	7,781	8,695	0
23	Balohan - Ulheu lheu	1,057	293,608	78,214	23,564	42,123
24	Kota - Siantan	0	0	0	0	0
25	Rasau Jaya - Teluk Batang	0	0	0	0	0
26	Batu Licin - Tanjung Serdang	18,441	92,760	266,349	151,130	0
27	Bau Bau - Wara	5,519	419,543	162,126	46,526	70,962
28	Torobulu - Tampo	2,111	215,084	64,641	21,069	33,650
29	Pagimana - Gorontalo	344	86,618	5,634	2,775	0
30	Sape - Labuhan Bajo	801	49,824	3,913	8,987	5,608
31	Bitung - Ternate (Bastiong)	2,494	248,383	66,464	25,950	4,450
32	Bastiong - Sidangole	370	19,844	4,649	2,922	267
33	Bastiong - Rum (P. Tidore)	1,336	76,393	31,386	12,573	0
Jumlah I **		**335,715**	**36,004,102**	**4,771,595**	**7,988,403**	**159,342**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

*** : Tidak termasuk produksi kapal cepat*

c. Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis Seluruh Lintas

Tabel 4.31. Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis Seluruh Lintas Tahun 2011

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
Lintas Perintis Antar Propinsi						
1	Balikpapan - Taipa	181	7,555	480	1,620	0
2	Tarakan – Toli Toli	76	5,752	158	28	0
3	Singkil – Gn. Sitoli	18	271	16	18	0
4	Pattumbukan - Labuhan Bajo	84	291	29	5	0
5	Gorontalo - Wakai	170	16,648	612	92	0
6	Numfor - Manokwari	88	11,463	173	10	0
7	Biak - Manokwari	258	28,111	785	102	0
8	Bira - Labuhan Bajo	82	4,155	647	147	0
9	Jampea – Labuhan Bajo	84	889	54	0	0
Lintas Perintis Dalam Propinsi						
1	Ulee Lheu - Lamteng	263	997	292	358	495
2	Singkil - P. Banyak	98	8,015	1,178	269	0
3	Singkil - Sinabang	180	13,813	1,366	2,548	11,454
4	Sibolga - Teluk Dalam	168	12,296	432	2,619	0
5	Teluk Dalam - P. Telo	84	4,589	280	86	0
6	Padang - Siberut	46	3,899	300	19	0
7	Padang - Sikakap	104	9,747	517	99	0
8	Karimun – Mengkapan	190	10,494	650	1,105	0
9	Bengkulu - P. Enggano	154	6,999	1,582	244	250

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
10	Sadai - Tanjung Ru	141	1,283	125	679	0
11	Jepara - Karimunjawa	263	56,850	7,143	1,325	1,206
12	Batulicin - Garongkong	80	6,794	568	267	0
13	Parit Sarem - S. Nipah	4,708	0	15,986	998	0
14	Tanjung Harapan - Teluk Kalong	8,096	17,106	57,158	30,326	25,543
15	Bira - Patumbukan	83	4	1	0	0
16	Bira - Jampea	83	1,451	276	28	0
17	Patumbukan - Jampea	84	3,452	2,158	101	0
18	Luwuk - Salakan	422	18,178	7,812	2,354	0
19	Salakan - Banggai	16	179	30	29	0
20	Kendari – Lenggara (P. Wowoni)	668	22,883	3,677	151	79
21	Bau Bau - Dongkala	288	16,367	2,094	73	7
22	Dongkala - Mawasangka	288	9,475	1,927	281	121
23	Boniton - Banggai	137	8,980	6,622	339	0
24	Banggai - Taliabu	128	1,760	108	3	0
25	Taliabu - Sanana	124	1,328	25	0	0
26	Bitung - Melonguane	90	9,377	370	354	0
27	Bitung - Siau	170	4,925	200	135	3,270
28	Bitung - Pananaro	96	3,193	192	536	0
29	Pananaro - Marore	44	2	0	0	0
30	Wakai - Ampana	170	12,719	961	157	0
31	Waingapu - Aimere	43	2,981	294	127	0
32	Waingapu - Sabu	46	2,056	120	36	0
33	Ende - Waingapu	2	47	3	3	0
34	Kupang - Ende	44	6,691	728	58	0
35	Kupang - Lewoleba	5	514	44	7	0
36	Larantuka - Lewoleba	66	170	21	141	0
37	Larantuka - Waiwerang	52	52	0	0	0
38	Waiwerang - Lewoleba	52	102	0	0	0
39	Kalabahi - Teluk Gurita	82	2,808	273	52	0
40	Kalabahi - Baranusa	80	1,412	159	53	0
41	Ternate - Babang (Bacan)	124	185	131	189	105
42	Ternate - Batang Dua	79	1,463	114	10	7
43	Dowora (goto) - Sofifi	260	9,570	2,094	442	354
44	Tobelo - Daruba	135	13,066	2,386	324	305
45	Tobelo - Subaim	209	15,224	1,871	475	885
46	Tolehu - Pelauw	238	9,050	3,639	657	1,263
47	Pelauw - Umeputih	238	3,543	1,332	339	680
48	Umeputih - Wailey	238	6,265	2,346	92	73
49	Tolehu - Saparua	94	4,682	1,384	658	1,335
50	Saparua - Nalahia	92	2,231	460	115	247
51	Nalahia - Amahai	92	2,449	328	16	30
52	Galala - Ambalau	121	7,981	676	164	25
53	Ambalau - Wamsisi	121	9,135	674	163	25
54	Wamsisi - Namrole	121	9,215	507	144	25
55	Namrole - Leksula	121	4,961	96	10	3
56	Sanana - Mangole	36	42	0	0	0
57	Mangole - Bobong	36	24	0	0	0
58	Tual - Dobo	132	15,958	314	49	0

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
59	Tual - Larat	56	3,509	35	5	0
60	Tual - Tayandu	66	7,764	189	0	275
61	Tayandu - Kur	66	3,291	112	0	277
62	Dobo - Benjina	68	916	0	4	0
63	Benjina - Tabarfane	54	492	0	0	0
64	Dobo - Jerol	2	4	0	0	0
65	Sorong - Linmalas	40	1,916	0	0	0
66	Linmalas - Waigama	40	1,649	0	0	0
67	Sorong - Folley	40	2,553	0	0	0
68	Folley - Harapan Jaya	40	2,299	0	0	0
69	Seget - Seremuk	30	480	0	4	0
70	Sorong - Seget	30	578	0	4	0
71	Sorong - Saonek	70	1,422	79	81	259
72	Saonek - Waisai	70	1,273	79	81	0
73	Waisai - Kabarai	70	923	0	0	0
74	Teminabuan - Mugim	30	463	0	0	0
75	Mugim - Kais	30	528	0	0	0
76	Kais - Inawatan	30	482	0	0	0
77	Inawatan - Kokoda	30	482	0	0	0
78	Teminabuan - Konda	30	464	0	4	0
79	Konda - Seremuk	30	483	0	4	0
80	Biak - Serui	52	2,490	40	27	0
81	Biak - Numfor	102	8,436	61	12	0
82	Serui - Waren	78	3,365	110	15	0
83	Waren - Nabire	26	2,701	68	15	0
84	Merauke - Kimam - Bade - Getentiri - Tanah Merah	258	16,992	279	69	0
85	Bade - Kepi	56	1,402	12	0	1
Jumlah II		**23,007**	**541,797**	**138,048**	**52,154**	**48,599**

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

5. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan - kegiatan Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2010 di bidang LLASDP antara lain :

a. Pengembangan Sistem Data Base Transportasi Sungai di Sungai Barito (Provinsi Kalimantan Selatan)

b. Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan :

Teluk Dalam – Pulau Telo – Pulau Tanah Bala – Pulau Tanah Masa (Provinsi Sumut)

Muara Siberut – Tua Pejat – Sikakap (Provinsi Sumatera Barat)

Tanjung Balai Karimun – Batam (Provinsi Kepulauan Riau)

Tambelan (Provinsi Kepulauan Riau) – Sintete (Provinsi Kalimantan Barat)

Lombok Barat (Provinsi NTB) – Nusa Penida (Provinsi Bali) – Gunaksa (Provinsi Bali)

Wanci – Kaledupa – Tomea – Binongko (Provinsi Sulawesi Tenggara)

Kaimana – Fakfak – Bintuni (Provinsi Papua Barat)

c. Studi Potensi Transportasi Sungai dan Danau di Jawa Bagian Barat (Provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat)

d. Prastudi Kelayakan Transportasi Sungai di Wilayah Klaster Hulu Sungai Musi (Provinsi Sumatera Selatan)

e. Diklat Peningkatan Kemampuan SDM

f. Studi Desain Kapal

1). Desain Prototype Kapal Sungai Type LCT 75 GT dan 100 GT

2). Desain Tugboat /Kapal Tunda untuk lintas Merak – Bakauheni

3). Studi Review Desain Kapal Penyeberangan Type 300, 500 dan 600 GT

g. Studi Kinerja Sarana Angkutan Sungai dan Danau

1). Studi Analisa Kebutuhan Kapal Kerja Sungai dan Danau Untuk Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua

2). Evaluasi Kinerja Bus Air Untuk Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua

3). Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen, Hubdat tentang Standar Pelayanan Minimal Sarana Angkutan Sungai Dan Danau

h. Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO baik yang disatker pusat dan daerah :

1) Satker Pusat

a) Pembangunan Kapal Penyeberangan Type Ro-Ro 75 GT untuk Lintas Propinsi Papua.

b) Pembangunan Kapal Pembersih Alur Propinsi Kalimantan Tengah.

c) Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Tunda/ Tugboat Lintas Merak – Bakauheni.

d) Pembangunan 1 (satu) Unit Bus Air 50 Pnp dan 3 (tiga) Unit Bus Air 20 Pnp.

e) Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Kuala Tungkal – Tanjung Uban.

f) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Wahai – Waigama (P.Misol) –Sorong.
g) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Dobo – Timika.
h) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Cadangan Kapal Perintis KTI di NTT.
i) Pembangunan Kapal Penyeberangan 300 GT Lintas Ancam – Tarakan.
j) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Cadangan Kapal Perintis KTI di Maluku dan Papua.

2) Satker Daerah
a) Pembangunan Kapal Penyeberangan 75 GT Lintas Tobelo – Daruba
b) Pembangunan Kapal Penyeberangan 300 GT Lintas Kolonedale – Baturube
c) Pembangunan Kapal Penyeberangan 300 GT Lintas Karimun - Selat Belia (P. Kundur)
d) Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Air Nanang - Geser - Gorom – Kasui
e) Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Air Ambon - Ambalau - Wamsisi - Namrole – Leksula
f) Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Mengkapan - Kampung Balak
g) Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Padang – Mentawai
h) Pembangunan Kapal Penyeberangan 600 GT Lintas Melong - Marampit - Miangas
i) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Lintas Kupang – Ende

Gambar 4.5. Pembangunan Bus Air Kapasitas 50 Penumpang

Gambar 4.6. Pembangunan Bus Air Kapasitas 20 Penumpang

Gambar 4.7. Kapal Penyeberangan Marsela 500 GT selesai tahun 2011 melayani lintas Ilwaki-Kisar-Moa –Lakor (Maluku)

Gambar 4.8. KMP. Siginjai 500 GT selesai tahun 2011 Melayani lintas Kuala Tungkal-Tjg. Uban

Gambar 4.9. KMP. Badaleon 500 GT selesai tahun 2011 Melayani lintas Namlea-Sanana

Gambar 4.10. KMP. Lohoraung 300 GT selesai Tahun 2011 Melayani lintas Tagulandang-Siau-Biaro (Sulawesi Utara)

i. Pembangunan dermaga penyeberangan baru di 12 lokasi;
j. Pembangunan dermaga penyeberangan lanjutan di 23 lokasi;
k. Rehabilitasi dan peningkatan prasarana transportasi SDP di 32 lokasi.
l. Penetapan alur-pelayaran sungai dan danau berdasarkan klasifikasi kelas Sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten / kota dalam hal :
    1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
    2) Pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau; dan
    3) Penetapan biaya pemanfaatan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah.
m. Pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau. Memuat alur-pelayaran sungai dan danau yang terdiri dari :
    1). Alur-pelayaran;
    2). Sistem rute;
    3). Tata cara berlalu lintas; dan
    4). Daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
n. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
o. Penyiapan SDM PPNS bidang LLASDP, inspektur sungai dan danau, dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.

6. Permasalahan yang dihadapi

a) Alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP yang kurang mencukupi sehingga kegiatan/ proyek yang seyogyanya bisa diselesaikan hanya dalam beberapa tahap menjadi berlarut – larut.

b) Hambatan birokratis khususnya untuk pekerjaan yang sifatnya multi years menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan menjadi kurang efektif dan efisien.
c) Kurangnya dukungan SDM yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.
d) Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana angkutan SDP, khususnya dalam hal penyediaan lahan dan pembebasan tanah, menyebabkan beberapa kegiatan yang seyogyanya sudah siap dilaksanakan menjadi tertunda.
e) Belum adanya peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
f) Belum adanya pedoman dalam pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
g) Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
h) Belum adanya Krtieria Klas Alur kelas Alur-Pelayaran Sungai dan Danau;
i) Pemerintah Daerah Perlu menyiapkan kualifikasi SDM yang memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengikuti diklat dan mendapat manfaat secara efektif.

7. Upaya yang dilakukan

a) Mengupayakan penyediaan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan cara meningkatkan koordinasi baik dengan unit kerja terkait (Setjen Kementrian Perhubungan dan Kementerian Keuangan RI) maupun dengan Lembaga Legislatif (DPR) di pusat dan di daerah.
b) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang proaktif dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam hal proses pengurusan persetujuan kegiatan yang dilaksanakan secara multi years oleh Menteri Keuangan.
c) Membangun koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Perhubungan di daerah dalam rangka penyiapan SDM yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan

yang akan ditugaskan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan di daerah.

d) Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam penyiapan lahan untuk kegiatan pembangunan prasarana transportasi SDP di daerah.

e) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perumusan peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.

f) Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

g) Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.

h) Merumuskan Kriteria Klas Alur Pelayaran sungai dan danau dalam bentuk study.

i) Pemerintah menyelenggarakan orientasi di bidang teknis operasional LLASDP, menginformasikan kegiatan tersebut kepada seluruh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota.

C. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

1. Umum

Transportasi merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan baik pada tataran nasional, wilayah Propinsi/regional maupun pada kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk indonesia yang mencapai 240 Juta Jiwa dan tingkat mobilitas yang tinggi, maka sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting khususnya di daerah perkotaaan. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, sejalan dengan itu juga menimbulkan permasalahan transportasi. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak sejalan dengan penyediaan prasarana yang akan memperbesar masalah seperti

dapat kita lihat dari kecepatan perjalanan di daerah perkotaaan semakin lama semakin turun.

Pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan diwilayah perkotaan antara tahun 1980-2000 diperkirakan dapat mencapai 3%-5%, angka tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional per tahun yang dibawah 2%. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Denag demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Ditinjau dari besarnya jumlah penduduk kota=kota di indonesia, maka terdapat 9 (sembilan) kota yang masuk kriteria kota raya dan 5 (lima) kota besar yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang. Dari skesembilan kota raya tersebut yang memiliki penduduk lebih dari 1 (satu) juta orang penduduk yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Tanggerang, dan Ujung Pandang dan Bogor.

Dari sekian banyak kota besar tersebut ternyata transportasi melalui jalan merupakan moda trasnportasi yang paling dominan dibandingkan dengan moda trasnportasi lainnya. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di indonesia adalah kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas, serta pencemaran udara. Penanganan masalah taransaporatai perkoataan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah tersebut secara tepat dan baik. Hal ini justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menambah komplek serta rumitnya permasalahan taransportasi yang telah ada.

Akumulasi dari kondisi yang ada terhadap sektor transportasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, mengakibatkan kemacetan pada hampir semua ruas jalan dalam kota. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dit. BSTP pada tahun 2011, terhadap kinerja ruas jalan nasional di kawasan Jabodetabek dapat digambarkan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan berkisar antara 22 km/jam - 29 km/jam dengan rasio antara jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan berkisar antara 0,62- 0,69 dengan tingkat pelayanan rata-rata adalah C dan E pada jam puncak pagi dan sore. Kondisi ini berada jauh di bawah standar

pelayanan jalan yang diinginkan untuk jalan nasional yang seharusnya Tingkat Pelayanan A atau B.

Tabel 4.31. Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

	V/C		KECEPATAN	
	PAGI	SORE	PAGI	SORE
MAX	0.97	0.95	46.7	52.7
MIN	0.35	0.46	6.4	4.7
RERATA	0.69	0.62	28.5	22.7

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.32. Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

Tingkat Pelayanan	PAGI	SORE
A	0%	0%
B	16%	5%
C	32%	18%
D	18%	15%
E	24%	33%
F	11%	28%

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat, 2011

Dari aspek penyediaan angkutan umum, kondisi angkutan umum yang ada secara kualitas cenderung menurun. Hal ini diperparah oleh semakin maraknya ojek sepeda motor sebagai pilihan yang mudah dan cepat bagi pengguna jalan yang berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas angkutan umum yang ada.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum, Dit. BSTP secara bertahap melakukan bimbingan dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Dalam upaya pembinaan angkutan umum tidak dalam trayek di kawasan perkotaan (taksi), secara bertahap Dit. BSTP melakukan inventarisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal untuk angkutan taksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap keberadaan angkutan pemadu moda yang berada pada bandara-bandara internasional yang ada saat ini.

Tabel 4.33. Data Pelayanan Taksi Di Kawasan Perkotaan

No	Propinsi	Jumlah Perusahaan	Jumlah Armada Beroperasi
1	Aceh	3	54
2	Sumatera Utara	10	751
3	Sumatera Barat	14	729
4	Sumatera Selatan	3	114
5	Riau	7	472
6	Kepulauan Riau	26	2.938
7	Jambi	2	30
8	Bengkulu	0	0
9	Lampung	2	15
10	Bangka Belitung	1	14
11	DKI Jakarta	45	23.778
12	Jawa Barat	61	9.720
13	Banten	35	7.197
14	Jawa Tengah	15	1.448
15	Di. Yogyakarta	17	768
16	Jawa Timur	43	4.886
17	Bali	9	1.180
18	Nusa Tenggara Barat	4	401
19	Nusa Tenggara Timur	1	50
20	Kalimantan Barat	7	65
21	Kalimantan Tengah	3	43
22	Kalimantan Selatan	3	199
23	Kalimantan Timur	7	443
24	Sulawesi Utara	5	210
25	Sulawesi Tengah	2	55
26	Sulawesi Selatan	13	1.434
27	Sulawesi Tenggara	3	219
28	Sulawesi Barat	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Maluku	1	49
31	Maluku Utara	*N/A*	50
32	Papua Barat	*N/A*	23
33	Papua Timur	0	0
JUMLAH		**342**	**57.335**

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Tabel 4.34
REKAPITULASI DATA ANGKUTAN PEMADU MODA, ANGKUTAN JALAN DENGAN ANGKUTAN UDARA
PER 31 DESEMBER 2011

No	Lokasi / Propinsi	Trayek		Waktu Operasi		Jarak	Waktu Tempuh	Jumlah Bus	Tarif (Rupiah)	Operator
		No	Asal - Tujuan (PP)	Awal	Akhir					
1	Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, NAD	1	Bandara Sultan Iskandar Muda - Mesjid Raya	08.00	13.00	17 Km	45 Menit	3	10.000	Damri
						Jumlah		**3**		
2	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, DKI Jakarta	1	Bandara Soekarno Hatta - Blok M	04.00	23.00	38 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		2	Bandara Soekarno Hatta - Gambir	04.00	23.00	37 Km	45 Menit	20	20.000	Damri
		3	Bandara Soekarno Hatta –Rawamangun	03.00	23.00	46 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		4	Bandara Soekarno Hatta -Pasar Minggu	04.00	23.00	40 Km	75 Menit	14	20.000	Damri
		5	Bandara Soekarno Hatta –Cikarang	04.00	20.00	80 Km	120 Menit	6	20.000	Damri
		6	Bandara Soekarno Hatta –Bogor	02.00	22.00	87 Km	120 Menit	17	30.000	Damri
		7	Bandara Soekarno Hatta –Bekasi	02.00	23.00	57 Km	90 Menit	22	20.000	Damri
		8	Bandara Soekarno Hatta – Priok	04.00	23.00	43 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		9	Bandara Soekarno Hatta – Lebak Bulus	04.00	23.00	40 Km	85 Menit	8	20.000	Damri
		10	Bandara Soekarno Hatta - Kp. Rambutan	04.00	23.00	60 Km	90 Menit	16	20.000	Damri
		11	Bandara Soekarno Hatta - Serang	05.00	18.00	43 Km	90 Menit	3	28.000	Damri
		12	Bandara Soekarno Hatta –Kemayoran	05.00	23.00	37 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		13	Bandara Soekarno Hatta -Bandung Supermall	02.00	24.00	197 Km	180 Menit	40	75.000	Prima Jasa
						Jumlah		**184**		
3	Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur	1	Bandara Juanda - Terminal Purabaya	05.00	21.00	12 Km	40 Menit	8	15.000	Damri
		2	Purabaya - Tanjung Perak	05.00	21.00	18 Km	60 Menit	9	4.000	Damri
						Jumlah		**17**		
4	Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat	1	Bandara Int. Minangkabau- Lap. Imam Bonjol	06.00	21.00	28 Km	60 Menit	3	18.000	Damri
		2	Bandara Int. Minangkabau- Simpang lubuk begalung	07.00	22.00	33 Km	45 Menit	4	18.000	Tranex

						Jumlah		**7**		
5	Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau	1	Bandara Hang Nadim - Jodoh	07.00	21.00	29 Km	45 Menit	2	15.000	Damri
		2	Bandara Hang Nadim – Batu Aji (Pasar Fanindo)	07.00	21.00	32 Km	45 Menit	2	15.000	Damri
						Jumlah		**4**		
6	Bandara Sultan Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan	1	Bandara Sultan Hasanudin- Lap.Karebosi	08.00	21.30	23 Km	90 Menit	3	15.000	Damri
						Jumlah		**3**		
7	Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, DIY	1	Bandara Adi Sucipto - Kebumen	03.00	21.00	110 Km	180 Menit	4	55.000	Damri
		2	Bandara Adi Sucipto - Magelang	04.00	21.00	55 Km	90 Menit	6	35.000	Damri
						Jumlah		**10**		

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Selain permasalahan lalu lintas dan angkutan, permasalahan lingkungan juga menjadi fokus kegiatan Dit. BSTP. Program gasifikasi angkutan umum secara terencana dan berkelanjutan terus dilakukan dalam rangkah mendukung program langit biru dan transportasi ramah lingkungan.

Memperhatikan kondisi yang ada di lapangan, pembinaan transportasi perkotaan terus dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis dibidang penyusunan rencana induk pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan di perkotaan (*master plan* transportasi/*grand design* transportasi), penyelenggaraan menejemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan program gasifikasi, pengembangan *bus rapid transit*, bantuan bus sekolah/pelajar/mahasiswa, penataan fasilitas pemadu moda dan program-program lain yang bersifat isedentil.

2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan

Prasarana angkutan umum yang dikembangkan saat ini belum menunjukan hal yang signifant. Dari DKI Jakarta, Batam, Bogor, Bandung, Pekanbaru, Menado, Yogyakarta, Surakarta dan Palembang; hanya DKI Jakarta saja yang telah mempunyai jalur khusus untuk bus (*busway*) sedangkan yang lainnnya masih menggunakan jalaur bersama (*mixuser*) .

Untuk mengantisipasi hal ini, mengacu pada Undang-Undang No: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilengkapi dengan rencana pengembangan jaringan angkutan umum. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kota-kota besar dan metropolitan untuk menyediakan angkutan umum massal.

Untuk data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.35 dan 4.36

Tabel 4.35 DATA PRASARANA TAHUN 2011

No	Kota	Jumlah	Luas Kota	Luas Jalan	Road Ratio	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Jumlah Rambu	Jumlah LPJ	Jml
		Penduduk	(km2)	(km2)	(%)	(km2)	Yang dilengkapi Trotoar (km)	Yang dilengkapi Marka (km)	Yang Terpasang	yang Terpasang	SRP
KOTA METROPOLITAN											
1	SURABAYA	2,987,456	32,637	15,187	0.23	3,546	2,124	2,837	17,730	37,233	35
2	BANDUNG	2,296,848	21,035	11,660	0.21	2,453	1,471	1,962	12,265	25,756	38
3	MEDAN	2,067,288	27,054	16,185	0.18	2,981	1,352	2,385	14,905	31,300	30
4	PALEMBANG	1,607,673	40,564	17,987	0,13	747.9	83.63	15.85	1332	10504	24
5	MAKASAR	1,253,656	29,275	16,655	0.11	1,765	865	1,412	8,825	18,532	37
6	SEMARANG	1,419,478	35,286	18,309	0.21	3,769	1,341	3,015	18,845	39,574	38
7	BOGOR	1,945,000	18,605	10,725	0,13	1,356	632	1,085	6.780	14,238	14
KOTA BESAR											
8	PADANG	764,800	28,935	11,557	0,09	1,086	533	869	5,430	11,403	11
9	PEKANBARU	666,902	23,262	12,466	0,19	2,342	1,621	1,874	11,710	24,591	23
10	SAMARINDA	650,000	15,635	7,654	0,7	535,5	35.086	70.00	1043	1815	21
11	TASIKMALAYA	589,597	17,158	8,656	0,11	985	234	788	4,925	10,342	10
12	SURAKARTA	565,415	44.014	11,567	0.4	675.8	124.41	41	849	16,169	13
13	BALIKPAPAN	601,392	15,030	7,132	0,6	257	27,78	153,775	650	4.854	15
14	YOGYAKARTA	419,164	13,250	6,874	0,16	1,098	412	878	5,490	11,529	11
15	SIDOARJO	211.881	14,506	13,567	0,11	1,453	422	1,162	7,265	15,256	15
16	BUKIT TINGGI	485,324	12,524	6,134	0,16	980	522	784	4,900	10,290	10
KOTA SEDANG											
17	CIMAHI	463,448	7,210	3,178	0,25	780	210	624	3,900	8,190	8
18	JAMBI	300,000	6,089	2,978	0,22	653	125	522	3,265	6,856	7
19	SENGKANG	143,223	1,039	1,601	0,08	124	61	99	620	1,302	1
20	SUKABUMI	206,288	18,278	9,408	0,01	603	369	482	3,015	6,331	8
21	BANYUWANGI	274.542	7,250	3,981	0,09	378	121	302	1,890	3,969	6
22	PANGKAJENE	271.709	7,125	2,684	0,09	237	117	190	1,185	2,488	7
23	DUMAI	263.199	685	5,375	0,03	136	51	109	680	1,428	10
24	BANGLI	254.053	1,654	1,587	0,06	98	44	78	490	1,029	11
25	MADIUN	249.643	6,170	1,753	0,12	212	102	170	1,060	2,226	6
26	T. AGUNG	239.201	7,160	1,175	0,14	159	62	127	759	1,669	7

27	TANJUNG BALAI	236.943	6,460	1,241	0,07	89	69	71	445	934	8
28	BADUNG	221.055	8,109	1,559	0,15	230	124	184	1,150	2,415	9
29	LUMAJANG	206.288	10,021	2,574	0,14	359	153	287	1,759	3,769	18
30	PAREPARE	121.161	9.910	2488.8	0,22	311.1	199.6	212.465	237	1612	9
31	CIAMIS	186.623	8,765	2,312	0,20	459	223	367	2,295	4,819	11
32	WATAMPONE	183,251	11,235	1,534	0,21	320	164	256	1,600	3,360	6
33	MOJOKERTO	181.999	6,693	1,356	0,20	270	121	216	1,350	2,835	7
KOTA KECIL											
34	SNG.MINASA	79,643	9,316	1,125	0,12	130	64	104	650	1,365	13
35	SRAGEN	98,461	7,475	1,213	0,21	260	127	208	1,300	2,730	15
36	SINGARAJA	84,613	9,885	1,435	0,12	178	134	142	890	1,869	8
37	STABAT	76,315	10,096	1,512	0,08	117	52	93	585	1,228	9
38	PARIAMAN	64,587	6,336	1,344	0,06	81	35	64	405	850	7
39	AMLAPURA	76,312	7,448	1,234	0,13	158	78	126	790	1,659	6
40	KY.AGUNG	46,579	12,145	946	0,06	54	26	43	270	567	5
41	MAGETAN	54,612	7,434	1,157	0,11	129	63	103	645	1,354	12
42	TABANAN	76,431	6,124	1,778	0,13	233	154	186	1,165	2,446	22
43	SEMARAPURA	84,615	7,546	1,434	0,23	328	211	262	715	3,444	11
44	GNG KIDUL	64,315	6,968	1,453	0,10	143	134	114	475	1,501	9
45	POLEWALI	46,312	8,916	1,586	0,06	95	59	76	660	997	10
46	M. BUNGO	84,516	9,189	2,453	0,05	132	63	105	425	1,386	19
47	AMUNTAI	64,312	13,673	1,232	0,07	85	41	68	1,055	892	12
48	LUBUK PAKAM	64,315	12,901	1,397	0,15	211	106	168	956	2,215	13
49	PD.PANJANG	52,018	8,398	1,536	0,1776	60.4	34	14	491	1,953	14
50	PINRANG	51,324	5,942	2,132	0,04	76	39	60	380	798	8
51	MUARA ENIM	63,142	14,613	4,768	0,02	85	41	68	425	892	10
52	PELAIHARI	54,312	10,072	3,434	0,02	66	37	52	330	693	9
53	KEPANJEN	91,324	12,625	4,987	0,05	241	125	192	1,205	2,530	19
54	TANJUNG	61,542	9,323	1,546	0,06	89	42	71	445	934	8
55	GIANYAR	85,134	8,987	3354	0,09	287	143	229	653	3,013	8
56	BATU SANGKAR	76,132	7,473	1467	0,07	109	62	87	341	1,144	10

Sumber : Dit. BSTP (WTN 2009)

Keterangan : LPJ : Lampu Penerangan Jalan
SRP : Satuan Ruang Parkir

Tabel 4.36. Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL

No	Kota	Jumlah Halte	Jumlah Fasilitas Penyebrangan	Jumlah Simpang	Jumlah APILL
KOTA METROPOLITAN					
1	SURABAYA	53	192	133	124
2	BANDUNG	35	165	352	182
3	MEDAN	36	312	239	43
4	PALEMBANG	34	46	57	42
5	MAKASSAR	70	324	80	46
6	SEMARANG	57	77	94	105
KOTA BESAR					
7	BOGOR	15	56	271	37
8	PADANG	65	127	269	38
9	PEKANBARU	15	138	212	27
10	SAMARINDA	24	154	316	33
11	TASIKMALAYA	13	85	304	25
12	SURAKARTA	42	71	134	68
13	BALIKPAPAN	19	121	344	24
KOTA SEDANG					
14	CIMAHI	15	49	411	17
15	JAMBI	28	148	63	26
16	YOGYAKARTA	3	195	280	76
17	SENGKANG	3	9	50	22
18	SUKABUMI	8	185	167	84
19	BANYUWANGI	8	80	113	9
20	PANGKAJENE	3	6	203	14
21	BINJAI	11	56	55	35
22	DUMAI	37	32	13	6
23	BANGLI	3	31	22	2
24	MADIUN	10	183	74	42
25	TULUNG AGUNG	11	74	70	23
26	TANJUNG BALAI	7	13	26	4
27	BADUNG	13	112	53	16
28	LUMAJANG	9	29	20	11
29	SIDOARJO	7	39	25	15
30	PAREPARE	7	47	93	14
31	CIAMIS	6	20	59	10
32	WATAMPONE	5	7	49	7
33	MOJOKERTO	2	20	21	18
34	BUKIT TINGGI	21	85	99	15
35	SUNGGUMINASA	3	15	97	7
36	SRAGEN	12	20	32	23
37	SINGARAJA	10	49	21	21
38	STABAT	10	16	63	3
39	PARIAMAN	1	75	58	8
40	AMLAPURA	12	80	98	4
41	KAYU AGUNG	4	9	78	4
42	MAGETAN	2	43	64	5
43	TABANAN	16	66	70	9
44	SAMARAPURA	5	54	108	7
45	GUNUNG KIDUL	20	54	71	11

46	POLEWALI	16	25	113	113
47	MUARA BUNGO	3	14	175	113
48	AMUNTAI	0	14	68	1
49	LUBUK PAKAM	7	44	41	15
50	PADANGPANJANG	11	41	19	62
51	PINRANG	1	4	55	2
52	MUARA ENIM	0	13	71	3
53	PELAIHARI	1	33	15	1
54	KEPANJEN	6	22	35	10
55	TANJUNG	7	20	37	8
56	GIANYAR	2	26	62	8

Sumber : Dit. BSTP (WTN 2010)

Tabel 4.37. DATA LALU LINTAS TAHUN 2011

No	Kota	V/C Ratio Rata - Rata	Kecepatan Rata-rata (km/jam)
KOTA METROPOLITAN			
1	SURABAYA	0.83	21
2	BANDUNG	0.85	14.3
3	MEDAN	0.76	23.4
4	PALEMBANG	0.61	28.54
5	MAKASSAR	0.73	24.06
6	SEMARANG	0.72	27
7	BOGOR	0.86	15.32
KOTA BESAR			
7	PADANG	0.63	30.9
8	PEKANBARU	0.64	31.13
9	SAMARINDA	0,64	20,8
10	TASIKMALAYA	0.61	30
11	SURAKARTA	0.68	18.25
12	BALIKPAPAN	0.67	47,43
13	CIMAHI	0.75	25.5
14	JAMBI	0.68	31
15	YOGYAKARTA	0.86	31.34
16	SENGKANG	0.53	63.2
17	SUKABUMI	0.66	23
18	BANYUWANGI	0.54	60
19	PANGKAJENE	0.6	73
20	BINJAI	0.69	40
21	DUMAI	0.6	50
22	BANGLI	0.76	45
23	MADIUN	0.53	27.48
24	TULUNG AGUNG	0.55	54.54
25	TANJUNG BALAI	0.24	41.09
26	BADUNG	0.85	30.18
27	LUMAJANG	0.49	37.8
28	SIDOARJO	0.67	50
29	PAREPARE	0.62	20
30	CIAMIS	0.45	40
31	WATAMPONE	0.67	55
32	MOJOKERTO	0.53	60

33	BUKIT TINGGI	0.63	37.07
KOTA KECIL			
34	SUNGGUMINASA	0.61	35
35	SRAGEN	0.53	45
36	SINGARAJA	0.63	25
37	STABAT	0.76	40
38	PARIAMAN	0.19	33.33
39	AMLAPURA	0.63	62
40	KAYU AGUNG	0.68	30
41	MAGETAN	0.59	35
42	TABANAN	0.62	40
43	SAMARAPURA	0.62	41
44	GUNUNG KIDUL	0.65	45
45	POLEWALI	0.85	36.67
46	MUARA BUNGO	0.42	30
47	AMUNTAI	0.27	49
48	LUBUK PAKAM	0.34	30.2
49	PADANGPANJANG	0.43	25.62
50	PINRANG	0.41	63.2
51	MUARA ENIM	0.52	28.7
52	PELAIHARI	0.38	45
53	KEPANJEN	0.49	40
54	TANJUNG	0.49	41.5
55	GIANYAR	0.67	37.22

Sumber Dit. BSTP (WTN 2010)

3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan

Pada tahun 2011 jumlah angkutan umum perkotaan dan taksi masih sama seperti pada tahun 2010. Untuk angkutan kota, jumlah yang paling tinggi yaitu pada mobil penumpang umum (MPU) sebesar 203.828 unit untuk mobil penumpang umum tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun 2009 karena kelayakan kendaraan tersebut sedangkan untuk taksi hanya sebesar 58.512 unit mengalami peningkatan dari tahun 2009.

Tabel 4.38. Jumlah Angkutan Umum

No.	Pelayanan	Jenis Kendaraan				Total
		BB	BS	BK	MPU	
1	Angkutan Kota	26.402	37.868	89.224	203.828	357.322
2	Taksi	-	-	-	58.512	58.512
Total		**26.402**	**37.868**	**89.224**	**262.340**	**415.834**

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat 2011

Kondisi saat ini menunjukan jumlah angkutan umum di Indonesia semakin menurun akibat penurunan tersebut dikarenakan kendaraan yang sudah semakin tua atau umur kendaraan yang sudah tidak layak, dan pelayanannya

dirasakan masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penataan dan perencanaan angkutan umum diperkotaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan prasarana yang ada.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan dan untuk mengatasi permasalahan diatas telah diterapkan kebijakan dengan orientasi pada pengembangan angkutan umum dengan strategi :

a. Mengembangkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang cepat, tepat, aman, nyaman, murah (CTANM) dan berkelanjutan.
b. Menjamin kepastian dan keberlangsungan untuk pelayanan angkutan umum perkotaan dimasa yang akan datang.

Program yang dilakukan oleh Dit. BSTP yang berkaitan dengan pengembangan sarana angkutan perkotaan antara lain :

a. Pengadaan Bus Sedang Non AC Euro II Engine PS>=120 (Bus Bantuan Angkutan Kota/Pelajar/Mahasiswa) 50 unit;
b. Pengadaan Bus Sedang AC Euro II Engine PS>=120 (Bantuan Pengembangan Angkutan Umum Masal/BRT) 10 unit;
c. Pengadaan Bus Besar AC Euro II Engine Bantuan untuk Pengembangan Angkutan Umum Masal/BRT 10 unit;
d. Pengadaan Bus Besar AC Euro II Engine PS>=120 (Sarana Angkutan Pemadu Moda Transportasi) 10 unit.

Untuk penetapan Bus 2011 tersebut belum dapat di bagikan ke daerah dikarenakan masih dalam proses pengkajian oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Gambar 4.18 Halte dan Bus BRT Kota Palembang, BRT Kota Jogjakarta dan BRT Kota Surakarta

4. **Kinerja Angkutan Perkotaan**

Unjuk kerja pelayanan angkutan perkotaan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

a. Ketepatan waktu pelayanan
b. Kepastian akan pelayanan
c. Tarif yang ditetapkan terjangkau oleh pengguna jasa angkutan umum;
d. Tingkat keamanan dan kenyamanan dalam angkutan terjaga;

Saat ini sedang disusun draft Peretauran Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan.

5. **Program Gasifikasi Kendaraan Umum Perkotaan**

Transportasi merupakan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar di Indonesia, dimana pada tahun 2008 mencapai 31.16 juta kl atau 51 % (sumber Kementerian ESDM) dari total Konsumsi BBM. Ketergantungan sektor transportasi terhdap BBM ini telah menimbulkan kekhawatiran karena jumlah cadangan dan prosduksi minyak bumi Indonesia terbatas dan pembakaran BBM menimbulkan pencemaran yang berat di kota besar.

Pada bulan juli 1986 sebenarnya pemerintah sudah menetapkan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor, hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran BBM. Salah satu upaya menggalkan pemakaian BBG adalah dengan memanfatkan angkutan umum yang menggunakan BBG, maka daripada itu Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan mengadaakn program Gasifikasi pada Angkutan Umum sebagai mana berikut :

Gasifikasi Pada Angkutan Umum	
Tahun 2007	DKI Jakarta (1775 unit Konverter kit)
Tahun 2008	DKI Jakarta (820 unit konverter Kit)
Tahun 2009	Bogor (1001 unit Konverter Kit) Palembang (666 unit Konverter Kit
Tahun 2010	Surabaya (445 unit Konverter Kit)
Tahun 2011	Bogor dan Depok (400 unit Konverter Kit)

Gambar 4.19. Program Gasifikasi Angkutan Perkotaan

6. Kegiatan-kegiatan Strategis

a. Pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT)

Kegiatan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum wilayah perkotaan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama/MOU yang masing-masing instansi telah menyepakati kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada tahun 2011 Program BRT belum dapat dilaksanakan karena masih dalam kajian.

b. Program bantuan Angkutan sekolah/pelajar dan mahasiswa

c. Program bantuan konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas, berupa Converter kit untuk angkutan umum perkotaan di Bogor dan Palembang

d. Penerapan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Sragen

e. Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki (dalam penyusunan desain) di Kota Bukittinggi dan Palembang.

Gambar 4.20. Beberapa Kegiatan Strategis Tahun 2011

7. Permasalahan yang dihadapi

a. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
b. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
c. Kurangjelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
d. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
e. Kemacetan lalu lintas;
f. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
g. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

8. Upaya yang dilakukan

Dari hambatan-hambatan di atas maka untuk menanggulanginya dilakukan berbagai upaya yaitu :

a. Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan serta permasalahan transportasi yang terjadi pada masing-masing Kota/Kabupaten lebih mendalam dan mensosialisasikan visi dam misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengambangan trasportasi yang lebih baik,
b. Bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah baik pada bidang penyusunan master plan, lalu lintas, angkutan maupun lingkungan;

c. Pembinaan transportasi perkotaan melalui Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
d. Penyusunan Grand Desain Perkotaan, dengan beberapa kota sebagai Kota Percontohan.
e. Penyempurnaan peraturan penrundangan-undangan dibidang transportasi perkotaan.

D. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

1. Umum

Permasalahan yang dihadap di dalam transportasi jalan di Indonesia ada dua hal, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan biasanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Sedangkan keselamatan terjadi hampir merata di semua wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari data laporan kecelakaan yang bersumber dari Kepolisian. Pada tahun 2011 rata-rata kecelakaan untuk tiap provinsi sebesar 3.541 kejadian dengan deviasi sebesar 5.143. Kejadian paling besar terjadi di Provinsi Jawa Timur 22.456 kejadian pada tahun 2011 (data bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia). Total kejadian pada tahun 2011 tingkat nasional sebesar 109.776 kejadian dengan tingkat kerugian materi akibat kecelakaan mencapai 86 milyar rupiah.

Fenomena tingginya tingkat kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh TRL, bahwa untuk Negara-negara dengan jumlah populasi kendaraan bermotor yang tinggi kerugian material mencapai 2% dari PNB. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UGM dan UI perkiraan kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2002 sekurang-kurangnya sebesar 30.82 triliun rupiah (atau sekitar 3.5 milyar US Dollar) atau sekitar 2.17% dari GDP. Ini merupakan sebuah angka yang besar dan ini terjadi setiap tahun bahkan angkanya makin meningkat.

Badan dunia, PBB, sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi hampir di semua Negara berkembang. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi dengan Nomor A/64/L.44/Rev.1* tanggal 24 Februari 2010. Yang dikenal dengan Decade of Action for Road Safety. Pemerintah Indonesia harus tanggap dengan kondisi ini, sehingga pada bulan Mei

2011 dicanangkan Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang di dalamnya akan menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (2011 s/d 2020).

Penanganan keselamatan jalan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, baik secara operasional maupun manajerial dalam hal ini mencakup tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

2. Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan

a. Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Tabel 4.39. Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor Berdasar Tingkat Kecelakaan Tahun 2007-2011

No	Jenis	Satuan					
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Kecelakaan	Kecelakaan	48,508	59,164	62,960	109,311	109,776
2	Meninggal Dunia	orang	16,548	20,118	19,979	31,234	31,185
	Luka Berat	orang	20,180	23,440	23,469	46,851	36,767
	Luka Ringan	orang	45,860	55,772	62,936	97,702	109,889
3	Total Korban	orang	82,588	99,330	106,384	175,787	177,841
4	Kerugian	Milyar Rp	10,329.00	131.21	136.29	143.16	86.30

Sumber : POLRI

Gambar 4.21. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 4.40. Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Usia

No	Jenis	Satuan	Tahun						
			2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010
1	5-15 tahun	orang	409	506	2.311	3.492	6.437	15.002	11.747
2	16-25 tahun	orang	4.717	4.994	12.813	17.963	25.681	43.361	10.797
3	26-30 tahun	orang	6.036	6.230	13.607	18.776	25.064	38.998	10.797
4	31-40 tahun	orang	3.946	3.927	9.196	13.380	17.712	28.622	11.315
5	41-50 tahun	orang	1.920	1.918	5.164	8.260	11.115	19.779	7.434
6	51-60 tahun	orang	568	778	1.957	3.645	5.318	10.689	6.091
	Jumlah	**orang**	**17.596**	**18.353**	**45.048**	**65.516**	**91.327**	**156.451**	**58.181**

Keterangan : Data Tahun 2004-2007, 2010 Data POLRI, Data prediksi (*)

Gambar 4.22. Grafik Perkembangan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Usia

Tabel 4.41. Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2004-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
1	Mobil PNP	Unit	5.442	6.095	10.604	12.726	16.552	22.894	88.377
2	Mobil Beban	Unit	4.872	4.872	9.168	11.006	14.328	19.695	22.256
3	Mobil Bus	Unit	1.650	1.607	2.945	3.278	3.973	5.288	5.935
4	Spd. Motor	Unit	14.223	15.671	47.591	57.080	95.209	164.431	179.538
	Jumlah	**Unit**	**26.187**	**28.245**	**70.308**	**84.090**	**130.062**	**212.308**	**296.106**

Keterangan : Data Tahun 2004-2007, 2010 Data POLRI, Data prediksi (*)

Gambar 4.23. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kendaraan yang Terlibat

Tabel 4.42. Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2004-2010

No	Jenis	Satuan	Tahun						
			2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
1	Sekolah Dasar	Orang	2.251	2.299	5.464	7.689	9.911	16.227	18.009
2	Sekolah Menengah Pertama	Orang	5.415	5.429	12.071	15.362	20.330	30.844	34.534
3	Sekolah Menengah Atas	Orang	8.386	9.377	33.897	31.488	55.754	96.716	104.407
4	Perguruan Tinggi	Orang	1.259	1.030	2.648	4.765	5.603	9.573	10.736
	Jumlah		**17.311**	**18.135**	**54.080**	**59.304**	**91.598**	**153.360**	**167.686**

Keterangan : Data Tahun 2004-2007, 2010 Data POLRI, Data prediksi (*)

Gambar 4.24. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan

3. Kegiatan Keselamatan Transportasi Jalan

a. Pencanangan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ

Pada tanggal 7 April 2007 dilaksanakan World Health Day dengan tema ”Road Safety is not Accident”, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan World Health Day tersebut, antara lain melakukan Kesepakatan Bersama 4 Menteri dan Kapolri yang salah satu isi dari Kesepakatan itu adalah menyusun draft Rencana Aksi Keselamatan Jalan, melakukan Pekan Nasional Keselamatan Jalan tahun 2007 yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2007 di Taman Mini Indonesia Indah dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Resolusi PBB 60/5 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Improving Global Road Safety, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq Direktorat Keselamatan Transportasi Darat melakukan Pekan Nasional Keselamatan Jalan dari tahun 2008-2010. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2008 dilaksanakan di Silang Monas Jakarta tanggal 20 April 2008 dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009 di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah dan dibuka oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2009 dilaksanakan di 7 Provinsi dan dibuka oleh Gubernur Provinsi tersebut.

Resolusi PBB (A/64/255) tanggal 2 Maret 2010 tentang Decade of Road Safety 2011-2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat melakukan Dekade Aksi Keselamatan (DoA) yang dibuka oleh Wakil Presiden pada tanggal 20 Juni 2011 sekaligus pencanangan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ.

Gambar 4.25. Pencanangan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan

b. Workshop Manajemen Keselamatan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Workshop Manajemen Keselamatan Transportasi Darat adalah agar instansi – instansi stake holder yang bertanggung jawab masalah Keselamatan transportasi darat di Indonesia memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 yang baru tersebut. Selain itu, melalui kegiatan ini, wawasan dan pengetahuan Dinas Perhubungan di daerah dapat lebih diperkaya lagi terutama wawasan yang berhubungan dengan kebijakan keselamatan transportasi jalan dalam rangka penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Kepolisian, Bina Marga, dan Dinas Kesehatan untuk peningkatkan keselamatan jalan.

Workshop Manajemen Keselamatan dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu Papua (Jayapura) dan Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh). Workshop Manajemen Keselamatan di Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 19 April 2011 bertempat di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Materi workshop disampaikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Dirlantas Polda Papua, Staf Ahli Kakorlantas Mabes Polri dan Pustral UGM.

Workshop Manajemen Keselamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 bertempat di Hotel Grand Nanggroe, dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Materi workshop disampaikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Dirlantas Polda Aceh, Staf Ahli Kakorlantas Mabes Polri, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Aceh, dan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala.

Gambar 4.26. Workshop Manajemen Keselamatan Jalan

c. Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan adalah agar Dinas Perhubungan di Indonesia khususnya pada propinsi yang telah membentuk Unit Pengkaji Keselamatan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 yang baru tersebut. Selain itu, melalui kegiatan ini, wawasan dan pengetahuan Dinas Perhubungan di daerah dapat lebih diperkaya lagi terutama wawasan yang berhubungan dengan analisis data kecelakaan, inspeksi keselamatan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan (LRK) sehingga nantinya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan keselamatan dalam rangka penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu DI. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Batam.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Provinsi DI. Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 27-28 April 2011 bertempat di Hotel Shapire dengan jumlah peserta 40 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Prof. Siti Malkhamah dari UGM, Prof. Sigit Priyanto dari UGM, Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, MSc dari Universitas Maranatha Bandung dan Kasubdit Manajemen Keselamatan.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2011 bertempat di Hotel Jayakarta dengan jumlah peserta 40 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, MSc dari Universitas Maranatha Bandung, DM. Priyantha Wedagama, ST, MT, MSc, Phd dari Universitas Udayana Bali, Agus Bari Sailendra dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung dan Kasubdit Manajemen Keselamatan.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juli 2011 bertempat di Hotel Good Way dengan jumlah peserta 40 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, MSc dari Universitas Maranatha Bandung, Agus Bari Sailendra dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung dan Kasubdit Manajemen Keselamatan.

d. Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ dimana didalam pasal 13 menjelaskan tentang :

1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi;
2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam

merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;

4) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri atas unsure Pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat;
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atur dengan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan pasal di atas maka perlu dilakukan kegiatan Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dibidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam hal ini Dinas Perhubungan yang ada di daerah diharapkan mendapatkan gambaran terkait pembentukan forum LLAJ di daerahnya masing-masing.

Maksud dan tujuan dilakukannya Kegiatan Asisstensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1) Memberikan pengetahuan kepada Dinas Perhubungan di seluruh provinsi di Indonesia terkait pembentukan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2) Meningkatkan koordinasi antar instansi di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Kegiatan ini dilakukan di 4 Kota antara lain Makassar, Balikpapan, Pekan Baru dan Jakarta. Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Makassar (Sulawesi Selatan) dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 bertempat di Hotel Santika dengan jumlah peserta 80 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Drs. Suripno, Mstr, Direktorat Transportasi Bappenas (Bpk. Ikhwan), Direktur PPTM Kementerian Kesehatan dan Direktur Keselamatan Transportasi Darat.

Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Balikpapan (Kalimantan Timur) dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Hotel Blue Sky dengan jumlah peserta 80 orang. Materi kegiatan

disampaikan oleh Drs. Suripno, Mstr, dan Direktur Keselamatan Transportasi Darat.

Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pekan Baru (Riau) dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 bertempat di Hotel Grand Elite dengan jumlah peserta 60 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Drs. Suripno, Mstr, Direktorat Transportasi Bappenas (Bapak Zainuddin) dan Kasubdit Manajemen Keselamatan.

Asistensi Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta (DKI. Jakarta) dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2011 bertempat di Hotel Redtop dengan jumlah peserta 60 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Drs. Suripno, Mstr, Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan Bapak Heru Sutomo.

e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keselamatan

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja transportasi jalan ini adalah untuk mengetahui potret kinerja keselamatan transportasi jalan di tiap-tiap propinsi, terutama propinsi yang masuk dalam daftar survei tahun 2011.

Sasaran dari kegiatan ini adalah seberapa jauh upaya yang telah dilakukan oleh daerah (Pemda) propinsi dalam masalah keselamatan transportasi jalan yang dijabarkan dalam lima pilar kinerja.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan diharapkan menghasilkan:

1) Skor Kinerja keselamatan transportasi jalan tiap propinsi;
2) Mengkategorikan kinerja keselamatan transportasi jalan tiap-tiap propinsi;
3) Meranking kinerja keselamatan transportasi jalan.

Dengan hasil tersebut kita akan mendapatkan potret kinerja keselamatan transportasi jalan di tiap-tiap propinsi.

Monitoring Kinerja keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 dilakukan di 19 Provinsi antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten,

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku dan Papua.

f. Peningkatan Koordinasi Dalam dan Luar Negeri

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun pendekatan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan 5 pilar peningkatan LLAJ, yaitu :

1) Peningkatan Manajemen Keselamatan (*safer management*);
2) Peningkatan Jalan yang berkeselamatan (*safer road*);
3) Peningkatan Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (*safer people*);
4) Peningkatan Kendaraan yang berkeselamatan (*safer vehicle*);
5) Peningkatan perawatan pasca kecelakaan (*post crash*)

Dari pendekatan yang dilakukan di atas, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaannya. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat saat ini sedang mengupayakan adanya kerjasama dengan instansi di luar Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi darat. Koordinasi keselamatan tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Koordinasi Keselamatan Transportasi Darat ke Luar Negeri

Tujuan dilakukannya koordinasi keselamatan transportasi darat ke luar negeri adalah untuk memperkaya pengetahuan mengenai perkembangan potret keselamatan di negara lain.

1) HORA (*Heads of Road Authorities*) Workshop – *Road Safety Make it Happen* di Taipe, Taiwan 13-15 April 2011;
2) The 2nd ASEAN MSRSSWG (*Multisector Road Safety Special Working Group*) and 19th *ASEAN Land Transport Working Group Meeting* (LTWG) di Phnom Penh, Kamboja 2-6 Mei 2011;
3) 34th *APEC Transportation Working Group Meeting* di Brisbane, Australia 12-16 Juni 2011;

4) The 7th *APEC Transportation Ministerial Meeting dan Joint Transport and Energy Ministerial Meeting*, San Francisco, Amerika Serikat 11-17 September 2011;
5) *Working Group on the Asian Highway and Expert Group Meeting on Progress in Road Safety Improvement an Asia and The Pacific* di Bangkok, Thailand 27-29 September 2011;
6) *Human Resources Development Workshop for Road Traffic Safety in ASEAN Countries* di Seoul, Republik Korea 21-25 November 2011.

g. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2011

Maksud dilakukannya Peilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah untuk memilih dan menyeleksi juara pelajar pelopor keselamatan transportasi jalan dari kalangan generasi muda yang dapat membantu sosialisasi keselamatan di masyarakat sehingga tercapai peningkatan keselamatan transportasi jalan di Indonesia.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Meningkatkan kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi resiko akibat kesalahan teknis/kendaraan dengan cara memberdayakan seluruh komponen yang terkait dengan keselamatan lalu lintas;
2) Memberikan reward atas prestasi tertib berlalu lintas dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya menjaga keselamatan di jalan;
3) Membangun kesadaran generasi muda untuk berperilaku tertib berlalu lintas;
4) Membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini atas dasar kesadaran pribadi dan taggung jawab moril untuk meningkatkan keselamatan;
5) Menyebarluaskan informasi ke kalangan generasi muda melalui peer groupnya;
6) Menyelamatkan generasi muda sebagai asset bangsa.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari 12 provinsi. Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari dari tanggal 20-27 November 2011 bertempat di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Penilaian yang dilakukan dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu Leadership, Public Speaking, Norma/Etika, Materi Karya Tulis dan Perilaku sehari – hari. Penilaian dilakukan oleh para juri yang terdiri dari Pusat Komunikasi Publik, Kemenhub, LP3ES, Motor Plus, Kepolisian serta Psikolog.

Gambar 4.27. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2011

h. Monitoring Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2011

Maksud dan Tujuan kegiatan Monitoring Pekan Nasional Keselamatan Jalan adalah sebagai berikut :

1) Menyadarkan bagi para semua instansi baik Instansi Pemerintah, Swasta maupun warga tentang tanggung jawab untuk menekan tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan
2) Sebagai tolak ukur keberhasilan tentang program Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang telah dilakukan di daerah tersebut.
3) Memberikan percepatan pada peningkatan kepedulian seluruh masyarakat dan pengguna jalan akan pentingnya keselamatan jalan yang ditunjukkan dengan perilaku berkeselamatan di jalan.
4) Memberikan pemahaman dan pengenalan yang lebih terhadap mereka yang kurang mengerti terhadap pentingnya keselamatan di jalan, berperilaku selamat di jalan dan berbagi ruang saat di jalan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk yang kedua kalinya di 7 (tujuh) Propinsi yaitu Kota Banda Aceh (Aceh), Bandar Lampung (Lampung), Sukabumi (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Sedangkan di 3

(tiga) Propinsi lainnya merupakan Pelaksanaan Pekan untuk yang pertama kali yaitu Surabaya (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Pekanbaru (Riau).

1) Propinsi Jawa Barat

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Bandung diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/23 Mei 2011

Waktu : 08.30 WIT – selesai

Tempat : Taman Lalu lintas Kota Bandung

Dalam acara ini dihadiri Walikota Dada Rosada didampingi wakil walikota, Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, Direktur Keselamatan Transportasi Jalan Ir Hotma Simanjuntak, Dandim 0618/BS Wawan Hermawan, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat Ricky Saromi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Prio Soebiandono, dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

2) Propinsi Sulawesi Selatan

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Makasar diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin /18 Juli 2011

Waktu : 08.30 WITA – selesai

Tempat : Halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam Acara ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Suroyo Alimoeso, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Ketua DPRD Moh Roem, dan pejabat musyawarah pimpinan daerah (muspida) tingkat provinsi. Kepala daerah se-Sulsel, akademisi, pemerhati transportasi, organisasi transportasi, dan lainnya.

3) Propinsi Bandar Lampung

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Lampung diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis /22 September 2011

Waktu : 08.30 WIT – selesai

Tempat : Halaman Pendopo Pemda Kabupaten Pringsewu

Sebagai penyambutan kedatangan Bupati Pringsewu, Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dan Direktur Keselamatan Transportasi Darat, dibuka dengan Tari Penyambutan "Sigeh Penguten" oleh Tim Tari Gabungan SMA se-Kabupaten Pringsewu. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa instansi dari daerah yang meliputi Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, POLRI, TNI, Pemkab. Pringsewu, Bina Marga, Stakeholder Honda, TK Dharma Wanita, SMA se-Kabupaten Pringsewu serta instansi lain yang peduli keselamatan transportasi jalan.

4) Propinsi Jawa Timur

Upacara Hari Perhubungan Nasional Tahun 2011 dilaksanakan pada hari Kamis, 22 September 2011 pukul 07.30 WIB bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf sebagai Inspektur Upacara serta dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Darat, Ketua DPRD Jatim, Kapolda, Pangdam V Brawijaya, Pangarmatim, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi dan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lanudal). Selain itu, perwakilan dari semua stakeholders di bidang perhubungan juga hadir. Tak ketinggalan juga satu peleton pekerja swasta dan buruh dari berbagai perusahaan juga dihadirkan. Kehadiran mereka ini terasa istimewa, karena profesi inilah yang selama masa angkutan lebaran tahun ini mendominasi angka kecelakaan lalu lintas di jalan.

Usai dilaksanakannya upacara Harhubnas tersebut, Gubernur Jawa Timur, H. Sukarwo melalui Video dan Voice Statementnya mengajak masyarakat Jawa Timur untuk tertib berlalu lintas atau tertib berlaku selamat.

5) Propinsi Aceh

Jalan santai dan sepeda santai yang diikuti oleh 500 peserta dari masyarakat Banda Aceh dan kelompok-kelompok penggemar sepeda bermula dari Taman Sari melintasi jalanan di Banda Aceh dan kembali ke Taman Sari.

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Banda Aceh diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Minggu/25 September 2011

Waktu : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Taman Sari, Banda Aceh

Kegiatan dicanangkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Aceh dan disaksikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat. Pada puncak acara ini dihadiri oleh para *stakeholder* keselamatan jalan seperti Ditlantas Polda Aceh, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, PT. Jasa Raharja Aceh, DPD Organda Aceh dan Masyarakat Transportasi Aceh serta *private sector* dalam hal keselamatan transportasi jalan.

6) Propinsi Nusa Tenggara Timur

Seperti halnya dengan banyak yang terjadi di berbagai negara khususnya negara berkembang di dunia, dan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa perilaku pengguna jalan yang kurang berkeselamatan sebagian besarnya terjadi di Kota Kupang. Perilaku tersebut beberapa diantaranya adalah :

- Sepeda motor yang beroperasi dengan knalpot yang bising, tanpa kelengkapan dan terkadang malam hari tidak menyalakan lampu.
- Angkutan umum dengan kaca gelap, accessories berlebihan dan terkadang berhenti tidak pada tempatnya.
- Kebiasaaan menerobos " lampu merah " di traffic light.
- Parkir dibadan jalan yang menghambat lalu lintas.

serta beberapa perilaku pengguna jalan lainnya yang berdampak besar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

Adapun tujuan dari Aksi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk menggapai perhatian seluruh pihak yang berkaitan dengan keselamatan di tingkat provinsi agar perilaku masyarakat lebih berkeselamatan sehingga tingkat keselamatan di Nusa Tenggara Timur dapat ditingkatkan.

Kegiatan Event meliputi Peresmian Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan yang dikemas dalam bentuk Ceremony, yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur KTD dan Pejabat Kementrian Perhubungan beserta Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tanda dimulainya Kampanye dan Deklarasi Keselamatan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tanggal 27 September 2011.

7) Propinsi Kalimantan Timur

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Balikpapan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/29 September 2011

Waktu : 08.30 WITA – selesai

Tempat : Lapangan Merdeka

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Walikota balikpapan, dan pada puncak acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kasubdit Promosi dan Kemitraan beserta staff serta instansi dari daerah yang meliputi Dinas Perhubungan se-Kalimantan Timur, POLRI, TNI, Pemkab. Balikpapan, Dinas Kesehatan (RSUD), Pramuka, Pertamina, Satpol PP, PMI, Disdik, Astra Honda Motor, Kajari, Kanwil Bea dan Cukai, Dispora Budpar, UNIBA, Yamaha, serta instansi lain yang peduli keselamatan transportasi jalan.

8) Propinsi Kalimantan Barat

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Pontianak diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 16 Oktober 2011

Waktu : 06.00 WIB – selesai

Tempat : Taman Alun-Alun Kapuas

Kegiatan dicanangkan oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Pembangunan dan pada puncak acara ini dihadiri oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Kasi Kemitraan Keselamatan Subdit Promosi dan Kemitraan Keselamatan beserta staff serta instansi dari daerah yang meliputi Dinas Perhubungan Kalimantan Barat, Ditlantas

POLDA Kalimantan Barat, Kemkominfo, Jasa Raharja, Suzuki, Pocari Sweat, serta instansi lain yang peduli keselamatan transportasi jalan.

9) Propinsi Riau

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2011 di Riau diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu /4 Desember 2011

Waktu : 06.30 WIT – selesai

Tempat : Riau Safety Driving Center

Dalam Acara ini dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Wakil Dirlantas Polda Riau Perwakilan DPRD Riau, Kepala Dinas Perhubungan Prop. Riau dan pejabat musyawarah pimpinan daerah (muspida) tingkat provinsi, akademisi, pemerhati transportasi, organisasi transportasi, dan lainnya.

Gambar 4.28. Pekan Nasional Keselamtan Jalan Tahun 2011

i. Workshop Pembentukan Komunitas Keselamatan di Sekolah

Maksud dan tujuan diadakan workshop ini adalah:

1) Masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra selamat di jalan (*road safety agent*).
2) Memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan agar dapat mengelola secara efektif kampanye keselamatan jalan.
3) Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai peningkatan keselamatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan keselamatan yang bersifat nyata.

Tabel 4.43. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Komunitas Keselamatan

No	Waktu	Tempat
1.	5 – 7 Juli 2011	Ratu Hotel Bidakara, Serang
2.	11 – 13 Oktober 2011	Hotel Sahid Jaya, Solo
3.	25 – 27 Oktober 2011	Galeri Ciumbuleuit Hotel, Bandung
4.	7 - 9 November 2011	Hotel Kusuma Agrowisata, Batu

Tabel 4.44. Peserta Workshop Komunitas Keselamatan

No.	Kota Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Serang	30 (tiga puluh) orang: • 3 (tiga) orang Dishubkominfo Provinsi 3 (tiga) orang Dishub Kota • 4 (empat) orang dari Sekolah • 2 (dua) orang dari Kepolisian • 15 (lima belas) orang dari Masyarakat • 3 (tiga) orang dari Muspida
2.	Solo	30 (tiga puluh) orang : • 4 (empat) orang Dishubkominfo Provinsi • 4 (empat) orang Dishub Kabupaten Kota • 8 (delapan) orang dari Sekolah • 1 (satu) orang dari Kepolisian • 12 (dua belas) orang dari Masyarakat • 1 (satu) orang dari Muspida
3.	Bandung	27 (dua puluh tujuh) orang : • 6 (enam) orang Dishub Kota • 2 (dua) orang dari Sekolah • 2 (dua) orang dari Kepolisian • 12 (dua belas) orang dari Masyarakat • 5 (lima) orang dari Muspida
4.	Batu, Malang	31 (tiga puluh satu) orang : • 7 (tujuh) orang Dishub Kabupaten Kota • 2 (dua) orang dari Kepolisian • 20 (dua puluh) orang dari Sekolah • 2 (dua) orang dari Muspida

j. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan

Maksud dan tujuan diadakan workshop ini adalah:

1) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan agar dapat mengelola secara efektif kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2) Meningkatkan kepedulian instansi terkait (Dinas Perhubungan) mengenai peningkatan keselamatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan keselamatan yang bersifat nyata.

Tabel 4.45. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan

No	Waktu	Tempat
1.	20 - 22 Juli 2011	Hotel Horizon, Bengkulu
2.	22 – 24 November 2011	Swiss Inn Hotel, Batam

Tabel 4.46. Peserta Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan

No	Kota Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Bengkulu	24 (dua puluh empat) orang: • 10 (sepuluh) orang Dishub Provinsi • 12 (dua belas) orang Dishub Kabupaten • 2 (dua) orang Dishub Kota
2.	Batam	19 (sembilan belas) orang: • 4 (empat) orang Dishub Provinsi • 9 (sembilan) orang Dishub Kabupaten • 6 (enam) orang Dishub Kota

k. Pencanangan Hari Korban Kecelakaan "Rememberence Victim Day"

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Resolusi PBB No. 62/44 tanggal 25 Juli 2008 tentang Improving Road Safety". Dalam rangka Rememberence Victim Day Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Sosialisasi Keselamatan Jalan dengan tema "Selamatkan Anak Bangsa" pada minggu ke-3 bulan November dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Seremonial, dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011 di Ruang Rapat Mataram, Kementerian Perhubungan dan dibuka oleh Menteri Perhubungan;
2. Talk Show Radio, dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 1-14 Desember 2011 di Radio KBRH 68;
3. Theatrical Jalanan, dilaksanakan di Jalan Merdeka Barat no. 8, Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2011. Theatrical jalanan ini menyampaikan pesan keselamatan melalui tarian yang berjudul "Zebra Cross".

Gambar 4.29. Pencanangan Hari Korban Kecelakaan ”Rememberence Victim Day” oleh Menhub.

l. Sosialisasi Melalui Media Cetak

Untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan sosialisasi melalui media cetak, seperti ayahh bunda, bobo, hidayah, media indonesia, motor plus, otomotif dan tempo.

Gambar 4.30. Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak

m. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP/AKDP Angkatan XXVII

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi angkutan umum AKAP/AKDP meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, selain itu juga meningkatkan palayanan kepada para penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap perilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya;
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan AKAP/AKDP dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib;
3) Menyiapkan pengemudi angkutan umum AKAP/AKDP yang handal sehingga bermanfaat bagi pengusaha perusahaan otobus yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya;
4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik;
5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 April 2011 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kementerian Pendidikan Nasional, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

n. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi Bandara Soekarno-Hatta Angkatan VII Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi Bandara Soekarno-Hatta meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, selain itu juga meningkatkan palayanan kepada para penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap perilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya;
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan taksi dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib;
3) Menyiapkan pengemudi taksi Bandara Soekarno-Hatta yang handal sehingga bermanfaat bagi pengusaha perusahaan otobus yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya;
4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik;
5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-9 Mei 2011 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kementerian Pendidikan Nasional, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

o. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2011

Maksud kegiatan ini adalah untuk mendudukkan insan Awak Kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara memberikan motivasi serta penghargaan terhadap profesinya. Pemilihan serta sebagai sosialisasi peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang berskala nasional melalui pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP, AKDP, Taksi/Sewa, Perkotaan, dan Pariwisata.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan umum yang baik guna mempersiapkan Awak Kendaraan Umum yang berkualitas, berdisiplin dan bertanggung jawab.
2) Untuk mendorong terwujudnya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan terutama yang disebabkan oleh faktor pengemudi.
3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap perilaku/unjuk kerja Awak Kendaraan Umum.
4) Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pengemudi angkutan umum dalam profesi yang digelutinya.

Kegiatan Pemilihan Awak KendaraanUmum Teladan (AKUT) dilaksanakan dengan prinsip senyaman mungkin bagi semua pihak, baik panitia, peserta, maupun pengelola tempat kegiatan. Jadwal kegiatan pemilihan AKUT sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, maka pada tahun 2011 ini bulan September jatuh pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011, sehingga penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan 2 (dua) tahap. Tahap Pertama adalah rangkaian penilaian sampai dengan penentuan peserta terbaik dan penambahan wawasan berupa penyampaian materi, diskusi, kunjungan ke instansi-instansi terkait dan wisata yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 19 September 2011 sedangkan untuk tahap kedua adalah pemberian penghargaan berupa Sertifikat dan Tropi (piala) kepada peserta Terbaik 1 oleh Menteri

Perhubungan yang bertepatan dengan Upacara Hari Perhubungan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011.

Tempat pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional Tahun 2011 adalah di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Depdiknas, Jln. Nangka, No.60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Jumlah peserta yang mengikuti Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional Tahun 2011 adalah sebayak 53 orang yang mewakili 29 propinsi. Sebanyak 4 propinsi menyatakan tidak berpartisipasi dalam Pemilihan AKUT Tingkat Nasional Tahun 2011 yaitu : DI. Yogyakarta, Papua, Irian Jaya Barat dan Sulawesi Tenggara.

p. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahayadan Beracun (B3) Angkatan VII Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada para penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah :

1) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan aman, selamat, nyaman,

cepat dan tertib.

3) Menyiapkan pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan B3 yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya.
4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas dan penuh rasa syukur.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Angkatan VII Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 21 Juli Tahun 2011 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Depdiknas, Pemerintah Provinsi DKI, Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

q. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Perkotaan/Angkutan Pedesaan Angkatan III Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan kepada pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan guna memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta peningkatan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengubah pola pikir dan cara pandang para pengemudi angkutan umum terhadap profesinya sehingga dapat mengubah perilakunya dan secara tidak langsung akan turut berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dijalan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program aksi kepada para pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan adalah :

1) Memberikan kesadaran terhadap harkat dan martabat profesi pengemudi angkutan umum dan peran penting pengemudi angkutan umum dalam

sistem tranportasi jalan.

2) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi resiko kematian/fatalitas dalam kecelakaan.
3) Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan terutama sikap perilaku (attitude) pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan dalam berkendaraan dan berlalu lintas.
4) Meningkatkan jumlah pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan yang telah mengikuti program aksi.

Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum Angkatan III Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 21 Oktober Tahun 2011 bertempat di River Hill, Jl. Sekrincing, Pintu Masuk II, Grojogan Sewu, Tawamangu – Solo, Jawa Tengah.

Peserta pendidikan dan penyuluhan peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan umum Angkatan ke III ini diikuti oleh 40 peserta.

r. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Perkotaan/Angkutan Pedesaan Angkatan IV Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan kepada pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan guna memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta peningkatan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengubah pola pikir dan cara pandang para pengemudi angkutan umum terhadap profesinya sehingga dapat mengubah perilakunya dan secara tidak langsung akan turut berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dijalan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program aksi kepada para pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan adalah :

1) Memberikan kesadaran terhadap harkat dan martabat profesi

pengemudi angkutan umum dan peran penting pengemudi angkutan umum dalam sistem tranportasi jalan.

2) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi resiko kematian/fatalitas dalam kecelakaan.
3) Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan terutama sikap perilaku (attitude) pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan dalam berkendaraan dan berlalu lintas.
4) Meningkatkan jumlah pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan yang telah mengikuti program aksi.

Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum Angkatan III Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 28 Oktober Tahun 2011 bertempat di River Hill, Jl. Sekrincing, Pintu Masuk II, Grojogan Sewu, Tawamangu – Solo, Jawa Tengah.

Gambar 4.31. Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum

s. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Awak Kapal Sungai dan Danau di Kota Samarinda dan Kota Palembang

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersusun suatu program aplikasi database awak kapal sungai dan danau dan penyebrangan sebagai landasan terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen awak kapal sungai

dan danau yang aplikatif untuk pembinaan dan pengembangan informasi awak kapal sungai dan danau di seluruh Indonesia.

Adapun tujuan dari pelatihan database Sistem Informasi Transportasi Sungai dan Danau ini adalah diperolehnya pendataan yang akurat dan terbangunnya sistem informasi manajemen yang komprehensif yang selanjutnya bermanfaat untuk pembinaan SDM awak kapal sungai dan danau yang berkualitas dan profesional sehingga dapat turut mencegah terjadinya kecelakaan di sungai dan danau, serta dapat meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi di sungai dan danau.

Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Awak Kapal ASD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kota Samarinda dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 November 2011 di Hotel MJ, Jl. KH. Khalid No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur.

Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Awak Kapal ASD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kota Samarinda ini diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) Instansi Dinas Perhubungan Kab/Kota dan Provinsi. Berikut ini data-data peserta yang mengikuti kegiatan tersebut :

1) Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur berjumlah 8 Peserta
2) Dinas Perhubungan Kota Samarinda berjumlah 12 Peserta
3) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berjumlah 2 Peserta
4) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur berjumlah 2 Peserta
5) Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 4 Peserta
6) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 4 Peserta
7) Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam berjumlah 3 Peserta
8) Dinas Perhubungan Kota Tarakan berjumlah 1 Peserta
9) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berjumlah 4 Peserta

Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Awak Kapal ASD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kota Palembang

dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 November 2011 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jl. Tasik No. 2 Palembang, Sumatera Selatan – Indonesia.

Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Awak Kapal ASD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kota Palembang ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari 6 (enam) Instansi Dinas Perhubungan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang kegiatan Angkutan Sungai dan Danaunya sangat aktif yaitu :

- Kota Palembang;
- Kabupaten Oki;
- Kabupaten Banyuasin;
- Kabupaten Ogan Ilir;
- Kabupaten Muba;
- Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 4.32. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Awak Kapal Sungai dan Danau

t. Program Aksi Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum Pariwisata di Provinsi Bali dan Aceh

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan kepada pengemudi angkutan pariwisata adalah untuk meningkatkan *attitude* dengan wawasan dan pengetahuan serta peningkatan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengubah pola pikir dan cara pandang para pengemudi angkutan pariwisata terhadap profesinya sehingga dapat

mengubah perilakunya dan secara tidak langsung akan turut berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dijalan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program aksi kepada para pengemudi angkutan pariwisata adalah :

1) Memberikan kesadaran terhadap harkat dan martabat profesi pengemudi angkutan umum dan peran penting pengemudi angkutan umum dalam sistem tranportasi jalan.
2) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi resiko kematian/fatalitas dalam kecelakaan.
3) Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan terutama sikap perilaku (attitude) pengemudi angkutan pariwisata dalam berkendaraan dan berlalu lintas.
4) Meningkatkan jumlah pengemudi angkutan pariwisata yang telah mengikuti program aksi.

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum Pariwisata Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2011 – 1 Desember 2011 di Hotel Palm Beach Bali.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan umum Antar Kota, Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 November Tahun 2011 di Hotel Lading, kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

u. Monitoring Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengawasi, mengevaluasi dan menilai hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti kesiapan pelaksanaan, kurikulum, materi, tata cara, durasi diklat, pengajar, mekanisme penyelenggaraan, baik yang terkait dengan administrasi, anggaran, kepanitiaan, dan lain – lain agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran dan manfaat secara optimal.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah :

1) Terlaksananya kegiatan di daerah sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan terhadap pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah yang ada.
3) Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan di daerah.
4) Untuk mendorong perhatian pemerintah daerah untuk bersama – sama dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan terhadap pengemudi/awak angkutan umum sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5) Agar adanya kesamaan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Informasi Pelaksanaan di berbagai Provinsi :

1) Provinsi Sulawesi Selatan

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi Sulawsei Selatan Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Juli 2011 bertempat di Hotel Losari Metro Jalan Chairil Anwar, Makassar.

Peserta pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 diikuti oleh 25 peserta dari Kabupaten / Kota.

2) Provinsi Kalimantan Barat

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 diselenggarakan di HOTEL 95, Jl. Imam Bonjol No.95 Pontianak mulai tanggal 25 s/d 28 Juli 2011.

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 diikuti oleh 11 (sebelas) peserta.

Hasil Akhir Penilaian

3) Provinsi Riau

Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juli 2011 bertempat di Hotel Resty Menara, Jalan Sisingamangaraja Riau.

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2011 diikuti oleh 10 peserta dari Kabupaten / Kota.

4) Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Juli 2011 bertempat di Kampus "SASANA WIDYA PRAJA" Komplek Diklat Sumbing Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Jl Setiabudi Nomor 201 A Semarang

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 diikuti oleh 35 peserta dari Kabupaten / Kota.

5) Provinsi Jawa Timur

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 diselenggarakan di Wisma Haji, Jln. Raya Juanda - Sidoarjo pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2011.

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 orang yang berasal dari Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

6) Provinsi Gorontalo

Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 22-24 Agustus 2011 bertempat di Dishubpar Provinsi Gorontalo.

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2011 diikuti oleh 12 peserta dari Kabupaten / Kota.

7) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2011 bertempat di Hotel Romyta, Kupang.

Peserta Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 diikuti oleh 25 peserta dari Kabupaten / Kota.

8) Provinsi Sumatera Barat

Berbeda dengan monitoring yang lain, di Sumatera Barat yang menjadi objek monitoring adalah program Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengemudi Angkutan Umum Sumatera Barat Tahun 2011 dengan detail pemantauan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengemudi Angkutan Umum Sumatera Barat Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 September 2011 bertempat di Pangerans Beach Hotel Jl. Ir. H. Juanda 79, Padang.

v. Peningkatan Kapasitas Investigasi Kecelakaan ASDP Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan tentang ruang lingkup investigasi kecelakaan ASDP, tata cara pelaksanaan serta teori pendukung yang relevan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Memberikan pemahaman dan pelatihan pelaksanaan investigasi kecelakaan ASDP sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi dasar memadai untuk diarahkan sebagai investigator kecelakaan ASDP.

2) Mendorong petugas investigator kecelakaan ASDP agar dapat melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kecelakaan serupa dikemudian hari.
3) Meminimalkan dan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ASDP Sebagai salah satu usaha dalam mendukung program keselamatan lalu lintas ASDP.

Kegiatan penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan peserta yang profesional dalam melaksanakan investigasi kecelakaan ASDP serta menumbuhkan kembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam melakukan investigasi kecelakaan ASDP serta memberikan usulan perbaikan sebagai upaya preventif pencegahan kecelakaan lalu lintas agar tidak terulang kembali kecelakaan serupa.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Investigasi Kecelakaan ASDP Angkatan VIII, IX, X dilaksanakan di 3 (Tiga) Kota dengan jumlah peserta di masing-masing lokasi 30 (Tiga Puluh) peserta, yaitu :

1) Angkatan VIII di Kota Palembang, Sumatera Selatan, diselenggarakan di Hotel Royal Asia pada tanggal 07 s/d 09 Juni 2011;
2) Angkatan IX di Kota Medan, Sumatera Utara, diselenggarakan di Hotel Danau Toba pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2011;
3) Angkatan X di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diselenggarakan di Hotel Luwansa pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2011.

w. Monitoring Pembinaan Dan Pelaksanaan Investigasi Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas ASDP Tingkat Provinsi

Kegiatan Monitoring Pembinaan Dan Pelaksanaan Investigasi Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas ASDP Tingkat Provinsi ini dimaksudkan antara lain adalah :

1) Untuk mengetahui dan memotret sejauh mana kegiatan investigasi dan penelitian telah dilakukan oleh Instansi Perhubungan di daerah baik propinsi maupun kab/kota atas kejadian kecelakaan diwilayah/di daerah kerja masing-masing;

2) Untuk dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada Instansi Perhubungan daerah agar melakukan kegiatan investigasi dan penelitian terhadap kejadian kecelakaan diwilayah/daerah masing-masing, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan bisa didapatkan data dan informasi yang akurat tentang kejadian suatu kecelakaan, melakukan evaluasi dan analisa terhadap penyebab terjadinya kecelakaan tersebut serta dapat memberikan rekomendasi dan program aksi yang diperlukan agar kejadian kecelakaan yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang;
3) Untuk dapat mengetahui sejauh mana koordinasi pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap daerah kab/kota yang ada di wilayahnya masing-masing;
4) sebagai bahan pendukung dalam upaya penciptaan dan pengembangan pola pembinaan dan program keselamatan transportasi darat yang terarah, terukur, terpadu serta berkesinambungan, mulai dari pusat, propinsi sampai dengan kabupaten/kota;

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan monitoring ini antara lain adalah:

1) Terwujudnya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota dalam menyikapi perlunya dilaksanakan kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas ASDP ;
2) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal pelaporan dan penyajian data dan informasi kecelakaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Monitoring Pembinaan Dan Pelaksanaan Investigasi Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas ASDP Tingkat Provinsi tahun 2011 dilaksanakan di 4 (empat) kota yaitu :

1) Palangkaraya, diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2011;
2) Denpasar, diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2011;
3) Medan, diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2011;
4) Banjarmasin, diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2011;

5) Pangkal Pinang, diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2011;
6) Pontianak, diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2011;
7) Samarinda, diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2011;
8) Semarang, diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2011.

Peserta Monitoring Penelitian Kecelakaan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Tingkat Provinsi pada masing-masing Provinsi diikuti oleh :

1) Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh 50 peserta;
2) Provinsi Bali diikuti oleh 24 peserta;
3) Provinsi Sumatera utara diikuti oleh 42 peserta;
4) Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh 22 peserta;
5) Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh 35 peserta;
6) Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh 37 peserta;
7) Provinsi Kalimantan Timur utara diikuti oleh 35 peserta
8) Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh 41 peserta

x. Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan ASDP

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang audit keselamatan alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan ASDP Angkatan X, XI dilaksanakan di 2 (Dua) Kota yaitu :

Angkatan X di Kota Ambon, Maluku, diselenggarakan di Hotel Ambon Manise pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2011;

Angkatan XI di Kota Padang, Sumatera Barat, diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach pada tanggal 24 s/d 26 Mei 2011;

Dengan jumlah peserta di tiap provinsi sebanyak 30 orang.

y. Peningkatan Kapasitas Inspeksi Keselamatan LLAJ Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan tentang ruang lingkup Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

tata cara pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta teori pendukung yang relevan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Inspeksi Keselamatan LLAJ adalah :

1) Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan inspeksi keselamatan.
2) Mendorong petugas/aparatur perhubungan dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan serupa dikemudian hari.
3) Meminimalkan dan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
4) Sebagai salah satu usaha dalam mendukung program keselamatan LLAJ.

Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Inspeksi Keselamatan LLAJ tahun 2011 Angkatan I, II, III, IV, V dan VI dilaksanakan di 6 (enam) kota besar yaitu :

1) Angkatan I di Kota Palu Sulawesi Tengah, diselenggarakan di Hotel Rama Garden pada tanggal 13 September – 15 September 2011 dengan jumlah peserta 26 orang;
2) Angkatan II di Kota Semarang , Jawa Tengah diselenggarakan di Hotel Quest pada tanggal 20 September - 22 September 2011 dengan jumlah peserta 30 orang;
3) Angkatan III di Kota Surabaya, Jawa Timur, diselenggarakan di Hotel Twin Garden pada tanggal 4 Oktober - 6 Oktober 2011 dengan jumlah peserta 30 orang;
4) Angkatan IV di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, diselenggarakan di Hotel Grand Mahkota pada tanggal 11 Oktober - 13 Oktober 2011 dengan jumlah peserta 25 orang;
5) Angkatan V di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diselenggarakan di Hotel Lombok Plaza pada tanggal 18 Oktober – 20 Oktober 2011 dengan jumlah peserta 30 orang;
6) Angkatan VI di Kota Denpasar, Bali, diselenggarakan di Hotel Santika pada tanggal 25 Oktober – 27 Oktober 2011 dengan jumlah peserta 28 orang.

z. Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan ASDP Tahun 2011

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang audit keselamatan alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan ASDP Angkatan X, XI dilaksanakan di 2 (Dua) Kota yaitu :

1) Angkatan X di Kota Ambon, Maluku, diselenggarakan di Hotel Ambon Manise pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2011 dengan jumlah peserta 30 orang;
2) Angkatan XI di Kota Padang, Sumatera Barat, diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach pada tanggal 24 s/d 26 Mei 2011 dengan jumlah peserta 30 orang;

4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

a) Permasalahan

(1) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa jumlah meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2010 sebanyak 31.234 orang dan pada tahun 2011 mencapai 31.185 orang.

(2) Belum jelasnya arah penanganan keselamatan jalan, hal ini disebabkan belum adanya rencana umum bidang keselamatan jalan sehingga di dalam penanganan keselamatan bersifat sporadif, parsial, dan diskontinyuitas. Hal ini hanya menghasilkan pemborosan anggaran Negara.

(3) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan.

(4) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan.

b) Upaya Pemecahan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat antara lain sebagai berikut :

(1) Program-program revitalisasi batas kecepatan (*speed limits*) berikut pemantauan dan penindakan pelanggarannya, upaya penjinakan arus lalu lintas (*traffic calming*), penggunaan helm pengaman dan sabuk keselamatan, alat-alat penegas keberadaan sepeda motor dan pengendaranya (*conspicuity*), serta pembuatan/penempatan lajur-lajur khusus sepeda motor disarankan untuk diimplementasikan secara lebih intensif dalam 5 tahun ke depan.

(2) Telah ditetapkan Rencana Umum Keselamatan Nasional Keselamatan Angkutan Jalan.

(3) Direktorat KTD melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kem. Pekerjaan Umum, Kem. Kesehatan, Kem. Pendidikan Nasional).

B A B V
KINERJA UPT DAN BUMN
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

A. KINERJA UPT

1. UPT BPLJSKB BEKASI

a. Kondisi BPLJSKB Saat Ini

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi merupakan salah satu UPT dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang bertugas untuk melakukan pengujian beberapa jenis/tipe kendaraan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut laik jalan atau tidak memiliki sarana pengujian yang terdiri dari :

1) Alat Pengujian *Passenger Car*
   a) Side Slip (Banzai)
   b) Brake Tester (Banzai)
   c) Speed Tester (Anzen)
   d) Axle Load Meter (Banzai)
   e) Smoke Tester (Banzai)
   f) Gasoline Gas Analyzer (Autocheck)
   g) Car Lift
2) Alat Pengujian Sepeda Motor
   a) Brake Tester (Saxon)

b) Speed Tester (Saxon)

c) Head Light Tester (L.E.T Automotive)

d) Sound Level Meter (Saxon)

e) Exhaust Blower

3) Alat Pengujian Bus dan Truck

a) Head Light Tester (Anzen)

b) Side Slip (Banzai)

c) Brake Tester (Banzai)

d) Speed Tester (Anzen)

e) Axle Load Meter (Banzai)

f) Load Simulator (Rice Lake)

4) Electrik Generating Set (EGS)

a) Genset Merk Deutz

b) Pengadaan Solar

5) Trafo

a) Trafo 1 Merk Union

b) Trafo 2 Merk Centrado

6) Alat uji Emisi Uero 2

a) Jenis M1

b) Jenis L

Peralatan uji type yang dimiliki oleh BPLJSKB masih ada yang berumur lenih dari 25 tahun, sehingga sering mengalami masalah dalam pelaksanaan pengujian. Peralatan tersebut terdiri dari :

1) *Head Light Tester* yang dimiliki saat ini masih sama dengan tahun lalu hanya baik untuk mengukur kekuatan pancar cahaya lampu yang fokus

dan masih sulit untuk mengukur dari cahaya bias, dengan standard satuan ukur candela. Pembacaan hasil uji secara visual dialat uji dan hasil print-out selalu menunjukan selisih untuk itu perlu disesuaikan. Stabilizer untuk meluruskan kendaraan uji terhadap alat uji juga tidak berfungsi. Untuk saat ini kemampuan ukur kekuatan pancar cahaya lampu sudah berkurang, sehingga yang seharusnya jarak ukur dari 3 meter standar alat uji, dirubah menjadi 1 meter;

2) Side Slip yang ada menggunakan alat ukur digital dan analog. Penunjuk alat ukur digital dan alat ukur analog selalu berbeda, sehingga dalam pengukuran selalu digunakan hasil uji yang dibaca oleh alat ukur analog untuk itu disarankan masih diperlukan perbaikan alat uji side slip.

3) Pemeriksaan kontruksi/bagian bawah (kolong) untuk menjaga jaminan keselamatan penguji saat melakukan pengujian pemeriksaan bagian bawah atau kolong kendaraan dengan alat carlift yang memiliki satu kaki hidrolik (one post), saat ini telah dibangun pit lift (jembatan uji)sebagai penggantinya, namun masih ada kendala untuk mobil penumpang dengan ground clearance rendah tidak dapat naik keatas jembatan uji, karena dapat membentur besi pengaman roda, oleh karena itu besi pengaman roda yang terletak pada sisi dalam jembatan uji agar bisa dihilangkan dan sudut naik jembatan agar dibuat lebih landai supaya pemeriksaan bagian kendaraan bermotor bisa dilakukan secara maksimal.

4) Brake tester untuk mobil barang, keseharian dipergunakan untuk uji semua jenis kendaraan uji, saat dipakai dial indikator tidak menunjukkan hasil yang tepat dikarenakan ada komponen yang sudah aus sehingga

kinerja alat uji tidak maksimal. Alat uji rem untuk mobil penumpang yang telah dimodifikasi menjadi digital selalu ada selisih angka antara yang tercatat digital dengan analog untuk itu pengujian sering dilakukan berulang kali. Pembacaan dengan mata sangat sulit mengingat angka bergerak dengan cepat. Untuk itu alat uji ini masih perlu terus disempurnakan. Sedang alat uji rem untuk mobil barang (truck) dengan tenaga penggerak serentak (khususnya untuk jenis tandum) tidak dapat diuji dikarenakan alat uji yang ada tidak memiliki fasilitas boogie roller.

5) Axle load tester, alat yang dimiliki ada dua unit dimana satu unit memiliki kapasitas maximum tiap sumbu 10.000 kg dengan indikator digital dengan hasil timbangan kelipatan 5 kg, dan satunya lagi memiliki kapasitas maximum tiap sumbu 3.000 kg dengan indikator digital dengan hasil timbangan kelipatan 0.5 kg. Untuk hasil penimbangan terhadap kendaraan yang sama selalu didapat selisih antara 5 kg s/d 10 kg, walaupun perbedaan ini kecil bila dibandingkan dengan berat kendaraan tapi tetap masih dibutuhkan perbaikan secara keseluruhan baik sistim elektronik dan mekanik.

6) Speedometer tester, yang saat ini beroperasi hanya untuk mobil penumpang dengan sistim penggerak roda 4x2. Untuk kendaraan besar penggerak serentak (Tandum) kendaraan tiga sumbu pengujian speedometer tidak dapat dilakukan, karena alat uji speedometer yang ada hanya untuk kendaraan light truck, sehingga perlu pengadaaan Alat uji speedometer untuk kendaraan besar berikut Boogie roller. Untuk itu pengujian speedometer kendaraan bermotor tandum dan kendaraan uji

yang memiliki sistim sensor penggerak pada seluruh roda diuji secara visual.

7) Pengujian emisi gas buang, saat ini hanya menggunakan alat uji merek AVL yang sebenarnya diperuntukan khusus untuk operasional di gedung uji emisi euro-2 dan 1 (satu) unit alat uji emisi untuk mengukur gas buang (ketebalan asap).

8) Pengujian dimensi, masih menggunakan alat manual dengan menggunakan alat ukur meteran metal (meteran gulung), water pass, bandul (lot) dan batang alumunium.

9) Pengukuran radius putar dilakukan di luar gedung sehingga mempunyai kendala saat cuaca hujan dengan demikian diperlukan sarana pengujian radius putar yang statis (didalam gedung).

Pada tahun 2011 Balai Pengujian telah melakukan penambahan beberapa alat pengujian baru serta penunjang teknis seperti :

1) Alat Uji Passanger Car (Saxon)
   a) Sideslip Tester (Saxon)
   b) Speed Tester (Saxon)
   c) Sound Level Meter (Saxon)
   d) Gas Analyzer (Saxon)
   e) Smoke Meter (Saxon)
   f) RPM Meter
   g) Chassis Tester (Saxon)
   h) Roller Brake Tester (Saxon)
   i) Joint Play Detector (Saxon)

j) Headlight Tester (L.E.T Luminoscope)

k) Vehicle Weighing System (Unipulse)

2) Speed Testing for Motor Cycle (Penggerak Depan)

Motorcycle Speedometer Tester (Saxon)

b. Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPLJSKB antara lain :

1. Peralatan uji tipe yang ada di Balai PLJSKB rata-rata usianya sudah mencapai 27 tahun sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif. Untuk itu diperlukan *backup* peralatan dan pengadaan alat pengujian baru yang sesuai dengan teknologi otomotif yang mutakhir.
2. Sebagian besar pegawai di Balai Pengujian sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga diperlukan tenaga-tenaga muda sebagai pengganti yang pensiun, khususnya untuk tenaga penguji.
3. Terbatasnya staf yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Teknik atau yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam pengembangan Balai PLJSKB mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk pengembangan Balai kedepan.
4. Diperlukan dana yang sangat besar untuk pengembangan pengujian tipe di Balai PLJSKB, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi otomotif yang berkembang sangat pesat.
5. Diklat-diklat teknis yang menunjang pekerjaan bagi para pegawai yang ada di Balai PLJSKB masih cukup terbatas.

c. Upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perlu ditingkatkan pertemuan – pertemuan rutin untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dilingkungan BPLJSKB dengan instansi pembina (seperti LLAJ dan Sesditjen), sehingga dari segi SDM tumbuh keakraban, suasana kerja yang baik serta motivasi kerja yang baik pula. Dari segi program akan lebih terorganisir, terkordinasi dan terarah untuk menjadikan Balai PLJSKB yang mendapat pengakuan Global.
2. Penjadwalan dan prioritas terhadap program perbaikan / penggantian / pengadaan peralatan pengujian, utilitas, computer, jaringan khusus untuk akses internet, lemari file dan lain-lain memerlukan manajemen yang lebih baik dengan program yang lengkap, khusus untuk program pekerjaan dengan biaya yang relative besar pembuatan data dukungnya sebaiknya dilaksanakan melalui jasa konsultasi. Mengingat pekerjaan ini cukup rumit dan keterbatasan kemampuan staf Balai PLJSKB
3. Perlu disediakan dana yang cukup untuk pengembangan Balai PLJSKB dan perawatan seluruh alat yang akan dilakukan dengan sistem *contract*.
4. Perlu penambahan sarjana teknis baru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pengujian, teknologi kendaraan bermotor dan teknologi peralatan pengujian saat ini.
5. Mengingat peralatan uji emisi gas buang EURO-2 memerlukan perawatan ketelitian yang tinggi serta gas kalibrasi yang masih diimport, serta belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan kalibrasi disarankan untuk menyediakan dana yang cukup dalam pelaksanaan *Maintenance Contract*.

2. UPT PENYEBERANGAN

a. UPT. Penyeberangan Kalabahi

1) Kondisi Saat Ini

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mengawali pengoperasiannya sejak pertengahan tahun 1994 membawa dampak sosial dan ekonomi positif terutama ketersediaan fasilitas bongkar muat yang memadai dan dapat memperlancar mobilisasi, distribusi kebutuhan pokok kendaraan maupun penumpang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di kawasan penyeberangan.

UPT. Penyeberangan Kalabahi selama Tahun 2010 telah melayani 3 (tiga) lintasan yaitu :

a) Kalabahi – Kupang (2 kali seminggu)

b) Kalabahi – Teluk Gurita (2 kali seminggu)

c) Kalabahi – Baranusa Hingga Larantuka (2 kali seminggu)

Lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian sedangkan untuk lintasan masing-masing dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita dan Baranusa hingga Larantuka dilayani oleh kapal tipe 175 gt yang *home base* nya di pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sedangkan untuk kapal lainnya setelah bonglar muat barang dan penumpang langsung diberangkatkan.

Selain dengan kesediaan layanan angkutan yang menimbulkan animo masyarakat akan jasa dimaksud maka seringkali terjadi kekosongan pelayanan lintasan khusus untuk lintasan dari Kalabahi tujuan Teluk

Gurita dan Baranusa hingga Agustus dikarenakan adanya *docking* tahunan dan tidak tersedianya kapal pengganti dan hal tersebut sudah disampaikan kepada operator tapi sampai sekarang belum ada realisasi.

Hal ini menyangkut pengawasan 2 asset pelabuhan masing-masing berlokasi di Maritaing dan Bakalang telah dilakukan pengawasan berikut pelaporan dan sesuai arahan dari Pemerintah Daerah setempat saat pengwasan mengharapkan kiranya asset tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

a) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

(1) Urusan Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi maka aspek ketersediaan personil (pegawai) cukup penting menyangkut kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2010 memperoleh tambahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang dan kontrak lanjutan tenaga honorer sebanyak 13 orang

Tabel V.2 Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S I	D.III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Penata	III/c	-	-	1	-	-	1
2.	Penata Muda Tk.I	III/b	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda	III/a	1	-	-	-	-	1
4.	Pengatur	II/c	-	4	1	-	-	5
5.	Honorer	-	1	1	7	2	2	13
J u m l a h			**3**	**5**	**9**	**2**	**2**	**21**

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2011.

(2) Tata Kelola Keuangan

i. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Mengingat volume kegiatan yang relatif kecil maka penyetoran BNPB dilakukan 2 (dua) minggu sekali selanjutnya akumulasi setoran dan dilaporkan setiap akhir bulan.

Untuk target PNPB Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Desember 2010 baru mencapai Rp. 19.134.973,- atau 76.54% hal tersebut dikarenakan volume kegiatan yang relatif kecil dan mobilitas kapal yang hanya melayani 3 (tiga) lintasan.

ii. Anggaran Rutin

Pada tahun Anggaran 2010 Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi mendapat alokasi dana rutin Rp. 1.450.964.000,-. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional yang sampai dengan bulan Desember mencapai Rp.

1.133.294.920,- atau 128,03% dari keseluruhan dana tersebut untuk meningkatkan daya serap khusus terkait belanja modal yang bertanda bintang berupa kegiatan pembangunan gedung operasional 2 (dua) unit masing-masing berukuran 36 m2 dan pengadaan pakaian dinas.

iii. Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN)

Keberadaan barang inventaris milik negara sebagai sarana penting untuk mendukung optimalisasi kegiatan kepelabuhanan. Pelabuhan Penyeberngan Kalabahi telah melakukan inventarisasi dan pelaporan berkala meliputi keseluruhan barang yang dimiliki termasuk 2 (dua) bidang tanah berikut dermaga plengsengan milik Kementerian Perhubungan dengan status hak pakai.

b) Bidang Operasional

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi selama tahun 2010 telah melayani 3 (tiga) lintasan dimana lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian. Data produksi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi tahun 2010 dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3 Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010

No	Keterangan	Turun/Bongkar	Naik/Muat
1.	Penumpang Dewasa	30.782	24.838
2.	Penumpang Anak	1.219	1.251
3.	Golongan I	-	-
4.	Golongan II	3.259	1.670
5.	Golongan III	144	287
6.	Golongan IV	136	197
7.	Barang (Ton)	1.083	623

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2010.

2) Permasalahan yang dihadapi

a) Dengan selesai dibangunnya dermaga II (plengsengan) tidak bisa langsung digunakan karena belum tersedia fasilitas tambat yang memadai

b) Mengingat lebih dari 50% status pegawai adalah tenaga kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja secara optimal

c) Daya serap realisasi DIPA yang masih dirasakan kurang karena ada sebagai dana berupa Belanja Modal yang todak dapat dicairkan sehingga mempengaruhi presentasi daya serap DIPA 2010

d) Alokasi anggaran perjalanan dinas yang relatif kecil sehingga menganggu kegiatan lintas komunikasi yang ,esti dilakukan secara regular maupun insidentil

e) Dengan ditolaknya usulan pencairan dana tanda bintang berupa pembangunan gedung operasional maka membutuhkan waktu yang cukup agar dapat diusulkan kembali mengingat legalitas lahan.

3) Upaya yang dilakukan

a) Mengusulkan untuk digunakannya dermaga II (plengsengan) dengan kegiatan tambat yang dilengkapi dengan fasuilitas tambat

b) Akan diusulkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi pegawai untuk diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan.

c) Mengingat Perolehan pencairan pembangunan gedung operasional adalah berupa persyaratan dan legalitas lahan maka dapat dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah Alor karena yang menjadi persyaratan bukan hanya ijin kelola lahan dari Bupati Alor tapi sertifikat hak pakai.

d) Mengusulkan dengan data dukung agar alokasi DIPA dapat mencakup keseluruhan Perjalanan dinas Pada tahun Anggaran berjalan.

e) Kiranya setiap usulan fisik kendalanya lebih melihat kepada aspek legalitas sebagai bagian dari persyaratan.

b. UPT. Penyeberangan Kariangau

1) Kondisi Saat Ini

Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang dibawahi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau melayani 3 (tiga) lintasan penyeberangan, yaitu :

1. Lintasan Balikpapan – Penajam (lintas antar Kabupaten – Kota)
2. Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Mamuju (Sulawesi Barat)
3. Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Taipa (Sulawesi Tengah)

Dengan kese4luruhan armada berjumlah 12 (dua belas) unit kapal motor penyeberangan beroperasi pada masing-masing lintasan adalah:

1. Balikpapan – Penajam :
   a. KMP. Bili - PT. ASDP Indonesia Ferry
   b. KMP. Kambaniru - PT. ASDP Indonesia Ferry
   c. KMP. Trunojoyo - PT. Dharma LautanUtama
   d. KMP. Ulin Ferry - PT. Dharma Lautan Utama
   e. KMP. Tawes - PT. Pasca Dana Sundari
   f. KMP. Kineret - PT. Sadena Mitra Bahari
   g. KMP. Goropa - PT. ASDP Indonesia Ferry
   h. KMP. Dharma Badjra - PT. Dharma LautanUtama
   i. KMP. Pelangi Nusantara - PT. Prima Eksekutif
2. Balikpapan – Mamuju :
   a. KMP. Mandala Nusantara, KMP. Satria Pratama
      - PT. Jembatan Madura
   b. .KMP. Permata Nusantara (kapal cadangan)
      - PT. Jembatan Madura
3. Balikpapan – Taipa :
   a. KMP. Madani - PT. ASDP Indonesia Ferry

Meskipun pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah diresmikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan bagi para pemakai jasa, sehingga transportasi darat pada ketiga lintasan tersebut diatas cukup lancar tanpa adanya hambatan.

a) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

(1) Urusan Umum

Selama Tahun 2011 data surat – menyurat tercatat :

- Surat Masuk sebanyak : 394 kali
- Surat Keluar sebanyak : 292 kali

(2) Urusan rumah tangga Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik termasuk Pengawasan barang –barang Inventaris Kantor yang ditangani oleh Petugas Penanggungjawab Perlengkapan. Namun kami m bahwa dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang dipengaruhi oleh kekurangan pegawai, adakalanya 1 (satu) pegawai merangkap sampai dengan 2 (dua) jabatan belum termasuk tugas – tugas operasional.

(3) Laporan barang-barang inventaris tersebut diatas yang berada dalam lingkungan Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik.

b) Urusan Kepegawaian

Hingga akhir Tahun 2011 jumlah pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil sudah termasuk Pimpinan. Jika melihat tugas – tugas yang mengelola administrasi dan keuangan / jabatan – jabatan fungsional serta tugas-tugas operasional di lapangan, idealnya jumlah pegawai yang tersedia berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang pegawai. Namun demikian tetap diusahakan untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sebaik-baiknya dengan keterbatasan personil yang ada.

Sedangkan untuk pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sebanyak 34 orang dengan perincian : PNS (14) dan tenaga Honorer (7) orang.

Keadaan Pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau akhir Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

-	Pegawai Negeri Sipil :	27	Orang
-	Calon Pegawai Negeri Sipil :	0	Orang
-	Honorer :	7	Orang
	Jumlah :	34	Orang

Tabel V.3 Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau

NO.	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					JML
			SI	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Penata Tk. I	III/d	1	-	-	-	-	1
2.	Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	2	-	-	2
3.	Penata Muda	III/a	3	-	-	-	-	3
4.	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	0
5.	Pengatur	II/c	-	18	-	-	-	18
6.	Pengatur muda Tk. I	II/b	-	-	2	-	-	2
7.	Pengatur Muda	II/a	-	-	1	-	-	1
Jumlah			4	18	5	0	0	27

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, 2010.

c) Urusan Keuangan

(1) Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. 0620/022-03.2.01/XIX/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 17.392.630.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Rp. 15.014.085.000,-
- Belanja Pegawai Rp. 631.314.000,-
- Belanja Barang Rp. 1.747.231.000,-

Jumlah **Rp. 17.392.630.000,-**

(2) Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2011. sebesar Rp. 14.678.131.000**,-**

(3) Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pemeriksaan Kas oleh Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.

(5) Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. Dengan jumlah penerimaan yang telah disetorkan selama Tahun 2011 terlampir.

d) Bidang Operasional

Kegiatan operasional Pelabuhan pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas-tugas yang sasarannya sebagai berikut :

(1) Terciptanya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan Penyeberangan barang dan kendaraan, yang didukung oleh jumlah kapal motor penyeberangan yang memadai.

(2) Pemanfaatan seluruh prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang tersedia guna mendukung kelancaran angkutan antara lain :

- Dermaga
- Jalan dan Lapangan Parkir
- Ruang Tunggu
- Pos – Pos Pengawasan

(3) Pelaksanaan pemungutan penerimaan jasa pelabuhan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan dasar hukum pungutannya Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2009.

- Jasa Sandar
- Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
- Jasa Pemeliharaan dermaga
- Sewa Ruangan
- Sewa Listrik dan Air (Lain-lain)
- Khusus untuk lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Mamuju (Sulawesi Barat), pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tidak dilakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, karena lintasan tersebut melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru dan bukan pada pelabuhan penyeberangan Kariangau.

(4) Penertiban dan pengawasan dalam Wilayah Pelabuhan yang dilaksanakan dengan pihak terkait.

(5) Sehubungan dengan musibah runtuhnya jembatan Mahakam II Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember 2011 mengakibatkan putusnya akses jalan langsung antar Kota Tenggarong dengan Seberang sehingga berdampak pada kelancaran aktifitas masyarakat, maka KMP. Bili diberangkatkan dari Balikpapan menuju tenggarong pada tanggal 28 Nopember 2011 untuk melakukan perbantuan mobilisasi di antara Kota Tenggarong – seberang, selanjutnya untuk mengisi kekosongan lintasan KMP. Bili pada Kariangau – Penajam akan segera dipersiapkan kapal pengganti.

e) Bidang Pengaturan

Secara umum pengaturan berdasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM.60 Tahun 2002, adapun hal-hal lain yang diatur secara khusus antara lain :

(1) Pelaksanaan pemungutan penerimaan jasa Pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009.

(2) Penertiban dan Pengamanan Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/B/256/1969 dan 010/20/MPHB/1969 tanggal 29 Mei 1969.

Pengaturan penumpang, barang dan kendaraan melalui Pelabuhan baik tiba maupun berangkat adalah sebagai berikut :

(1) Berangkat

- Pada umumnya penumpang langsung ke loket penjualan tiket mendapatkan tiket dan langsung menuju kapal melalui Pos Pengawasan guna pemeriksaan ticket.
- Kendaraan
  - Kendaraan muatan barang / Truck diparkir di lapangan parkir yang telah disediakan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, selanjutnya didaftar dan diurutkan naik ke kapal apabila telah membeli ticket dan melunasi kewajiban jasa pelabuhan.
  - Wajib daftar tersebut dan pemenuhan kewajiban jasa pelabuhan diperlakukan pula terhadap kendaraan jenis lainnya (Bus, dan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2)
- Barang

  Barang dimuat ke dalam kapal dengan 2 (dua) cara pemuatan :
  - Muatan barang diatas kendaraan seperti cara pemuatan di Pelabuhan Penyeberangan lainnya yang sudah tidak menerima barang curah.

- Muatan barang curah / diatur langsung diatas deck kapal yang jumlahnya hanya sedikit, sebab hanya mengisi ruang yang kosong, apabila mutan kendaraan diatas kapal tidak penuh. Dengan cara pemuatan ini oleh pedagang masih dianggap lebih menguntungkan dari pada langsung diatas kendaraan, dan cara pemuatan ini masih dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja barang di pelabuhan untuk membiayai hidup keluarganya.

(2) Tiba

- Penumpang

  Penumpang yang menggunakan kendaraan diarahkan keluar melalui pintu gerbang pelabuhan untuk selanjutnya ke tempat tujuan masing-masing sedangkan penumpang non kendaraan diarahkan ke ruang tunggu, selanjutnya memilih kendaraan umum yang telah disediakan di lapangan parkir untuk menuju tempat tujuan akhir masing-masing.

- Kendaraan

  Semua jenis kendaraan sebelum keluar pelabuhan diwajibkan untuk melunasi kewajiban jasa pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, kemudian melanjutkan perjalanan sesuai tujuan.

- Barang
    - Bagi muatan barang diatas kendaraan proses pelaksanaan pelayanannya seperti kendaraan, diarahkan langsung melalui pintu gerbang keluar.
    - Bagi muatan barang curah, dimuat kembali ke kendaraan yang menjemput dengan menggunakan jasa tenaga kerja di pelabuhan dan kendaraan yang memuat barang curah diperbolehkan keluar setelah menyelesaikan kewajibannya dengan pihak pelabuhan.

f) Bidang Pembangunan

Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya baik yang bersifat proyek maupun pemeliharaan rutin yang anggarannya tertuang dalam DIPA Pelabuhan Penyeberangan Kariangau T.A. 2011.

Untuk posisi pelaksanaan belanja modal sementara dalam pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan.

2) Permasalahan yang dihadapi dan Upaya Pemecahan

Permasalahan yang dihadapi

a) Masih adanya pendangkalan pada alur muara sungai Wain Kariangau, sehingga tidak dapat di gunakan secara maksimal oleh kegiatan operasi penyeberangan lintasan Balikpapan – Mamuju

yang selama ini melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru.

b) Dan juga masih adanya kapal penyeberangan untuk lintasan Kariangau – Penajam yang sering kandas pada alur muara sungai Wain Kariangau karena pendangkalan alur muara sungai wain Kariangau tersebut.

c) Kami sampaikan pula bahwa sampai pada saat ini untuk antrian kendaraan pada lintasan Kariangau – Penajam masih sering terjadi.

d) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk dapat memperlancar kegiatan operasional dan administrasi.

Upaya yang dilakukan

a) Guna lebih meningkatkan pelayanan dan pengaturan di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau perlu adanya penambahan pegawai menjadi 30 (tiga puluh) orang pegawai negeri sipil, sangat diharapkan agar dapat teralisasi sebelum penghapusan sistem Kerja sama Operasional (KSO) yang ada pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, mengingat jumlah pegawai yang ada saat ini hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai negeri sipil, dan 7 (tujuh) orang pegawai kontrak. Yang mana jumlah tersebut belum optimal untuk mengelola kegiatan yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, mengingat pelabuhan ini melayani 3 (tiga) lintasan penyeberangan dan beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari

seminggu, dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 penjualan tiket pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan untuk lintasan Kariangau -penajam sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan yang membutuhkan 3 (tiga) orang pegawai, dan pada pelabuhan penyeberangan Kariangau khusus lintasan Kariangau Penajam akan bertambah 1 (satu) dermaga lagi yang pastinya akan membutuhkan tenaga petugas operasional lagi.

b) Melakukan pelaksanaan kegiatan pengerukan pada alur muara sungai Wain Kariangau agar secepatnya dapat di laksanakan dalam kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.

c) Agar dapat digunakan dengan maksimal oleh kegiatan operasi penyeberangan lintasan Balikpapan – Mamuju yang selama ini melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru, dan agar dengan adanya pengerukan tersebut kapal – kapal untuk lintasan kariangau penajam tidak mengalami kandas pada saat beroperasi.

d) Penyelesaian pembangunan dermaga II (dua), agar segera dapat diselesaikan secara maksimal, untuk penunjang peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa dan sudah dapat digunakan pada tahun anggaran 2012, sehingga dapat mengurangi terjadinya antrian untuk lintasan Kariangau - Penajam.

c. UPT. Penyeberangan Gorontalo

1) Lintasan penyeberangan

Secara umum penyeberangan Gorontalo melayani 3 (tiga) lintasan yaitu :

a) Gorontalo – Pagimana (Sulteng 2 hari sekali).

Dilayani oleh KMP. Baronang 526 GT dengan kapasitas muat 400 orang penumpang dan 21 unit kendaraan campuran

b) Gorontalo – Wakai – Ampana (2 x seminggu).

Dilayani oleh KMP. Tuna Tomini 546 GT dengan kapasitas muat 240 orang penumpang dan 14 unit kendaraan campuran.

c) Marisa – Dolong – Ampana (2 x seminggu).

Dilayani oleh KMP. Tanjung Api 617 GT dengan kapasitas muat 200 orang penumpang dan 19 unit kendaraan campuran.

2) Jadwal kapal penyeberangan

a) KMP. Baronang (Komersil) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Pagimana (2 hari sekali).

b) KMP. Tuna Tomini (Perintis) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Wakai – Ampana (2 x seminggu).

c) KMP. Tanjung Api 617 GT, Lintas Marisa – Dolong – Ampana (2 x seminggu).

3) Produksi Angkutan 2011

a) Lintas Gorontalo – Pagimana (KMP. Baronang)

(1) Penumpang : 65.582 Penumpang

(2) Kendaraan (R4 dan R2) : 6.947 Unit

(3) Barang : 14.704 Ton

b) Gorontalo – Wakai – Ampana (KMP. Tuna Tomini)

(1) Penumpang : 25.209 Penumpang

(2) Kendaraan (R4 dan R2) : 912 Unit

(3) Barang : 4.452 Ton

4) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Jumlah Karyawan dengan Jabatan Struktur

(1) Kepala Kantor / UPT : 1 orang (Eselon V)

(2) Petugas TU dan Kepegawaian : 1 orang (Non Eselon)

(3) Fungsional Lalu Lintas Angkutan : 1 orang (Non Eselon)

(4) Fungsional Jasa-jasa Pelabuhan : 1 orang (Non Eselon)

(5) Fungsional Sarana dan Prasarana : 1 orang (Non Eselon)

(6) Fungsional Keamanan dan Ketertiban : 1 orang (Non Eselon)

(7) Staff : 17 orang

5) Sarana dan Prasarana

a) Luas Tanah Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo : 42.486 m^2

b) Luas Dermaga Plengsengan : 96 m^2

c) Luas Gedung Kantor : 198 m^2

d) Luas Crag Terminal Penumpang : 360 m^2

e) Luas Rumah Operasional dan Rumah Dinas : 135 m^2 (3 unit)

f) Luas Lapangan Parkit dan Jalan : 6.474 m^2

g) Luas Gang Way : 385 m^2

h) Kapasitas Bak penampung air tawar : 20 m^2

i) Cat Walk : 69 m^2

j) Breasting Dolpin dan Fender : 3 buah

k) Morning Dolpin : 4 buah

l) Jembatan Timbang Crag : 1 set

m) Daya Listrik PLN : 13.200 watt

n) Genset 15 KVA : 12.200 watt

o) Luas Kolom Pelabuhan : 27.375 m^2

p) Kedalaman Kolam Pelabuhan : 4,5 m^2

q) Break Water : 2.700 m^2

r) Rambu Suar (Beacon tetap) : 5 unit

s) Speed Boat (rusak) : 1 unit

t) Pagar Tembok Pelabuhan : 1.200 m^2

u) Pagar BRC : 600 m^2

v) Mushola : 36 m^2

6) Data Sarana Kapal Penyeberangan

a) KMP. Baronang (Komersil)

(1) Lintas Penyeberangan : Gorontalo – Pagimana

(2) Waktu Tempuh Pelayanan : 10 s/d 12 jam

(3) Jadwal Trip : 2 hari sekali

(4) Kapasitas Angkut Penumpang : 320 s/d 400 orang

(5) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 : 21 unit

(6) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 : 20 s/d 30 unit

(7) Kapasitas Angkut Barang : 50 ton

(8) Spesifikasi Teknis KMP. Baronang

- Kapasitas Muat : 526 GT (tahun 1993)
- Panjang : 45,30 m
- Lebar : 12 m
- Draft air : 2 m

- Main Engine : Nigata 2 x 650 HP
- Mesin Pembantu : 2 x 115 HP (Generator)

b) KMP. Tuna Tomini (Perintis)

(1) Lintas Penyeberangan : Gorontalo–Wakai-Ampana

(2) Waktu Tempuh Pelayanan : 17 s/d 18 jam

(3) Jadwal Trip : seminggu dua kali

(4) Kapasitas Angkut Penumpang : 250 s/d 300 orang

(5) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 : 16 unit

(6) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 : 20 s/d 30 unit

(7) Kapasitas Angkut Barang : 50 ton

(8) Spesifikasi Teknis KMP. Tuna Tomini

- Kapasitas Muat : 546 GT (tahun 2006)
- Panjang : 40,3 m
- Lebar : 10,5 m
- Draft air : 2 m
- Main Engine : Yanmar 2 x 620 HP
- Mesin Pembantu : 2 x 115 HP (Generator Listrik)

7) Kendala dan Solusi Permasalahan

a. Kendala

1) Sering terjadi komplain dari pihak pengguna jasa ketika salah satu kapal yang melayani lintasan tersebut melakukan docking tahunan dan tidak adanya kapal pengganti. Hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak operator tetapi hingga saat ini belum ada realisasi dari pihak operator terkait;

2) Terdapat sekitar 40% status pegawai adalah tenaga kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja kepegawaian di lingkungan kerja;
3) Telah dilaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap para pengguna jasa serta untuk memperlancar kegiatan administrasi perkantoran;

b. Solusi

1) Kami telah meminta klarifikasi dan berdiskusi dengan pihak operator ketika terjadi docking tahunan agar pelayanan jasa angkutan dapat diberikan secara maksimal serta memuaskan para pengguna jasa.
2) Kami akan mengusulkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi untuk dapat diangkat sebagai CPNS sesuai ketentuan;
3) Memberdayakan personil di lapangan untuk menjaga dan ikut memelihara asset serta selalu melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala dalam hal Prasarana dan Sarana terhadap Petugas Fungsional Prasarana Dan Sarana untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan

B. KINERJA BUMN

1. PERUM DAMRI

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Sumber Daya Manusia	6,185	5,910	5,614	5,583	5,597	5,591
2	Alat Produksi						
	a. Armada	1,926	1,674	1,691	1,896	1,965	2,076
	b. Siap Guna	1,775	1,635	1,593	1,838	1,715	1,829
	c. Siap Guna Operasi	1,285	1,229	1,309	1,424	1,400	1,488
	d. Siap Operasi	1,075	1,016	1,108	1,190	1,259	1,336
3	Produksi (dlm. Ribuan)						
	a. Panjang Perjalanan	94,227	96,436	98,086	107,006	113,456	118,940
	b. Jasa Angkutan						
	- Penumpang	49,989	47,460	45,407	43,804	42,512	43,785
	- Penumpang - KM	899,027	847,415	1,007,875	981,096	1,088,844	1,035,376
	- Ton - KM	12,398	14,002	13,362	20,574	26,436	39,341
4	Laba Rugi (dlm. Ribuan Rupiah)						
	a. Pendapatan						
	- Operasional	354,775,756	364,895,852	440,968,191	492,872,902	505,663,748	-
	- Subsidi	25,507,488	29,597,427	37,105,926	46,739,673	31,756,421	-
	- Lain-lain	8,194,322	18,467,904	22,121,549	8,219,157	9,899,792	-
	Jumlah Pendapatan	**388,477,566**	**412,961,183**	**500,195,666**	**547,831,732**	**547,319,961**	**-**
	b. Biaya						
	- Komisi Penjualan	7,017,780	7,871,105	9,696,518	9,960,447	11,365,347	-
	- Biaya Langsung	307,499,297	312,693,935	351,042,760	367,338,518	352,350,218	-
	- Biaya Tidak Langsung	18,743,813	17,297,537	17,982,012	19,885,334	23,637,761	-

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	- Biaya Usaha & Adm. Umum	88,491,634	76,508,953	94,203,583	110,107,739	125,160,804	-
	- Biaya Lain-lain	2,964,581	1,760,149	2,058,327	1,072,399	476,991	-
	Jumlah Biaya	**424,717,105**	**416,131,679**	**474,983,200**	**508,364,437**	**512,991,151**	**-**
	c. Laba - Rugi (sebelum pajak)	36,239,539	3,170,496	25,212,466	17,407,670	17,407,670	46,774,186
	d. Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	7,352,666	10,742,161	9,833,950	(8,140,954)	(15,596,125)	-
	e. Laba - Rugi (Bersih)	28,886,873	7,571,665	15,378,516	18,992,653	1,811,545	46,774,186

Sumber : Perum DAMRI, 2011.

Permasalahan-permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perum DAMRI Selama Tahun 2011

1. Tarif kelas ekonomi Angkutan Kota ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda);
2. Pembatasan usia kendaraan maksimum 10 tahun oleh Pemerintah Daerah (Pemda);
3. Persaingan tarif dengan angkutan sejenis maupun moda angkutan lainnya;
4. Penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah;
5. Berkembangnya industri otomotif dan kemudahan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan angkutan perkotaan/niaga lainnya termasuk perolehan izin trayek dan pesatnya pertumbuhan sepeda motor dan mobil;
6. Jenis dan harga kendaraan cenderung naik dan harga suku cadang kendaraan cukup bervariatif;
7. Perolehan trayek baru dengan sistim tender;
8. Pengopearsian Bus Rapid Transit (BRT) diserahkan dan dikelola Pemda pada beberapa kota.

Kebijakan dan Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Perum DAMRI dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Selama Tahun 2011.

1. Kebijakan Manajemen

a. Realokasi alat produksi dan penataan trayek

b. Pengembangan pasar dan menjalin kemitraan dengan instansi Pemerintah / BUMN dan Swasta;

c. Pengembangan angkutan barang menunjang program logistik nasional;

d. Standarisasi mutu pelayanan;

e. Pengadaan investasi dengan skala prioritas;

f. Melaksanakan standarisasi perawatan dan perbaikan kendaraan;

g. Pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan;

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat prduksi;

i. Penerapan financial management dan budget oriented;

j. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2011

k. Meningkatkan kualitas/profesioanlisme SDM melalui Diklat;

l. Peningkatan kesejahteraan karyawan.

2. Upaya Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja

a. Pengendalian/pengawasan operasional;

b. Penataan trayek yang kurang potensial pada segmen Angkutan Antar Kota;

c. Peningkatan jenis pelayanan dari kelas ekonomi menjadi non ekonomi;

d. Menata ulang dan mengembangkan jaringan pemasaran;

e. Peningkatan sinergi usaha BUMN atau swasta;

f. Pengembangan Angkutan Barang dan Angkutan Pemadu Moda;

g. Peremajaan armada melalui pengadaan alat produksi dan perbaikan bus/mobil barang secara betahap;

h. Investasi pelengkap dan penunjang dengan skala prioritas;

i. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat produksi secara berjadwal;

j. Pengendalian biaya kendaraan dan biaya perawatan kendaraan;

k. Menjalin kerjasama dengan pihak ATPM untuk memperoleh peralatan bengkel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan berteknologi otomotif;

l. Meningkatkan likuiditas perusahaan;

m. Pemantapan mekanisme pengelolaan anggaran secara terkendali;

n. Penarikan pinjaman kredit dari perbankan/lembaga keuangan (leasing) untuk mendanai investasi;

o. Menerapkan cash mangement bekerjasama dengan perbankan untuk memonitoring saldo bank seluruh UPT;

p. Penetapan status BPYBDS tahun 2004 s/d 2009 dan review atas penerimaan bus bantuan pemerintah tahun 2010;

q. Penyelesaian PSL atas premi regular pada PT. Taspen dan PT. Jamsostek;

r. Penyelesaian kewajiban pajak tahun 2008, 2009 dan 2010;

s. Penyesuaian rasio pegawai;

t. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan pihak lainnya;

u. Pembayaran ibalan kerja karyawan secara bertahap dan pengelolaan pensiun (Pension fund) dengan PT. BNI Life Insurance untuk pensiun jatuh tempo tahun 2012 dan 2013;

v. Pengadaan prasarana dan fasilitas kantor secara selektif;

w. Pelaksanaan struktur organisasi baru.

2. KINERJA PERUM PPD

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
		Audit	Audit	Audit	Audit	Audit
1	Sumber Daya Manusia					
	a. Pengemudi	747	637	-	-	-
	b. Kondektur	405	359	-	-	-
	c. Teknisi	743	692	163	153	147
	JUMLAH	1895	1688	163	153	147
2	Alat Produksi					
	a. Siap Guna	567	570	500	395	395
	b. Siap Guna Operasi	303	296	270	240	209
	c. Siap Operasi	224	231	219	203	173
3	Produksi (000)					
	a. Kilometer	21,258	21,470	17,063	15,655	13,043
	b. Penumpang	36,944	36,399	32,964	30,708	23,835
4	Laba (Rugi) (000)					
	a. Pendapatan	124,832,773	128,866,179	101,602,307	105,198,658	87,535,488
	b. Biaya	152,861,821	157,232,238	141,942,950	103,484,190	80,012,800
	c. Laba (Rugi) Usaha	(28,029,048)	(28,366,059)	(40,340,643)	1,714,468	7,522,688
5	Subsidi	-	-	-	-	-
	Penanaman Modal Pemerintah (PMP)	-	-	-	-	-

Sumber : Perum PPD, 2011

Permasalahan Yang Dihadapi oleh Perum PPD :

1. Usia alat Produksi rata-rata diatas umur ekonomis yaitu diatas 15 tahun
2. Membutuhkan peremajaan alat produksi
3. Membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi

Kebijakan dan Upaya yang Telah Dilakukan Dalam Meningkatkan Kinerja Selama Tahun 2011

1. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam pemeliharaan alat produksi dan melakukan rekondisi atas bus-bus rusak sedang
2. Mengelola bus sekolan milik Pemprov DKI Jakarta.

3. PT. ASDP INDONESIA FERRY

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Sumber Daya Manusia					
	a) Kantor Pusat	200	204	270	249	225
	b) Pelayaran					
	- Darat	768	760	704	749	770
	- Laut	1,405	1,476	1,516	1,703	2,015
	Pelabuhan	858	836	832	705	666
2	Alat Produksi					
	a. Armada	80	87	91	97	112
	b. Pelabuhan	34	34	34	34	2,015
	c. Lintas					
	- Komersial	32	35	35	40	43
	- Perintis	104	86	82	97	111
3	Segmen Penyeberangan Komersial					
	a. Trip	93,979	97,464	97,551	121,454	128,350
	b. Penumpang (orang)	4,352,391	5,047,858	5,074,062	5,147,072	6,005,351
	c. R-2 (unit)	1,679,293	1,826,384	2,044,866	2,266,288	2,619,756
	d. R-4 (unit)	1,127,897	1,268,856	1,188,714	1,301,830	1,498,772
	e. Barang (ton)	411,761	470,028	368,234	409,924	511,084
4	Segmen Penyeberangan Perintis					
	a. Trip	27,932	27,033	37,041	25,079	26,363
	b. Penumpang (orang)	667,087	575,297	633,095	571,447	679,041
	c. R-2 (unit)	132,401	135,264	230,930	163,661	204,889

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
	d. R-4 (unit)	55,288	53,910	108,654	61,843	82,283
	e. Barang (ton)	83,928	130,640	140,313	58,611	83,674
6	Segmen Pelabuhan Penyeberangan (x1000)					
	a. Sandar (GRT x Call)	430,183,158	544,876,974	519,105,228	511,160,674	557,696,157
	b. Pas Masuk Pelabuhan					
	- Penumpang	16,265,278	17,858,900	14,269,306	10,565,455	10,900,761
	- R-2	5,409,884	6,265,423	5,854,808	4,843,040	5,428,609
	- R-4	6,089,812	6,726,417	6,065,025	5,923,801	6,711,476
	c. Jasa Dermaga					
	- R-2	5,389,532	6,242,301	5,826,059	4,815,001	5,399,809
	- R-4	4,314,371	4,712,478	4,135,796	3,977,869	4,517,435
	- R-4 Besar	1,775,441	2,013,939	1,929,229	1,945,932	2,194,041
	d Barang Umum	2,151,325	2,161,799	1,092,702	142,992	211,805
7	a Pendapatan Bersih	642,712,165,241	796,024,279,358	884,172,416,004	921,542,505,402	1,162,470,927,872
	b Biaya Usaha	545,767,448,039	658,639,368,584	794,384,812,325	821,608,909,398	1,006,608,466,410
	c Laba (Rugi) Kotor	96,944,717,148	137,384,910,774	89,787,603,679	99,933,596,004	155,862,461,462
	d Biaya Administrasi	36,152,400,963	43,745,491,061	71,035,109,470	50,640,047,710	70,803,406,649
	e Laba (Rugi) Usaha	60,792,316,186	93,639,419,714	18,752,494,209	49,293,548,294	85,059,054,813
	f Pendapatan (Biaya) Lain-lain	599,371,530	18,186,143,891	40,031,389,109	28,767,413,219	37,416,870,642
	g Laba (Rugi) Sebelum Pajak	61,391,687,716	111,826,143,891	58,783,883,318	78,060,961,513	122,475,925,455
	h Taksiran Pajak Badan	6,576,409,266	9,050,466,763	3,163,071,763	5,934,311,015	8,247,751,282
	i Laba (Rugi) Setelah Pajak	54,815,278,450	102,775,677,128	55,620,811,555	72,126,650,498	114,228,174,173

Sumber : PT. ASDP Indonesia Ferry, 2011

B A B VI
P E N U T U P

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011 merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini tercermin pelaksanaan kegiatan dibidang transportasi darat yaitu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa angkutan darat khususnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan-kegiatan transportasi darat yang meliputi bidang angkutan jalan, bidang angkutan penyeberangan dan bidang angkutan perkotaan serta keselamatan transportasi darat yang membutuhkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, operasional dan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sistem kerjasama dan koordinasi yang baik, serta didukung dengan peralatan kerja yang cukup.

Sedangkan UPT dan BUMN dibawah pembinaan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu peningkatan tuntutan pelayanan jasa angkutan, terus mempertahankan dan mengembangkan pelayanan jasa angkutan dengan terus melakukan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan yaitu dengan peningkatan kinerja SDM yang ada.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN SEMENTARA ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2011 (1432 H) PADA H-7 S.D H+6

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110
Tel : +6221-3506121, 3506122, 3506124
Fax : +6221-3506122, 3506124, 3506127, 3506129

LAPORAN SEMENTARA ANALISA DAN EVALUASI
REALISASI DATA PENUMPANG ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2011 (1432 H)
PERIODE ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK (H-7 S.D H+6)

I. UMUM

Realisasi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi (darat, kereta api, laut dan udara) berdasarkan pemantauan pada Periode H-7 hingga H+6 Angkutan Lebaran 2011 sejumlah **13.652.835** pemudik yang menggunakan sarana angkutan umum, yaitu mengalami **peningkatan 2,58%** dibanding tahun 2010 pada periode yang sama.

Tabel 1a : Realisasi Penumpang Umum Pada Angkutan Lebaran Tahun 2010 & 2011 (Periode H-7 s.d H+6)

NO	MODA	JUMLAH PEMUDIK		%
		2010	2011	
A. Angkutan Umum				
1	Moda Darat			
	a. Angkutan Jalan	5,164,862	5,246,400	1.58
	b. Angkutan Penyeberangan	2,941,779	3,038,309	3.28
2	Moda Kereta Api	2,253,123	1,746,488	-22.49
3	Moda Laut	560,531	849,901	51.62
4	Moda Udara	2,389,659	2,771,737	15.99
Total H-7 s.d H+6		**13,309,954**	**13,652,835**	**2.58**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

Adapun realiasi jumlah pemudik yang menggunakan sarana angkutan pribadi berupa Sepeda Motor dan Mobil Pribadi berdasarkan pantauan di 6 (enam) titik yaitu di Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cianjur dan Tanjung Pura pada periode H-7 s.d H+6 tanggal 23 Agustus 2011 hingga 6 September 2011, adalah sebagai berikut :

- Pengguna Sepeda Motor mengalami ***kenaikan*** sebesar **5,03%** yaitu dari **2.157.517** kendaraan pada tahun 2010 menjadi **2.266.125** pada tahun 2011;
- Pengguna Mobil Pribadi mengalami ***kenaikan*** sebesar **1,83%** dari **1.414.516** kendaraan pada tahun 2010 menjadi **1.440.387** kendaraan pada tahun 2011.

Untuk lebih detail mengenai realisasi angkutan pribadi pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2011 (1432 H) periode H-7 s.d H+6 adalah sebagaimana Tabel 1b dibawah ini :

Tabel 1b : Realisasi Angkutan Pribadi pada Angkutan Lebaran Tahun 2010 & 2011
(Periode H-7 s.d. H+6)

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	SEPEDA MOTOR		%	MOBIL PRIBADI		%
		2010	2011		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	58,437	61,617	5.44	36,702	40,567	10.53
	H-6	92,777	79,701	-14.09	58,853	51,550	-12.41
	H-5	136,456	120,296	-11.84	82,240	74,269	-9.69
	H-4	121,464	179,473	47.76	73,103	108,376	48.25
	H-3	184,167	**228,667**	24.16	106,343	**111,028**	4.41
	H-2	268,925	220,765	-17.91	106,343	103,028	-3.12
	H-1	152,071	120,615	-20.69	98,922	70,797	-28.43
TOTAL ARUS MUDIK		**1,014,297**	**1,011,134**	**-0.31**	**562,506**	**559,615**	**-0.51**
ARUS LEBARAN	H1	116,370	71,342	-38.69	89,439	59,536	-33.43
	H2	126,155	112,496	-10.83	100,100	81,993	-18.09
TOTAL ARUS LEBARAN		**242,525**	**183,838**	**-24.20**	**189,539**	**141,529**	**-25.33**
ARUS BALIK	H+1	153,790	162,186	5.46	101,535	131,092	29.11
	H+2	155,200	157,126	1.24	138,999	115,376	-17.00
	H+3	172,689	166,592	-3.53	108,224	123,361	13.99
	H+4	143,697	**288,166**	100.54	97,861	**152,066**	55.39
	H+5	149,213	173,886	16.54	114,090	114,830	0.65
	H+6	126,106	123,197	-2.31	101,762	102,518	0.74
TOTAL ARUS BALIK		**900,695**	**1,071,153**	**18.93**	**662,471**	**739,243**	**11.59**
TOTAL H-7 s.d H+6		**2,157,517**	**2,266,125**	**5.03**	**1,414,516**	**1,440,387**	**1.83**

Sumber : Posko Angkutan Lebarn 2011

A. Penumpang Moda Angkutan Jalan

Penumpang moda angkutan jalan pada Angkutan Lebaran Tahun 2011 (1432 H) pada pantauan H-7 hingga H+6, mengalami **peningkatan** sebesar **1,58%** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 yaitu dari **5.164.862** penumpang menjadi **5.246.400** penumpang (Tabel 2).

Tabel 2
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan
Di 12 Provinsi pada 43 Terminal Utama/Bantuan

MASA LEBARAN	PERIODE HARI	JUMLAH BUS		%	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	14,275	14,696	2.95	217,399	214,904	-1.15
	H-6	15,217	15,899	4.48	268,022	252,288	-5.87
	H-5	17,827	16,962	-4.85	315,536	307,233	-2.63
	H-4	17,949	18,465	2.87	316,437	371,839	17.51
	H-3	18,974	19,241	1.41	408,483	464,718	13.77
	H-2	19,075	**20,285**	6.34	454,473	**478,678**	5.33
	H-1	16,977	16,493	-2.85	342,456	306,250	-10.57
TOTAL MUDIK		**120,294**	**122,041**	**1.45**	**2,322,806**	**2,395,910**	**3.15**
LEBARAN	H1	13,467	12,319	-8.52	279,305	208,973	-25.18
	H2	15,698	14,020	-10.69	395,088	302,244	-23.50
TOTAL LEBARAN		**29,165**	**26,339**	**-9.69**	**674,393**	**511,217**	**-24.20**

MASA LEBARAN	PERIODE HARI	JUMLAH BUS		%	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011		2010	2011	
ARUS BALIK	H+1	16,630	15,866	-4.59	353,987	389,336	9.99
	H+2	18,276	17,533	-4.07	384,651	416,791	8.36
	H+3	17,083	**17,865**	4.58	404,234	429,392	6.22
	H+4	18,345	17,856	-2.67	372,136	**437,125**	17.46
	H+5	16,760	17,323	3.36	349,580	369,151	5.60
	H+6	14,666	16,339	11.41	303,075	297,478	-1.85
TOTAL ARUS BALIK		**101,760**	**102,782**	**1.00**	**2,167,663**	**2,339,273**	**7.92**
TOTAL H-7 s.d H+6		**251,219**	**251,162**	**-0.02**	**5,164,862**	**5,246,400**	**1.58**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

B. Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan

Penumpang moda angkutan penyeberangan berdasarkan data dari H-7 s.d. H+6 pada 7 Lintas Penyeberangan, diketahui bahwa Jumlah penumpang mengalami **peningkatan** sebesar **3,28%** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pada Tahun 2010 yaitu dari **2.941.779** penumpang menjadi **3.038309** penumpang pada Tahun 2011.

Tabel 3
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan di 7 Lintas Penyeberangan

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	125,329	130,512	4.14
	H-6	174,983	161,504	-7.70
	H-5	210,880	217,717	3.24
	H-4	186,176	268,169	44.04
	H-3	230,851	**291,703**	26.36
	H-2	305,677	252,368	-17.44
	H-1	227,667	128,985	-43.34
TOTAL MUDIK		**1,461,563**	**1,450,958**	**-0.73**
LEBARAN	H1	126,259	95,372	-24.46
	H2	138,527	144,195	4.09
TOTAL LEBARAN		**264,786**	**239,567**	**-9.52**
ARUS BALIK	H+1	173,912	175,689	1.02
	H+2	213,433	224,331	5.11
	H+3	215,559	264,713	22.80
	H+4	222,421	**271,085**	21.88
	H+5	194,052	221,952	14.38
	H+6	196,053	190,014	-3.08
TOTAL ARUS BALIK		**1,215,430**	**1,347,784**	**10.89**
TOTAL H-7 s.d H+6		**2,941,779**	**3,038,309**	**3.28**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

Selain realisasi keberangkatan Jumlah penumpang, juga dilakukan pemantauan terhadap realisasi jumlah Kendaraan Roda Dua (R2) dan Kendaraan Roda Empat (R4) pada moda angkutan penyeberangan selama periode Angkutan Lebaran Tahun 2011 (1432 H), yaitu dari periode H-7 hingga H+6 yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Berdasarkan data hasil pemantauan, diketahui bahwa jumlah Kendaraan Roda 2 moda angkutan penyeberangan mengalami **peningkatan** sebesar **9,06%**u ntuk Kendaraan Roda Dua (R2) yaitu dari **347.308** kendaraan menjadi **378.775** kendaraan.
Sedangkan untuk Kendaraan Roda 4/Lebih juga mengalami **peningkatan** sebesar **8.05%** jika dibandingkan periode yang sama Tahun 2010 yaitu **297.208** menjadi **321.133** pada tahun 2011.

Tabel 4
Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH R-2		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	11,617	13,360	15.00
	H-6	17,992	19,350	7.55
	H-5	23,032	25,709	11.62
	H-4	21,706	**37,699**	73.68
	H-3	27,045	41,318	52.78
	H-2	41,755	33,805	-19.04
	H-1	25,380	16,393	-35.41
TOTAL MUDIK		**168,527**	**187,634**	**11.34**
LEBARAN	H1	16,222	12,305	-24.15
	H2	18,916	20,127	6.40
TOTAL LEBARAN		**35,138**	**32,432**	**-7.70**
ARUS BALIK	H+1	22,048	21,755	-1.33
	H+2	28,939	23,010	-20.49
	H+3	25,406	31,774	25.06
	H+4	24,908	**37,481**	50.48
	H+5	21,235	25,313	19.20
	H+6	21,107	19,376	-8.20
TOTAL ARUS BALIK		**143,643**	**158,709**	**10.49**
TOTAL H-7 s.d H+6		**347,308**	**378,775**	**9.06**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

Tabel 5
Realisasi Kendaraan Roda 4 / Lebih Moda Angkutan Penyeberangan

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH R-4 / LEBIH		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	17,003	19,279	13.39
	H-6	20,089	21,029	4.68
	H-5	21,169	24,515	15.81
	H-4	19,008	26,782	40.90
	H-3	22,731	**27,401**	20.54
	H-2	24,998	24,865	-0.53
	H-1	18,504	12,874	-30.43
TOTAL MUDIK		**143,502**	**156,745**	**9.23**
LEBARAN	H1	13,728	11,402	-16.94
	H2	13,339	15,151	13.58
TOTAL LEBARAN		**27,067**	**26,553**	**-1.90**
ARUS BALIK	H+1	16,594	17,084	2.95
	H+2	20,829	21,962	5.44
	H+3	21,857	**27,202**	24.45
	H+4	22,755	24,977	9.76
	H+5	21,848	23,557	7.82
	H+6	22,756	23,053	1.31
TOTAL ARUS BALIK		**126,639**	**137,835**	**8.84**
TOTAL H-7 s.d H+6		**297,208**	**321,133**	**8.05**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

C. Penumpang Moda Angkutan Kereta Api

Penumpang moda angkutan kereta api yang dihimpun pada 9 Daop di Pulau Jawa dan 2 Divre (Sumatera Utara dan Sumatera Selatan) pada periode H-7 s.d H+6 terdata dengan jumlah total **1.746.488** penumpang atau mengalami **penurunan** sebesar **22,49%** jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya pada tahun 2010 yaitu **2.253.123** penumpang.

Tabel 6
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Kereta Api di 9 Daop (Pulau Jawa) dan 2 Divre

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	99,481	73,404	-26.21
	H-6	113,733	94,178	-17.19
	H-5	110,582	106,283	-3.89
	H-4	126,273	108,196	-14.32
	H-3	134,016	112,729	-15.88
	H-2	153,000	**114,882**	-24.91
	H-1	119,447	99,509	-16.69
TOTAL MUDIK		**856,532**	**709,181**	**-17.20**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011	
LEBARAN	H1	127,779	89,203	-30.19
	H2	175,927	112,689	-35.95
TOTAL LEBARAN		**303,706**	**201,892**	**-33.52**
ARUS BALIK	H+1	190,648	143,756	-24.60
	H+2	203,441	**146,363**	-28.06
	H+3	188,719	144,544	-23.41
	H+4	181,622	141,709	-21.98
	H+5	161,115	133,813	-16.95
	H+6	167,340	125,230	-25.16
TOTAL LEBARAN		**1,092,885**	**835,415**	**-23.56**
Total H-7 s.d H+6		**2,253,123**	**1,746,488**	**-22.49**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

D. Penumpang Moda Angkutan Laut

Penumpang moda angkutan laut pada periode H-7 s.d H+6 terdata dengan jumlah total **849.901** penumpang atau mengalami **peningkatan** sebesar **51,62%** dari total penumpang pada tahun 2010 yang mencapai **560.531** yang terpantau pada 52 pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 7
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut di 52 Pelabuhan

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	38,573	54,471	41.22
	H-6	43,353	67,656	56.06
	H-5	46,913	51,911	10.65
	H-4	47,826	73,459	53.60
	H-3	40,383	61,726	52.85
	H-2	47,801	**83,370**	74.41
	H-1	35,435	49,815	40.58
TOTAL ARUS MUDIK		**300,284**	**442,408**	**47.33**
ARUS LEBARAN	H1	13,520	23,840	76.33
	H2	27,800	36,980	33.02
TOTAL ARUS LEBARAN		**41,320**	**60,820**	**47.19**
ARUS BALIK	H+1	19,091	68,382	258.19
	H+2	40,326	71,654	77.69
	H+3	39,421	**72,799**	84.67
	H+4	41,982	57,418	36.77
	H+5	40,323	46,938	16.41
	H+6	37,784	29,482	-21.97
TOTAL ARUS BALIK		**218,927**	**346,673**	**58.35**
TOTAL H-7 s.d H+6		**560,531**	**849,901**	**51.62**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011
***Catatan** : Untuk data H+6 Tahun 2011 merupakan data sementara.*

E. Penumpang Moda Angkutan Udara

Total Penumpang moda angkutan udara selama periode H-7 s/d H+6 mengalami **peningkatan** sebesar **15,99 %** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pada tahun 2010 dari **2.389.659** penumpang menjadi **2.771.737** penumpang pada tahun 2011.

Tabel 8
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 24 Bandara penerbangan Domestik
4 Bandara Penerbangan Internasional

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	136,211	173,075	27.06
	H-6	142,609	182,349	27.87
	H-5	153,900	191,239	24.26
	H-4	139,371	195,394	40.20
	H-3	165,327	**209,330**	26.62
	H-2	185,056	203,832	10.15
	H-1	168,748	174,227	3.25
TOTAL ARUS MUDIK		**1,091,222**	**1,329,446**	**21.83**
ARUS LEBARAN	H1	148,681	155,178	4.37
	H2	142,262	161,181	13.30
TOTAL ARUS LEBARAN		**290,943**	**316,359**	**8.74**
ARUS BALIK	H+1	150,206	166,435	10.80
	H+2	167,333	175,052	4.61
	H+3	167,439	194,676	16.27
	H+4	170,719	**207,465**	21.52
	H+5	177,779	196,298	10.42
	H+6	174,018	186,006	6.89
TOTAL ARUS BALIK		**1,007,494**	**1,125,932**	**11.76**
TOTAL H-7 s.d H+6		**2,389,659**	**2,771,737**	**15.99**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2011

F. Data Volume Arus Lalu Lintas

Berdasarkan data yang diperoleh dari 6 titik lokasi pemantauan, diketahui bahwa volume lalu lintas untuk **sepeda motor** mengalami **peningkatan** sebesar **5,03%** (dari **2.157.517** kendaraan menjadi **2.266.125** kendaraan) dan mobil pribadi **naik 1,83%** dari **1.414.516** kendaraan menjadi **1.440.387** kendaraan) selama pemantauan Angkutan Lebaran 2011 dari H-7 s.d. H+6.

Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana Grafik dan Tabel dibawah ini.

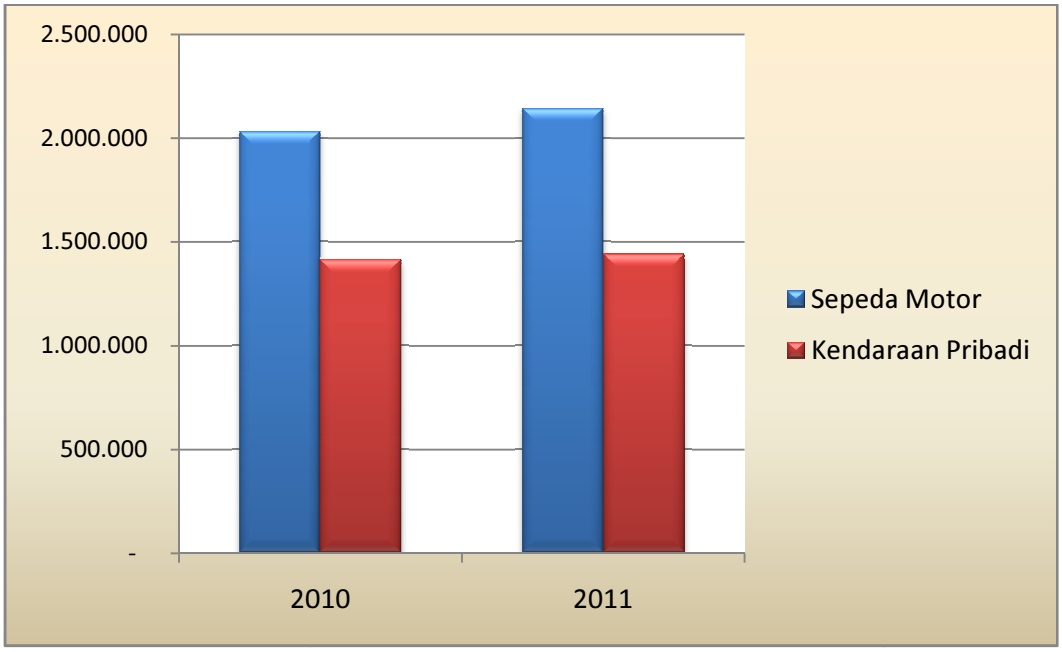

Gambar 1
Perbandingan Volume Lalu Lintas Roda-2 dan Kendaraan Pribadi pada H-7 s.d. H+6
Angkutan Lebaran 2011/1432 H

Tabel 9
Total Sepeda Motor dan Mobil Pribadi di 6 Titik Pemantauan Dari H-7 S.D H+6
Periode Angkutan Lebaran 2011/1432 H

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	SEPEDA MOTOR		%	MOBIL PRIBADI		%
		2010	2011		2010	2011	
ARUS MUDIK	H-7	58,437	61,617	5.44	36,702	40,567	10.53
	H-6	92,777	79,701	-14.09	58,853	51,550	-12.41
	H-5	136,456	120,296	-11.84	82,240	74,269	-9.69
	H-4	121,464	179,473	47.76	73,103	108,376	48.25
	H-3	184,167	**228,667**	24.16	106,343	**111,028**	4.41
	H-2	268,925	220,765	-17.91	106,343	103,028	-3.12
	H-1	152,071	120,615	-20.69	98,922	70,797	-28.43
TOTAL ARUS MUDIK		**1,014,297**	**1,011,134**	**-0.31**	**562,506**	**559,615**	**-0.51**
ARUS LEBARAN	H1	116,370	71,342	-38.69	89,439	59,536	-33.43
	H2	126,155	112,496	-10.83	100,100	81,993	-18.09
TOTAL ARUS LEBARAN		**242,525**	**183,838**	**-24.20**	**189,539**	**141,529**	**-25.33**
ARUS BALIK	H+1	153,790	162,186	5.46	101,535	131,092	29.11
	H+2	155,200	157,126	1.24	138,999	115,376	-17.00
	H+3	172,689	166,592	-3.53	108,224	123,361	13.99
	H+4	143,697	**288,166**	100.54	97,861	**152,066**	55.39
	H+5	149,213	173,886	16.54	114,090	114,830	0.65
	H+6	126,106	123,197	-2.31	101,762	102,518	0.74
TOTAL ARUS BALIK		**900,695**	**1,071,153**	**18.93**	**662,471**	**739,243**	**11.59**
TOTAL H-7 s.d H+6		**2,157,517**	**2,266,125**	**5.03**	**1,414,516**	**1,440,387**	**1.83**

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2011

Berdasarkan grafik perbandingan volume lalu lintas Sepeda Motor (gambar 2) dan Mobil Pribadi (gambar 3) pada H-7 (23 Agustus 2011) sampai dengan H+6 (6 September 2011) terpantau bahwa puncak **arus mudik angkutan Lebaran** 2011/ 1432 H terjadi pada H-3 (28 Agustus 2011) yaitu sebanyak **228,667 Sepeda Motor** dan **111,028 Mobil Pribadi.** Berdasarkan titik pemantauan, puncak arus mudik lalu lintas Sepeda Motor dan Mobil Pribadi terjadi di titik pemantauan ***Ciasem*** (gambar 4 dan 5).

Sedangkan untuk **arus balik** terjadi peningkatan arus lalu lintas pada H+4 (4 September 2011) yaitu sebanyak **288,166 Sepeda Motor** dan **152,066 Mobil Pribadi**. Berdasarkan titik pemantauan, puncak arus balik lalu lintas Sepeda Motor dan Mobil Pribadi terjadi di titik pemantauan ***Ciasem*** (gambar 4 dan 5).

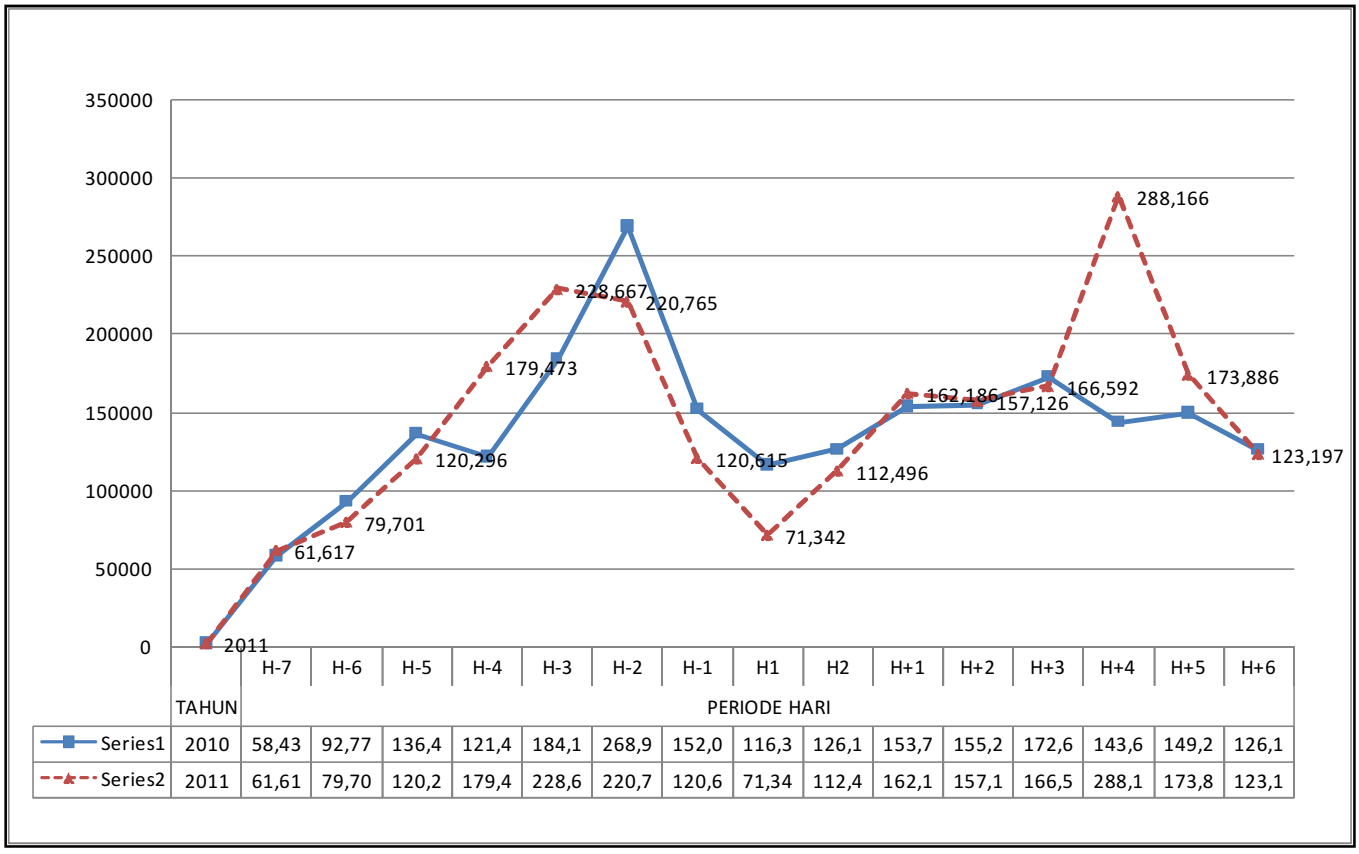

	TAHUN	PERIODE HARI														
		H-7	H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	H1	H2	H+1	H+2	H+3	H+4	H+5	H+6
Series1	2010	58,43	92,77	136,4	121,4	184,1	268,9	152,0	116,3	126,1	153,7	155,2	172,6	143,6	149,2	126,1
Series2	2011	61,61	79,70	120,2	179,4	228,6	220,7	120,6	71,34	112,4	162,1	157,1	166,5	288,1	173,8	123,1

Gambar 2
Perbandingan Volume Lalu Lintas Sepeda Motor pada H-7 s.d. H+6
Angkutan Lebaran 2011/1432 H

Sebagaimana gambar 2 diatas, ***fluktuasi pengguna Sepeda Motor*** mulai meningkat dan lebih tinggi jumlahnya dibanding Tahun 2010 yaitu pada H-4 (26 Agustus 2011) dan H-3 (27 Agustus 2011) yang merupakan Puncak Arus mudik pada Tahun 2011, sedangkan pada hari lainnya masih lebih rendah.

Fluktuasi pengguna sepeda motor untuk arus balik mulai meningkat dan lebih tinggi jumlahnya dibanding Tahun 2010 yaitu pada H+4 (5 September 2011).

Sedangkan berdasarkan gambar 3 dibawah ini, dapat diketahui bahwa ***fluktuasi pengguna Mobil Pribadi*** mulai **meningkat** dan lebih tinggi jumlahnya dibanding Tahun 2010 yaitu pada H-4 (26 Agustus 2011) dan H-3 (27 Agustus 2011) yang merupakan Puncak Arus mudik pada Tahun 2011, sedangkan pada hari lainnya masih lebih rendah.

Fluktuasi pengguna Mobil Pribadi untuk arus balik mulai meningkat dan lebih tinggi jumlahnya dibanding Tahun 2010 yaitu pada H+4 (5 September 2011).

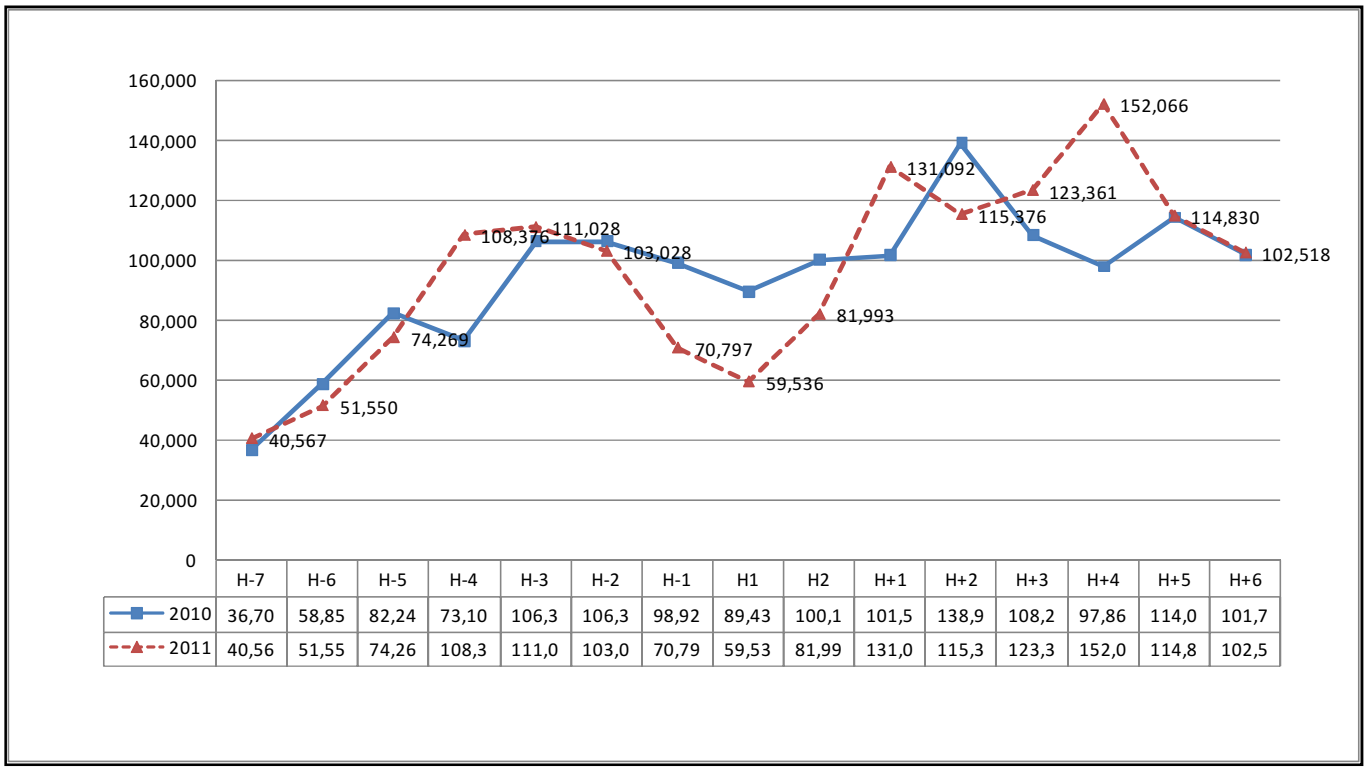

	H-7	H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	H1	H2	H+1	H+2	H+3	H+4	H+5	H+6
2010	36,70	58,85	82,24	73,10	106,3	106,3	98,92	89,43	100,1	101,5	138,9	108,2	97,86	114,0	101,7
2011	40,56	51,55	74,26	108,3	111,0	103,0	70,79	59,53	81,99	131,0	115,3	123,3	152,0	114,8	102,5

Gambar 3
Perbandingan Volume Lalu Lintas Mobil Pribadi pada H-7 s.d. H+6
Angkutan Lebaran 2011/1432 H

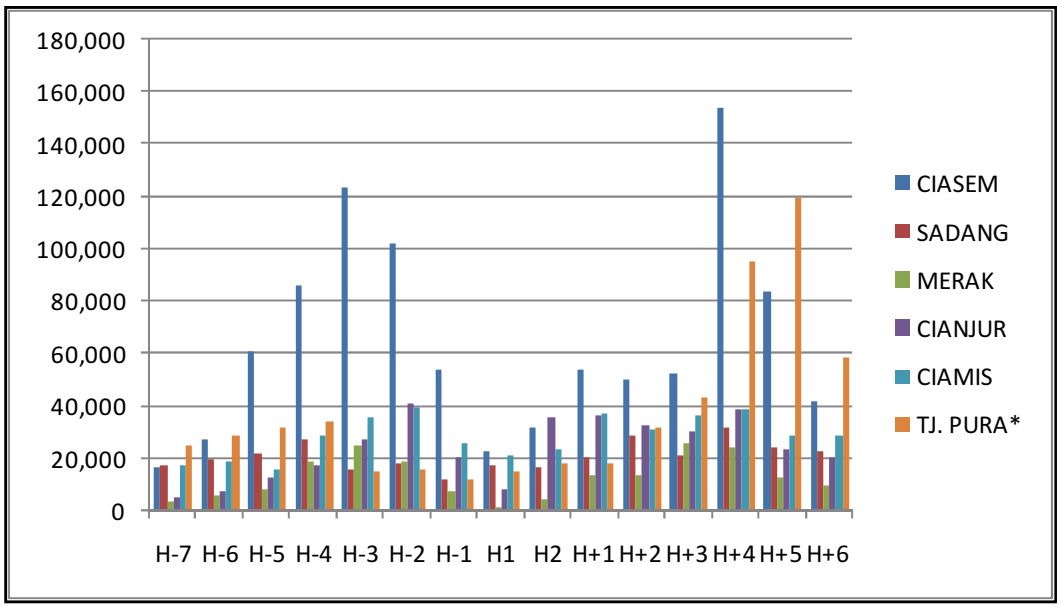

Gambar 4
Perbandingan Volume Lalu Lintas Sepeda Motor di 6 Titik Pemantauan dari H-7 s.d. H+5 Angkutan Lebaran 2011/1432 H

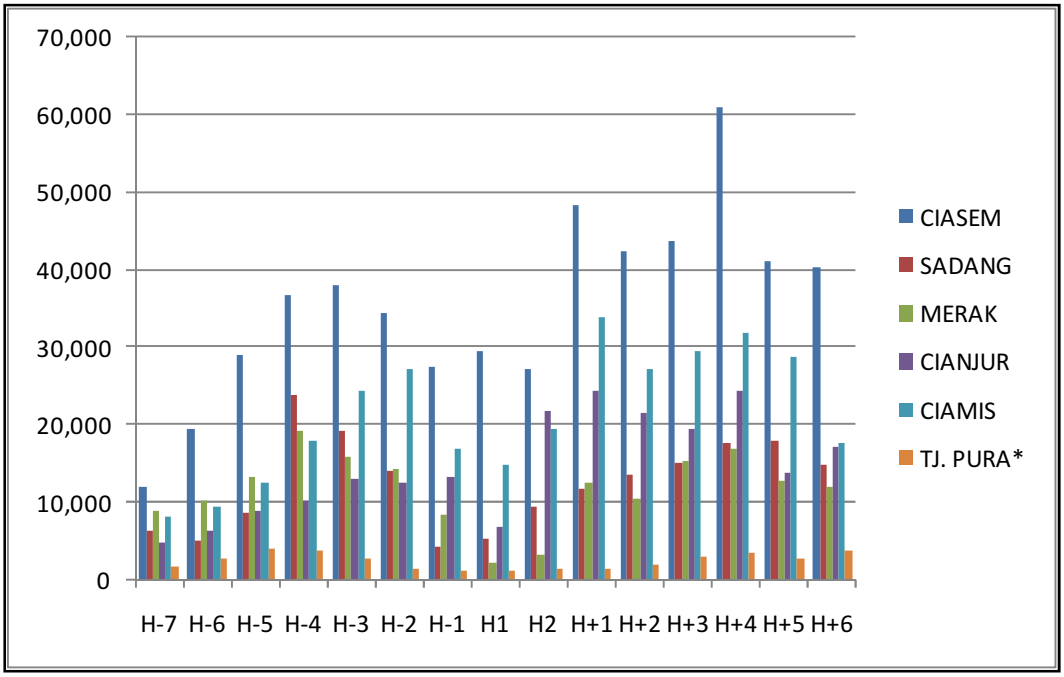

Gambar 5
Perbandingan Volume Lalu Lintas Mobil Pribadi di 6 Titik Pemantauan dari H-7 s.d. H+5 Angkutan Lebaran 2011/1432 H

G. Mudik Gratis

Selama Angkutan Lebaran Periode 2011 telah dilaksanakan program mudik gratis dengan total kendaraan **1.838 bus** dengan total jumlah penumpang sebesar **90.766 orang** dan **1.609 sepeda motor yang diangkut truk**. Selain itu juga dilaksanakan program **mudik gratis dengan** menggunakan **Kapal Laut** yang mengangkut sebanyak **300 sepeda motor** dan **700 penumpang**.

H. Pemantauan Tarif Angkutan Jalan

Dari hasil pemantauan tarif angkutan jalan pada 19 (Sembilan belas) terminal selama Angkutan Lebaran Tahun 2011, dari total **167 kendaraan yang diperiksa** terdapat **23 kendaraan (65%)** yang terindikasi melanggar tarif angkutan jalan pada pelayanan Bus Ekonomi. Kondisi ini terjadi **penurunan** dibandingkan dengan tahun 2010 dari **132 kendaraan yang diperiksa**, **86 kendaraan (14%) terindikasi melakukan pelanggaran tarif. (**Klarifikasi terhadap pelanggaran tarif akan dilakukan 1 bulan mendatang).

I. Pemantauan GPS

Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas pada jalur mudik, dapat dilihat melalui fasilitas GPS yang terpasang pada Bus Angkutan AKAP dan Pemadu Moda. Selanjutnya data hasil pemantauan tersebut dibandingkan dengan data hasil pemantauan tahun sebelumnya, dengan data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 10
Pemantauan GPS Pada H-7 s.d H+6 Angkutan Lebaran 2011/1432 H

	LINTASAN PEMANTAUAN	PERIODE	KECEPATAN RATA-RATA PER LINTASAN															KECEPATAN RATA-RATA ARUS MUDIK	KECEPATAN RATA-RATA ARUS LEBARAN	KECEPATAN RATA-RATA ARUS BALIK
		WAKTU	H-7	H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	H1	H2	H+1	H+2	H+3	H+4	H+5	H+6			
1	TOL JAKARTA - MERAK	2010	65.1	55.6	64.7	52.6	52.0	65.5	65.3	75.4	66.0	60.9	59.1	55.8	71.0	74.0	64.9	**62.0**	**70.7**	**64.3**
		2011	44.7	54.4	62.6	66.5	64.2	55.7	62.8	82.3	82.3	64.3	78.9	65.5	68.1	64.9	66.5	**58.7**	**82.3**	**68.0**
2	TOL DALAM KOTA	2010	67.7	66.4	61.1	48.3	51.0	53.6	64.5	72.4	69.8	75.5	67.4	65.8	66.5	60.5	73.4	**58.9**	**71.1**	**68.2**
		2011	65.1	57.6	50.3	60.0	77.4	74.6	84.1	83.9	83.9	71.1	74.6	72.2	70.2	71.0	71.0	**67.0**	**83.9**	**71.7**
3	TOL JAKARTA - CIKAMPEK	2010	55.1	64.6	62.4	57.8	58.8	53.2	74.1	76.5	84.3	76.8	71.3	75.0	70.8	73.0	74.5	**60.9**	**80.4**	**73.6**
		2011	66.8	68.1	62.9	55.6	63.3	70.1	84.4	84.0	84.0	68.5	88.1	65.0	68.0	73.0	60.0	**67.3**	**84.0**	**70.4**
4	TOL CIPULARANG	2010	67.7	76.9	80.5	74.3	65.3	66.9	74.3	73.7	75.6	83.3	76.6	77.0	76.5	80.7	83.5	**72.3**	**74.7**	**79.6**
		2011	82.0	83.4	82.5	70.9	72.2	78.6	87.3	87.8	87.8	82.0	87.0	71.5	77.7	85.5	76.9	**79.6**	**87.8**	**80.1**
5	CIKAMPEK - PAMANUKAN	2010	55.1	54.1	48.6	46.4	40.6	26.9	37.9	63.0	62.0	63.5	45.3	36.5	50.2	33.7	51.1	**44.2**	**62.5**	**46.7**
		2011	51.7	56.9	50.0	45.7	25.4	37.2	60.4	67.5	67.5	45.9	52.8	42.3	40.5	33.8	45.4	**46.8**	**67.5**	**43.4**
6	PAMANUKAN - CIREBON	2010	53.0	55.5	54.8	52.5	51.3	30.2	45.4	58.6	60.3	61.8	52.9	35.0	50.0	44.0	53.6	**49.0**	**59.5**	**49.6**
		2011	52.0	62.4	53.5	37.6	36.3	45.6	62.4	65.6	65.6	52.1	59.1	48.1	45.8	43.7	46.3	**50.0**	**65.6**	**49.2**
7	BANDUNG - TASIKMALAYA (NAGREK)	2010	41.1	41.0	37.4	43.8	32.3	26.0	27.5	21.8	30.5	36.2	28.4	33.1	34.9	35.9	35.7	**35.6**	**26.2**	**34.0**
		2011	36.7	39.3	41.8	30.9	24.0	30.3	43.2	41.2	41.2	34.7	41.9	28.8	32.3	36.4	38.3	**35.2**	**41.2**	**35.4**
8	CIREBON - TEGAL (PANTURA)	2010	51.8	54.0	52.5	52.7	44.8	40.9	45.6	56.6	40.0	48.1	46.4	34.6	42.8	50.5	49.0	**48.9**	**48.3**	**45.2**
		2011	49.8	53.6	53.7	41.3	33.5	31.5	56.7	60.5	60.5	52.2	46.8	43.3	44.0	33.5	55.0	**45.7**	**60.5**	**45.8**
9	TEGAL - SEMARANG	2010	42.8	48.0	43.6	50.3	42.6	39.5	50.8	57.5	51.4	54.3	39.7	40.3	38.4	45.8	44.3	**45.4**	**54.5**	**43.8**
		2011	47.7	53.7	47.6	41.1	46.6	40.0	60.2	49.2	49.2	49.0	55.0	41.6	39.3	47.0	45.7	**48.1**	**49.2**	**46.3**
10	TEGAL - PURWOKERTO	2010	47.3	44.3	36.6	39.3	41.2	38.0	29.1	48.3	25.0	34.2	35.4	26.8	29.8	31.9	37.4	**39.4**	**36.7**	**32.6**
		2011	42.6	44.5	38.3	38.5	31.8	37.8	46.8	40.9	40.9	38.9	37.5	30.3	30.7	36.3	38.6	**40.0**	**40.9**	**35.4**

Sumber : Tim Monitoring GPS, 2011

Berdasarkan data kecepatan rata-rata hasil pantauan GPS pada **10 (sepuluh) Lintasan Rawan Macet**, menunjukan bahwa secara umum terjadi ***peningkatan*** kecepatan rata-rata diseluruh lintasan dibandingkan dengan tahun 2010.

a. Kecepatan Rata-rata Arus Mudik

Kecepatan ***Tertinggi*** : **Lintasan Tol Cipularang** dengan kecepatan rata-rata mencapai **79.6 km/jam.**

Kecepatan ***Terendah***: **Lintasan Bandung - Tasikmalaya** dengan kecepatan rata-rata mencapai **35.2 km/jam.**

b. Kecepatan Rata-rata Arus Lebaran

Kecepatan ***Tertinggi*** : **Lintasan Tol Cipularang** dengan kecepatan rata-rata mencapai **87.8 km/jam.**

Kecepatan ***Terendah***: **Lintasan Bandung - Tasikmalaya** dengan kecepatan rata-rata mencapai **26.2 km/jam.**

c. Kecepatan Rata-rata Arus Balik

Kecepatan ***Tertinggi*** : **Lintasan Tol Cipularang** dengan kecepatan rata-rata mencapai **80,1 km/jam.**

Kecepatan ***Terendah:*** **Lintasan Tegal - Purwokerto** dan **lintasan Bandung – Tasikmalaya** dengan kecepatan rata-rata mencapai **34,4 km/jam.**

J. Data Kecelakan Lalu Lintas

Tabel 11
Tabulasi Kecelakaan Lalu lintas Angkutan Lebaran 2011/1432 H.

Hari	Tanggal	Jumlah Kasus		Meninggal		Luka Berat		Luka Ringan	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
H-7	23-08-11	297	409	53	61	76	92	145	249
H-6	24-08-11	248	289	39	48	75	83	132	166
H-5	25-08-11	240	426	65	58	86	92	154	231
H-4	26-08-11	265	326	75	44	95	103	148	225
H-3	27-08-11	264	350	67	59	88	93	136	263
H-2	28-08-11	309	417	64	75	93	101	163	251
H-1	29-08-11	220	318	62	55	75	91	133	249
H1	30-08-11	172	238	38	33	57	74	126	230
H2	31-08-11	186	225	64	57	65	82	171	163
H+1	01-09-11	181	262	48	59	60	89	133	190
H+2	02-09-11	211	270	58	38	75	90	133	198
H+3	03-09-11	243	288	53	46	84	78	164	235
H+4	04-09-11	174	188	41	28	47	61	156	175
H+5	05-09-11	246	253	45	49	86	71	180	189
H+6	06-09-11	193	247	43	35	55	67	102	224
Total		**2811**	**4065**	**722**	**668**	**971**	**1135**	**1863**	**2874**

Sumber : POLRI, 2011

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan di jalan dari H-7 s.d H+6 sebanyak **4.065 kejadian** dengan korban **meninggal** sebanyak **668 orang,** korban **luka berat** sebanyak **1.135 orang** dan korban **luka ringan** sebanyak **2.874 orang**.

K. Perbandingan Realisasi Dengan Prediksi

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Penumpang menggunakan Angkutan Umum

Moda	JUMLAH PENUMPANG			% Growth Prediksi (dev ± 2-5%)	Perbandingan Realisasi dengan Prediksi (%)
	2010 (1431 H)	Realisasi 2011 (1432 H) (H-7 s.d. H+6)	Prediksi 2011 (1432 H) (H-7 s.d. H+7)		
ANGKUTAN DARAT	8,106,641	8,284,709	9,030,098	11.39	91.75
a. Angkutan Jalan	5,164,862	5,246,400	5,665,497	9.69	92.60
b. Angkutan SDP	2,941,779	3,038,309	3,364,601	14.37	90.30
ANGKUTAN KERETA	2,253,123	1,746,488	2,917,598	29.49	59.86
ANGKUTAN LAUT	560,531	849,901	1,050,721	87.45	80.89
ANGKUTAN UDARA	2,389,659	2,771,737	2,480,526	3.80	111.74
Jumlah	13,309,954	13,652,835	15,478,943	16.30	88.20

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2011

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa ***realisasi jumlah penumpang*** yang menggunakan angkutan umum ***sampai dengan H+6*** adalah sebesar **88,20%** dibanding keseluruhan prediksi dari masa Angkutan Lebaran Tahun 2011.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Penumpang menggunakan Angkutan Pribadi

Moda	JUMLAH KENDARAAN			% Growth Prediksi (dev ± 2-5%)	Perbandingan Realisasi dengan Prediksi (%)
	2010 (1431 H)	Realisasi 2011 (H-7 s.d. H+6)	Prediksi 2011 (H-7 s.d. H+7)		
MOBIL PRIBADI	1,540,481	1,440,387	1,634,142	6.08	88.14
SEPEDA MOTOR	2,302,246	2,142,928	2,473,073	7.42	86.65

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2011

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan kendaraan jenis angkutan pribadi sampai dengan H+6 untuk **Mobil Pribadi** adalah **88.14%,** sedangkan pengguna **Sepeda Motor** sebesar **86.65%** dibanding keseluruhan prediksi dari masa Angkutan Lebaran Tahun 2011 (1432 H).

Jakarta, 7 September 2011

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010-2014 merupakan rencaa yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2010-2014 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2010-2014 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Lampiran 2.1. IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan
1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	1) Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas pengawasan muatan angkutan barang, dan penanganan lokasi rawan kecelakaan	Lokasi
	2) Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan melalui peningkatan fungsi alur pelayaran sungai dan danau, penyediaan SBNP di lintas penyeberangan, dan penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan	Lokasi
	3) Jumlah fasilitas unit pengujian kendaraan bermotor, peralatan pendukung kendaraan ramah lingkungan, dan fasilitas penunjang keselamatan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi jalan	Unit
	4) Jumlah fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Unit
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan/*regulatory reform*) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis	5) Jumlah rancangan, telaahan, penetapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan.	Peraturan
	6) Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan manajemen yang dikeluarkan	Sertifikat
	7) Jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan	Paket

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan
kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.		
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	8) Jumlah sarana prasarana keperintisan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang menjangkau kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan.	Lintas
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	9) Jumlah lokasi simpul/terminal transportasi jalan yang siap operasi	Lokasi
	10) Jumlah lokasi simpul/pelabuhan/dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang siap operasi	Lokasi
	11) Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan	Unit
	12) Tingkat penyediaan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan.	Unit
	13) Jumlah kegiatan peningkatan kapastias sistem operasi di transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan.	Lokasi

Namun, sesuai dengan hasil evaluasi LAKIP Tahun 2010 oleh Kementerian PAN dan RB, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan review terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2010-2014, Sasaran Eselon I, Indikator Kinerja Utama (Indikator Kinerja Eselon I), dan juga format matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012,

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 dan LAKIP 2011. Sehingga, diperoleh Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah di review sebagaimana tabel berikut:

Tabel Lampiran 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2010-2014 yang telah direview

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1. Meningkatnya Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sesuai Standar Pelayanan Minimal	1. Jumlah Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional	Lokasi
	2. Jumlah Tersedianya Fasilitas Prasarana Keselamatan Alur SDP	Lokasi
	3. Jumlah Tersusunnya Kajian Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen
	4. Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan
2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	5. Jumlah Keperintisan Angkutan Jalan	Rute/Trayek
	6. Jumlah Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas
	7. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Jalan Perintis	Unit
	8. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Unit
3. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	9. Jumlah Terbangunnya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi
	10. Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi
	11. Jumlah Terbangunnya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi
	12. Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi
	13. Jumlah Tersedianya Angkutan Umum Massal	Unit
4. Peningkatan Kualitas SDM dan	14. Jumlah Kompetensi Jabatan	Sertifikat

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan
Peraturan	15.Jumlah Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan	Peraturan
5. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Di Bidang Transportasi Darat	16.Jumlah Terbangunnya Teknologi Lalu Lintas Jalan	Lokasi
	17.Jumlah Terbangunnya Fasilitas Integrasi Pemadu Moda	Lokasi

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2011 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011 adalah terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel Lampiran 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1. Meningkatnya Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan PrasaranaTransportasi Darat Sesuai Standar Pelayanan Minimal	1. Jumlah Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional	Lokasi	64
	2. Jumlah Tersedianya Fasilitas Prasarana Keselamatan Alur SDP	Lokasi	30
	3. Jumlah Tersusunnya Kajian Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Paket	11
	4. Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan	5
2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	5. Jumlah Keperintisan Angkutan Jalan	Rute/Trayek	157
	6. Jumlah Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas	115
	7. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Jalan Perintis	Unit	48
	8. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Unit	30
3. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	9. Jumlah Terbangunnya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	23
	10.Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	14
	11.Jumlah Terbangunnya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi	76
	12.Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi	31
	13.Jumlah Tersedianya Angkutan Umum Massal	Unit	70
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan	14.Jumlah Kompetensi Jabatan	Sertifikat	60
	15.Jumlah Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan	Peraturan	15
5. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Di	16.Jumlah Terbangunnya Teknologi Lalu Lintas Jalan	Lokasi	2
	17.Jumlah Terbangunnya Fasilitas Integrasi Pemadu Moda	Lokasi	1

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Bidang Transportasi Darat			

C. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2011 ini.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan **Total Anggaran Rp. 1.742.957.781.000,-** adalah sebagai berikut:

Tabel Lampiran 2.4. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2011

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sesuai Standar Pelayanan Minimal	1. Jumlah Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional	Lokasi	64
	2. Jumlah Tersedianya Fasilitas Prasarana Keselamatan Alur SDP	Lokasi	30
	3. Jumlah Tersusunnya Kajian Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Paket	11
	4. Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan	5
2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	5. Jumlah Keperintisan Angkutan Jalan	Rute/Trayek	157
	6. Jumlah Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas	115
	7. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Jalan Perintis	Unit	48
	8. Jumlah Terbangunnya Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Unit	30

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	9. Jumlah Terbangunnya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	23
	10. Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	14
	11. Jumlah Terbangunnya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi	76
	12. Jumlah Terehabilitasinya Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lokasi	31
	13. Jumlah Tersedianya Angkutan Umum Massal	Unit	70
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan	14. Jumlah Kompetensi Jabatan	Sertifikat	60
	15. Jumlah Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan	Peraturan	15
5. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Di Bidang Transportasi Darat	16. Jumlah Terbangunnya Teknologi Lalu Lintas Jalan	Lokasi	2
	17. Jumlah Terbangunnya Fasilitas Integrasi Pemadu Moda	Lokasi	1

LAMPIRAN III

LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA TAHUN ANGGARAN 2011

1. PAGU ANGGARAN

a. Total DIPA T.A 2011 sebesar **Rp. 2.093.144.770.000,-**

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.066.344.200.000,-	(98,72 %)
PNBP	: Rp.	1.800.570.000,-	(0,09 %)
PLN	: Rp.	25.000.000.000,-	(1,19 %)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	37.513.267.000,-	(1,79 %)
Belanja Barang	: Rp.	365.536.819.000,-	(17,46 %)
Belanja Modal	: Rp.	1.690.094.684.000,-	(80,74 %)

b. Penambahan dan Pengurangan pagu T.A 2011 Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 21.121.424.000,- dengan rincian :

Reward	: Rp.	7.121.424.000,-	(+)
APBN Perubahan	: Rp.	34.000.000.000,-	(+)
Drop Loan PHLN	: Rp.	20.000.000.000,-	(-)

c. Total DIPA APBN-P T.A 2011 sebesar Rp. 2.114.266.194.000,-

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.107.465.624.000,-	(99,68 %)
PNBP	: Rp.	1.800.570.000,-	(0,09 %)
PLN	: Rp.	5.000.000.000,-	(0,24 %)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	37.513.267.000,-	(1,77 %)
Belanja Barang	: Rp.	365.536.819.000,-	(17,29 %)
Belanja Modal	: Rp.	1.711.216.108.000,-	(80,94 %)

d. Total DIPA Penghematan T.A 2011 sebesar Rp. 2.095.941.061.000,-

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.089.140.491.000,-	(99,68 %)
PNBP	: Rp.	1.800.570.000,-	(0,09 %)
PLN	: Rp.	5.000.000.000,-	(0,24 %)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	37.513.267.000,-	(1,77 %)
Belanja Barang	: Rp.	350.301.677.000,-	(16,71 %)
Belanja Modal	: Rp.	1.708.126.117.000,-	(81,50 %)

2. Jumlah Kantor di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat: 82 UPT/Satker terdiri dari :

a. Program LLAJ : 40 Satker

b. Program LLASDP : 37 Satker

c. Kantor Pusat & UPT : 5 Kantor

3. Kegiatan-kegiatan Pokok yang dilaksanakan Ditjen Perhubungan Darat

a. BIDANG LLAJ

1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (termasuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) di 32 (tiga puluh dua) Propinsi dengan dana sebesar Rp. 263,42 Miliar.
2. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di 1 (satu) Propinsi dengan Pagu sebesar Rp. 835 juta.
3. Pembangunan Terminal Penumpang di 16 (enam belas) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 102,75 Miliar.
4. Pengadaan Bus sebanyak 128 unit dengan Pagu sebesar Rp. 50,35 Milyar
5. Pengadaan dan Pemasangan Converter Kit dengan Pagu sebesar Rp. 4,25 Milyar
6. Subsidi Operasi Bus Perintis di 25 (dua puluh lima) Propinsi pada 157 lintas dengan Pagu sebesar Rp. 53,42 Miliar.
7. Rehabilitasi Jembatan Timbang dengan Pagu sebesar Rp. 10,96 Miliar.
8. Studi Kebijakan Transportasi Darat dengan Pagu sebesar Rp. 10,96 Miliar.

b. BIDANG LLASDP

1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru pada 16 (enam belas) lokasi pada 10 (sepuluh) Propinsi dengan Pagu sebesar Rp. 90,31 Miliar.
2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan sebanyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) lokasi pada 20 (dua puluh) Propinsi dengan total Pagu sebesar Rp. 303,92 Miliar.
3. Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan sebanyak 14 (empat belas) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 60,54 Miliar.
4. Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan sebanyak 2 (dua) dengan Pagu sebesar Rp. 10 Miliar.
5. Pembangunan Kapal Baru sebanyak 17 (tujuh belas) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 109,5 Miliar.
6. Pembangunan Bus Air Baru sebanyak 4 (empat) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 7 Miliar.
7. Pembangunan Kapal Lanjutan sebanyak 9 (sembilan) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 169,21 Miliar.
8. Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 41,67 Miliar.
9. Rehabilitasi Dermaga Danau sebanyak 5 (lima) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 10,41 Miliar.
10. Pengadaan/Pemasangan SBNP sebanyak 9 (sembilan) unit dengan Pagu sebesar Rp, 3,15 Miliar.
11. Pembangunan Break Water pada 4 (empat) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 110,81 Miliar.
12. Subsidi 53 (lima puluh tiga) Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis pada 115 (seratus lima belas) Lintas Penyeberangan Perintis dengan Pagu sebesar Rp.157,85 Miliar.

4. Pelaksanaan/Penyerapan Anggaran Tahun 2011 posisi 31 Desember 2011

Realisasi penyerapan DIPA (Revisi) T.A.2011 terhadap pagu setelah Penghematan sebesar Rp. 2.095.941.061.000,- posisi per 31 Desember 2011, Keuangan = Rp. 2.012.884.474.000,- (96,04 %) ; Fisik = 100%, terdiri dari :

- Rincian per Sumber Dana :

RM	:	Rp.	2.012.884.474.000,- (96,04 %)
PNBP	:	Rp.	195.980.000,- (00,01 %)
PLN	:	Rp.	NIHIL

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp.	31.599.697.000,- (84.24 %)
Belanja Barang	:	Rp.	313.788.287.000,- (97,62 %)
Belanja Modal	:	Rp.	1.667.496.490.000 ,- (97.62 %)

5. **Jumlah Paket Kontrak Strategis :**

a. Total Kontrak : 258 Paket

b. Sudah Kontrak : 256 Paket

c. Belum Kontrak : 2 Paket, terdiri dari :

- Kegiatan tidak dilaksanakan = 2 paket

Terdiri dari :

1. Kegiatan PHLN 1 Paket yaitu TA.IBRD Road Safety Awarness 4843/INO-srip pada Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat.

2. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan 1 paket yaitu Pembebasan Tanah Pelabuhan Penyeberangan Hunimoa pada Satker Pengembangan LLASDP Maluku

6. Kegiatan yang bertanda bintang

Terdapat dana blokir setelah penggunaan hasil penghematan sebesar Rp. 9.565.416.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembangunan kapal 5000 GT Lts Merak Bakauheni sebesar Rp. 9.515.418.000,- pada Satker Pengembangan sarana Transportasi SDP

2) Dana Non Alokasi sebesar Rp. 50.000.000,- pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

7. Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan

Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 7.300.000.000,- terdiri dari :

1) Pembebasan Tanah Pelabuhan Penyeberangan Hunimoa pada Satker Pengembangan LLASDP Maluku sebesar Rp. 1.700.000.000,- dikarenakan C

2) Kegiatan Pelatihan PPNS Bidang SDP sebesar Rp. 600.000.000,- karena peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3) IBRD Road Safety Awarengess 4843/IND-SRIP sebesar Rp. 5.000.000.000,- dikarenakan lelang ulang (PHLN)

8. Dana Tidak Terserap TA. 2010

a. Total Pagu : Rp. 2.095.941.061.000,-

b. Realisasi : Rp. 2.012.884.474.000,-

c. Sisa Dana Tidak Terserap : Rp. 83.056.587.000,-

SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	DANA TIDAK TERSERAP	PROSENTASE PENYERAPAN
RUPIAH MURNI				
BELANJA PEGAWAI	37,513,267,000	31,599,697,000	5,913,570,000	84.25
BELANA BARANG	350,301,677,000	313,788,287,000	36,513,390,000	89,57
BELANJA MODAL	1,708,126,117,000	1,667,496,490,000	40,629,627,000	97.62
TOTAL	2,095.941,061,000	2,012,884,474,000	83,056,587,000	96,04

RINCIAN TABEL DI ATAS SBB :

A. BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 5.913.570.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Belanja Transito Satker Kantor Pusat Ditjen Phb. Darat	762.125.000	Kelebihan Alokasi Dana
2.	Sisa Uang Makan dan Uang Lembur pada Satker Kantor Pusat Ditjen Phb. Darat	3.990.503.564	Kelebihan Alokasi Dana
3.	Sisa Uang Makan dan Uang Lembur pada Kantor BPLJSKB Bekasi, UPT Gorontalo, UPT Kariangau, UPT Kalabahi	1.160.941.436	Kelebihan Alokasi Dana

B. BELANJA BARANG SEBESAR RP. 36.513.390.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Sisa kontrak Subsidi Perintis	24.768.644.000	
2.	Sisa Belanja Perjalanan Dinas pada Satker Kantor Pusat Ditjen Hubdat	10.352.891.255	
3.	Sisa Belanja Perjalanan Dinas dari Satker	1.391854.745	

C. BELANJA MODAL SEBESAR Rp. 40.629.627.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Pembebasan Tanah Pelabuhan Penyeberangan Hunimoa pada Satker Pengembangan LLASDP Maluku	1.700.000.000	BPN Maluku Tengah terbitkan sertifikat baru
2.	Kegiatan Pelatihan PPNS Bidang SDP	600.000.000	Peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
3.	TA. IBRD Road Safety Awareness 3843/INO SRIP (BLN)	5.000.000.000	Lelang Ulang (PHLN)
4.	Pembangunan Gedung Khusus sebesar	5.000.000.000	IMB belum ada
5.	Pembangunan kapal 5000 GT Lts Merak Bakauheni	9.515.418.000	Diblokir
6.	Dana Non Alokasi	50.000.000	Diblokir